

BUPATI BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 262 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 123 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029.

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Dinas Pertanian yang selanjutnya disebut Distan adalah Perangkat Daerah yang bertugas sebagai pelaksana Urusan Pemerintahan bidang pertanian dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah atau yang disebut dengan Bapperida adalah Perangkat Daerah yang bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.
10. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah Kabupaten Bandung untuk periode 5 (lima) tahun.
12. Rencana Strategis Distan yang selanjutnya disebut Renstra Distan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

14. Rencana Kerja Distan yang selanjutnya disebut Renja Distan adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu Perangkat Daerah, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.

## BAB II
## RUANG LINGKUP RENSTRA DISTAN

### Pasal 2

Dokumen Renstra Distan merupakan dokumen perencanaan strategis Distan untuk periode 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Distan yang memuat tujuan, sasaran, indikator, target kinerja, strategi dan kebijakan dalam Renstra Distan yang berpedoman pada RPJMD tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Dokumen Renstra Distan bertujuan untuk:

a. menjaga kesinambungan serta konsistensi pelaksanaan pembangunan dengan visi misi RPJMD dan sesuai dengan tugas dan fungsi Distan dalam kerangka waktu sesuai kapasitas Distan dalam implementasinya;
b. menerjemahkan arah dan kebijakan Pemerintah Daerah terkait perkembangan pelayanan Distan agar lebih dipahami dan bermanfaat bagi masyarakat;
c. memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu strategis yang menjadi prioritas pelayanan Distan;
d. menyediakan dasar *(benchmark)* untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan sasaran Distan;
e. merumuskan fokus, strategi dan langkah-langkah yang jelas untuk mencapai tujuan; dan
f. membantu dalam melakukan evaluasi kinerja Distan.

BAB III
SISTEMATIKA RENSTRA DISTAN

Pasal 4

(1) Renstra Distan Tahun 2025-2029 menjadi pedoman Distan dalam menyusun Renja Distan.

(2) Renstra Distan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

a. bab I pendahuluan paling sedikit memuat:
   1. latar Belakang;
   2. dasar hukum penyusunan;
   3. maksud dan tujuan; dan
   4. sistematika penulisan.

b. bab II gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis Distan paling sedikit memuat:
   1. gambaran pelayanan Distan; dan
   2. permasalahan dan isu strategis Distan.

c. bab III tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan paling sedikit memuat:
   1. tujuan dan sasaran Renstra Distan Tahun 2025-2029;
   2. strategi Distan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029; dan
   3. arah kebijakan Distan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Tahun 2025-2029.

d. bab IV program, kegiatan, subkegiatan, dan kinerja penyelenggaraan bidang urusan paling sedikit memuat:
   1. uraian program, kegiatan, subkegiatan, beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
   2. uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
   3. target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja utama Distan; dan
   4. target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui indikator kinerja kunci.

e. Bab V penutup paling sedikit memuat:
   1. kesimpulan;
   2. kaidah pelaksanaan; dan
   3. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

(3) Dokumen Renstra Distan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB IV
## PENGENDALIAN DAN EVALUASI RENSTRA DISTAN

### Pasal 5

(1) Distan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra Distan dan evaluasi hasil Renstra Distan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilaporkan kepada Bupati melalui Kepala Bapperida.
(2) Bapperida melakukan verifikasi atas hasil pengendalian dan evaluasi yang dilakukan Distan terhadap pelaksanaan dan hasil Renstra Distan.
(3) Kepala Distan menindaklanjuti hasil verifikasi sebagaimana pada ayat (2) sebagai bahan penyempurnaan dan perbaikan Renstra Distan.
(4) Format pengendalian dan evaluasi serta verifikasi sebagaimana ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB V
## PERUBAHAN RENSTRA DISTAN

### Pasal 6

Perubahan Renstra Distan dapat dilakukan apabila :

a. perubahan Renstra Distan mempedomani perubahan RPJMD;
b. perubahan Renstra Distan dilakukan sekurang kurangnya adanya perubahan tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan; dan
c. apabila terdapat perubahan kelembagaan Distan, maka Renstra Distan dapat dilakukan perubahan dengan tetap mempedomani program, indikator program dan pendanaan indikatif dalam RPJMD.

Pasal 7

Perubahan Renstra Distan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

(1) Indikator kinerja dan indikasi pendanaan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Distan Tahun 2025-2029 dapat berubah sesuai dengan perkembangan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
(2) Dalam hal pelaksanaan Renstra Distan terjadi perubahan target capaian sasaran tahunan tetapi tidak mengubah indikator sasaran pembangunan jangka menengah, perubahan dapat dilakukan dalam Renja Distan.
(3) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengakomodir perubahan indikator kinerja dan indikasi pendanaan, baik sebagian maupun keseluruhan pada bagian tersebut.
(4) Kerangka Pendanaan yang mencakup pendapatan, belanja dan pembiayaan yang tercantum dalam Peraturan Bupati ini merupakan angka yang bersifat indikatif, yang akan disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat, kebijakan pemerintah provinsi dan kemampuan keuangan daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

BUPATI BANDUNG,

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 17 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG,

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 262

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR 262 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

# RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025-2029

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG RENCANA STRATEGIS
DINAS PERTANIAN TAHUN 2025-2029

# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah yang wajib disusun oleh setiap Perangkat Daerah. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 yang mengatur tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 memperkuat hal tersebut dengan mengarahkan Bupati/Wali Kota agar memerintahkan kepala perangkat daerah menyusun Renstra secara simultan dan terkoordinasi dengan penyusunan RPJMD Tahun 2025–2029.

Dalam konteks tersebut, Renstra Dinas Pertanian menjadi dokumen perencanaan strategis lima tahunan yang mendefinisikan arah, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan sektor pertanian. Dokumen ini tidak hanya sebagai kewajiban administratif, melainkan menjadi koridor pelaksanaan program dan kegiatan dinas yang disusun secara sinergis dengan arah kebijakan pembangunan daerah dan nasional, termasuk RPJMN 2025–2029, arah kebijakan sektor pertanian, serta prioritas pembangunan pertanian Kabupaten Bandung.

Sebagai sektor yang strategis, pertanian memegang peranan penting dalam memperkuat ketahanan pangan, mendorong pengembangan agroindustri pedesaan, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, sektor ini menjadi motor penggerak bagi akselerasi pembangunan pedesaan di Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, keberlanjutan dan daya saing sektor pertanian perlu dirancang melalui kebijakan yang terukur, inklusif, dan berorientasi jangka menengah.

Melalui penyusunan Renstra Dinas Pertanian, sebagai bentuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 dan Pasal 6 Perda Kabupaten Bandung Nomor

10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Dinas Pertanian menyusun arah kebijakan Renstra 2025–2029 dengan mengintegrasikan prinsip perlindungan petani melalui penyediaan sarana produksi, sistem asuransi, sistem informasi risiko iklim dan pemasaran, serta pemberdayaan melalui pendidikan, kelembagaan petani, dan regenerasi petani berbasis inovasi teknologi dan kewirausahaan.

Renstra Dinas Pertanian juga disusun dengan memperhatikan berbagai tantangan dan dinamika seperti dampak perubahan iklim, krisis pascapandemi, ketimpangan daya saing produk, fluktuasi harga pangan, dan pergeseran struktur tenaga kerja pertanian. Dokumen ini dirancang untuk menjawab isu-isu strategis tersebut sekaligus mengarahkan intervensi prioritas dinas, antara lain perlindungan lahan pertanian berkelanjutan, revitalisasi sistem penyuluhan, penguatan kelembagaan petani, dan pengembangan pertanian berbasis teknologi dan presisi.

Sebagaimana amanat Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025, pendekatan penyusunan Renstra harus memadukan prinsip teknokratis, partisipatif, politis, serta top-down dan bottom-up. Penyusunan dilakukan berdasarkan data dan informasi yang akurat, mempertimbangkan hasil evaluasi Renstra 2020–2024, serta diarahkan pada pencapaian visi-misi kepala daerah terpilih. Di samping itu, pendekatan logika dan sistem dinamis menjadi landasan penting dalam merumuskan strategi yang mampu menghubungkan antara permasalahan, kebijakan, hingga hasil yang terukur.

Dalam penyusunannya, Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025–2029 menggunakan beberapa pendekatan sebagaimana diamanatkan dalam Inmendagri No. 2 Tahun 2025, yaitu:

1. Pendekatan teknokratis, menggunakan data dan informasi objektif, evaluasi capaian kinerja sebelumnya, serta perhitungan proyeksi dan tren pembangunan pertanian.
2. Pendekatan partisipatif, melibatkan pemangku kepentingan pertanian (stakeholders) baik internal maupun eksternal, seperti petani, penyuluh, pelaku usaha pertanian, akademisi, dan mitra kerja strategis.
3. Pendekatan politis, memperhatikan visi, misi, dan program prioritas Kepala Daerah terpilih hasil Pilkada 2024 yang tertuang dalam dokumen RPJMD.
4. Pendekatan top-down dan bottom-up, untuk menjamin kesinambungan arah kebijakan nasional hingga lokal, serta mencerminkan kebutuhan dari tingkat akar rumput hingga kebijakan makro.

5. Pendekatan logika dan sistem dinamis, yang merumuskan hubungan sebab akibat dari permasalahan, tujuan, strategi, dan intervensi program secara sistematis untuk mencapai perubahan yang diinginkan.

Lebih jauh, penyusunan Renstra ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan agenda transformasi pemerintahan digital dan peningkatan kualitas layanan publik di sektor pertanian. Dinas Pertanian dituntut mampu merespons tantangan birokrasi modern melalui digitalisasi layanan, transparansi informasi, serta pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).

Dengan demikian, Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 menjadi dokumen penting dalam mengarahkan pembangunan sektor pertanian yang produktif, adaptif terhadap perubahan, inklusif, dan berkelanjutan, serta mencerminkan potensi dan kekhasan lokal wilayah Kabupaten Bandung. Dokumen ini sekaligus menjadi instrumen penghubung antara kebijakan jangka panjang daerah (RPJPD), agenda pembangunan lima tahunan (RPJMD), dan pelaksanaan teknis kegiatan tahunan perangkat daerah.

## 1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung 2025-2029 mempertimbangkan landasan hukum, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.2580 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 100);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2013 Nomor 4);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 121);
18. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
19. Peraturan Bupati Bandung Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Bandung;
20. Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2025, tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung;
21. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Nomor 188.4/1328/Dinas, tentang Focal Point Pengarusutamaan Gender (PUG) Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2022.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

### 1.3.1 Maksud

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 adalah merumuskan kebijakan pembangunan lingkup Dinas Pertanian untuk kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang lebih selaras dengan peraturan perundangan perencanaan pembangunan di atasnya.

1.3.2 Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2025–2029 bertujuan untuk:

1. Memberikan arah strategis bagi Dinas Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya selama periode lima tahun, agar sejalan dengan visi dan misi Kepala Daerah serta arah pembangunan daerah yang termuat dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029.
2. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar program dan kegiatan dinas dengan kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta memastikan keterpaduan antara perencanaan makro dan sektoral.
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pertanian, serta sebagai tolok ukur evaluasi kinerja dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan.
4. Menampung aspirasi dan kebutuhan masyarakat tani melalui proses perencanaan yang partisipatif, berbasis data, dan responsif terhadap isu-isu strategis daerah, nasional, maupun global yang berdampak terhadap sektor pertanian.
5. Menjamin kesinambungan kebijakan pembangunan pertanian melalui perumusan tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan indikator kinerja yang terukur dan dapat dilaksanakan secara realistis.

## 1.4 Sistematika Penulisan

Terdapat beberapa pendekatan dalam menyusun Rencana Strategis. Salah satu pendekatan yang dianggap paling efektif dalam penyusunan rencana tersebut adalah pendekatan DSTP (*draw-see-think-plan*). Pendekatan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: (1) menentukan gambaran ideal mengenai suatu kondisi tertentu; (2) mengetahui kondisi terkini dan menentukan kesenjangan kondisi tersebut dengan kondisi ideal yang telah ditentukan; (3) menyusun kegiatan spesifik yang harus dilakukan untuk mempersempit kesenjangan tersebut; dan (4) menentukan sumberdaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut;

Bab I : PENDAHULUAN mencakup Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan. Bab ini mendeskripsikan pengertian, fungsi, proses penyusunan,

keterkaitan dengan RPJMD, Renstra kementerian dan Renstra provinsi dan Renja PD.

Bab II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH memaparkan tentang gambaran pelayanan PD, tugas dan fungsi PD, sumber daya PD, kinerja pelayanan PD, kelompok sasaran layanan, permasalahan dan isu strategis PD.

Bab III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN, memaparkan tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 serta strategi dan arah kebijakan PD dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN, Bab ini berisi uraian program, uraian kegiatan, uraian subkegiatan berdasarkan kinerja/indicator/target/pagu indikatif, uraian subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029 melalui IKU PD, target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintah daerah Tahun 2025-2029 melalui IKK PD.

Bab V : PENUTUP.

# BAB II

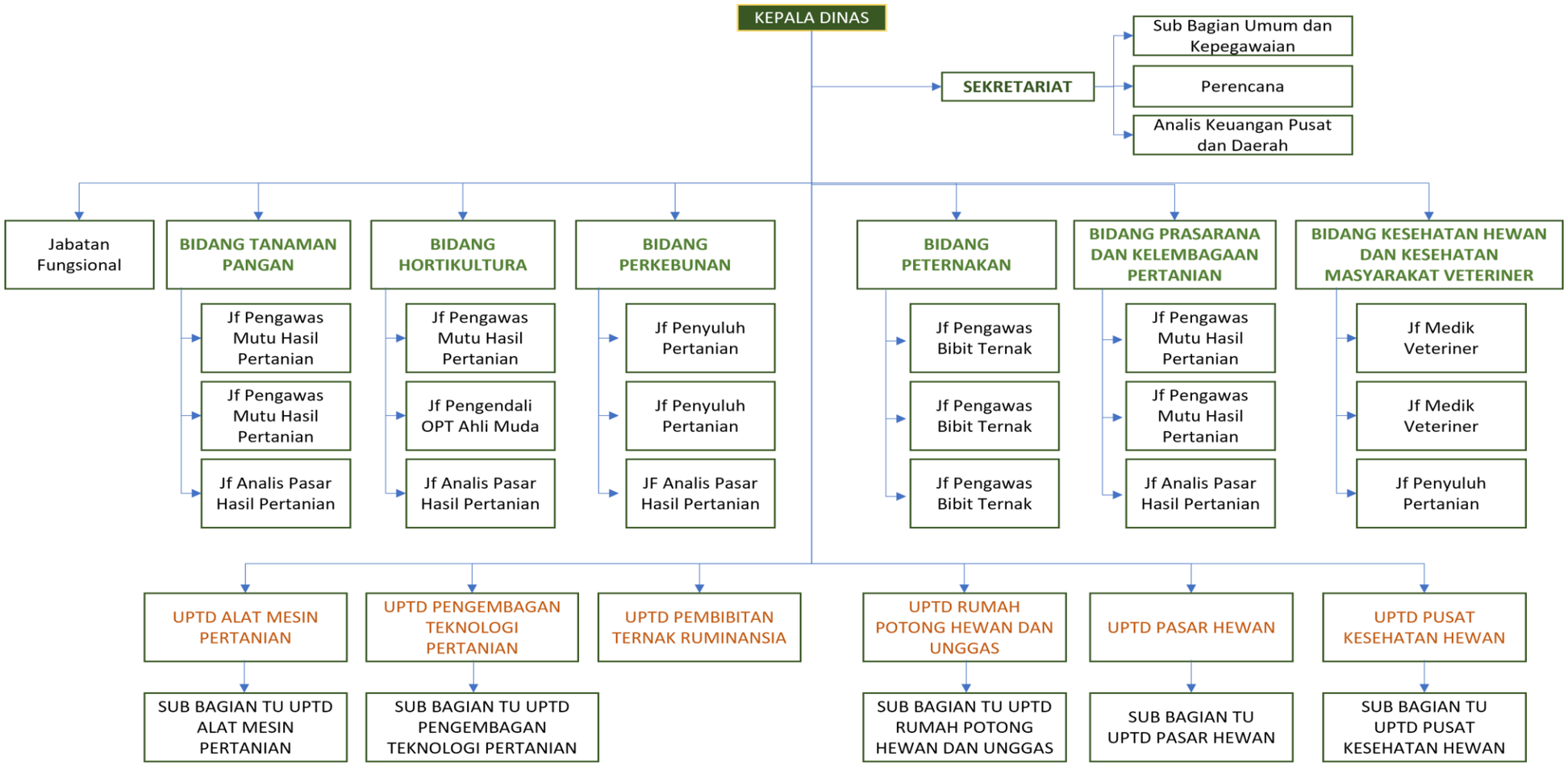
# GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU DINAS PERTANIAN

## 2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pertanian

### 2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Pertanian

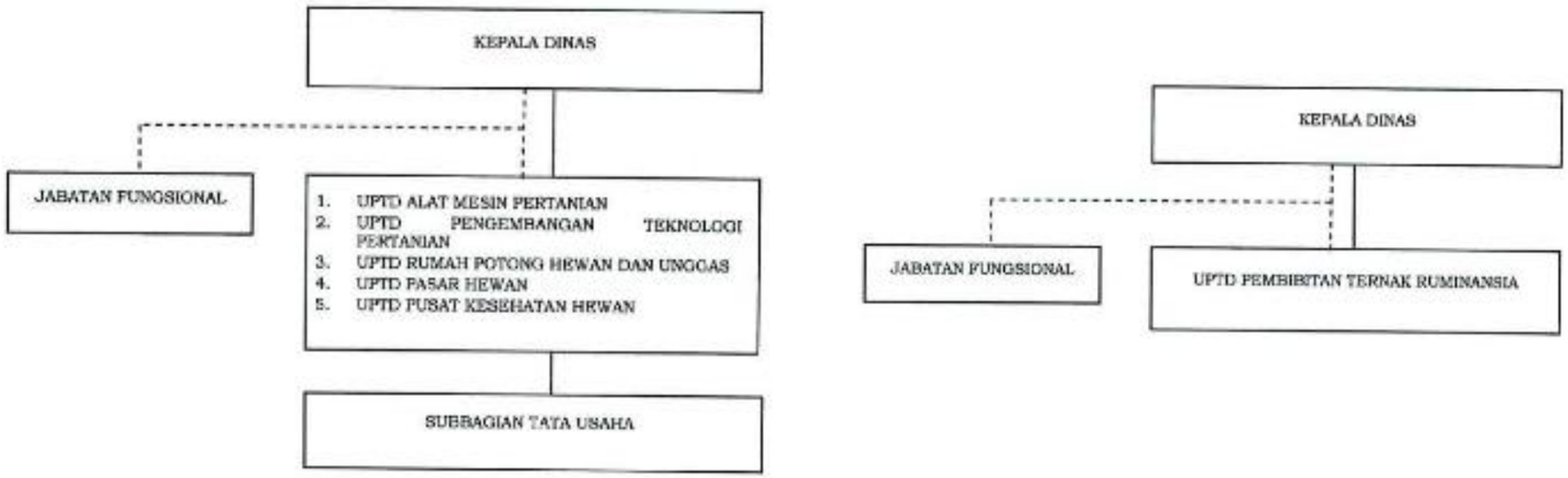
Dinas Pertanian Kabupaten Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 12 tahun 2016 tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung” dimana Dinas Pertanian fokus menangani pembangunan Urusan Pertanian. Menindaklanjuti perubahan aturan hukum terkini, berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Nomor 57 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung, pelaksanaan pembangunan pertanian pada Dinas Pertanian dilaksanakan oleh 6 Bidang, yaitu Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan, Prasarana dan Kelembagaan Petani serta Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner. Adapun dalam pelaksanaan tugas pelayanan teknis di tingkat lapangan, dibantu dengan keberadaan 6 Unit Pelayanan Teknis Daerah, yaitu UPTD Alat Mesin Pertanian, UPTD Pengembangan Teknologi Pertanian, UPTD Pembibitan Ternak Ruminansia, UPTD Rumah Potong Hewan dan Unggas, UPTD Pasar Hewan, dan UPTD Puskeswan. Struktur Dinas Pertanian dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung




Sumber: Dinas Pertanian, 2025

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Dinas Pertanian menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung




Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Tugas pokok Dinas Pertanian berdasarkan Perbup Bandung No. 76 tahun 2025 tentang Pedoman Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Distan Kabupaten Bandung yaitu:

1. KEPALA DINAS

   Tugas Pokok:

   Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, mengatur, merumuskan, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan dan pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pertanian

   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi :

   a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
   b. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya;
   c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.

2. SEKERTARIS

   Tugas Pokok :

   Sekertaris mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan

   Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretaris menyelenggarakan fungsi :

   a. penetapan penyusunan rencana kerja kesekretariatan;
   b. pengumpulan dan pengolahan dokumen perencanaan Dinas;
   c. penyelenggaraan tugas-tugas kesekretariatan;
   d. penyelenggaraan pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
   e. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
   f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Sekretariat.

3. BIDANG TANAMAN PANGAN

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Tanaman Pangan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Tanaman Pangan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Sarana menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang tanaman pangan, meliputi Sarana Pendukung, Produksi, dan Pengembangan dan Pengelolaan Hasil;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang tanaman pangan, meliputi Sarana Pendukung, Produksi, dan Pengembangan dan Pengelolaan Hasil;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang tanaman pangan.

4. BIDANG PRASARANA DAN KELEMBAGAAN PETANI

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Prasarana dan Kelembagaan Petani menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang prasarana dan kelembagaan petani, meliputi Pembangunan Prasarana, Pengelolaan Prasarana Pelayanan, dan Pengendalian dan Perlindungan Lahan;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang prasarana dan kelembagaan petani, meliputi Pembangunan Prasarana, Pengelolaan Prasarana Pelayanan, dan Pengendalian dan Perlindungan Lahan;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan dan pelayanan rekomendasi teknis izin usaha pertanian; dan;

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang prasarana dan kelembagaan petani.

5. BIDANG HORTIKULTURA

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Hortikultura, mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Hortikultura;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Bidang Hortikultura menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang hortikultura, meliputi Penanggulangan Dampak Bencana dan pengembangan pengelolaan hasil, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Pelayanan Usaha dan produksi;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang hortikultura, meliputi Penanggulangan Dampak Bencana dan pengembangan pengelolaan hasil, Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan Pelayanan Usaha dan produksi;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan dan pelayanan rekomendasi teknis izin usaha pertanian; dan;

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang hortikultura.

6. BIDANG PETERNAKAN

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Peternakan;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Peternakan menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Peternakan, meliputi Seksi Produksi Peternakan (Pengawas Bibit Ternak), Seksi Perbibitan Ternak (Pengawas Bibit Ternak), Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Ternak (Pengawas Bibit Ternak);
b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Peternakan, meliputi Seksi Produksi Peternakan (Pengawas Bibit Ternak), Seksi Perbibitan

Ternak (Pengawas Bibit Ternak), Seksi Pengembangan dan Pengelolaan Hasil Ternak (Pengawas Bibit Ternak);

c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Peternakan.

7. BIDANG KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di bidang Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Kepala Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Medikveteriner), Seksi Pelayanan Kesehatan, Pengamatan Penyakit, dan Obat Hewan (Penyuluh Pertanian), Seksi Pelayanan Masyarakat Veteriner (Penyuluh Pertanian);
b. Penyelenggaraan rencana kerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi Seksi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Medikveteriner), Seksi Pelayanan Kesehatan, Pengamatan Penyakit, dan Obat Hewan (Penyuluh Pertanian), Seksi Pelayanan Masyarakat Veteriner (Penyuluh Pertanian);
c. Penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
d. Penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

8. BIDANG PERKEBUNAN

Tugas Pokok :

Kepala Bidang Perkebunan mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas – tugas di Bidang Perkebunan.

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Kepala Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi :

a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis operasional bidang perkebunan, meliputi pengembangan penyuluh pertanian dan pengelolaan hasil, pengembangan kelembagaan petani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan sarana prasarana pendukung penyuluhan dan peningkatan produksi;

b. penyelenggaraan rencana kerja bidang perkebunan, meliputi pengembangan penyuluh pertanian dan pengelolaan hasil, pengembangan kelembagaan petani dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan, dan sarana prasarana pendukung penyuluhan dan peningkatan produksi;

c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. penyelenggaraan dan pelayanan rekomendasi teknis izin usaha pertanian; dan;

e. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja bidang perkebunan

2.1.2 Sumber Daya Dinas Pertanian

Sumberdaya manusia merupakan sektor utama dalam mencapai tujuan pertanian artinya dalam mencapai tujuan pertanian dan kesuksesan dalam melakukan kegiatan usaha tani sangat tergantung pada sumberdaya manusianya baik petani sebagai pemangku kepentingan, unsur pegawai Dinas Pertanian baik struktural ataupun penyuluh yang memiliki tugas dalam menyampaikan informasi, inovasi dan bimbingan dalam kegiatan berusaha tani. Kabupaten Bandung dengan luas wilyah 1.762,39 km2 , terdiri dari 31 kecamatan, 270 desa, dan 10 kelurahan dimana sektor pertanian masih merupakan andalan di kabupaten ini perlu ditunjang oleh SDM yang handal dan berkualitas dalam bidang pertanian termasuk didalamnya penyuluh pertanian.

Komposisi ASN Dinas Pertanian Tahun 2025 berjumlah 210 orang sebagian besar atau 70% merupakan ASN yang bertugas di lapangan, diantaranya 25% penyuluh pertanian PNS, 27% penyuluh pertanian PPPK, 8% medik dan paramedic PNS, 6% PPPK Teknis, dan 4% medik dan

paramedic PPPK. Adapun ASN yang bertugas di lingkungan kantor dan UPTD tersisa 30% berkurang dari tahun sebelumnya sebanyak 36,32%. Sementara itu berdasarkan jenis kelamin terdapat 115 orang pegawai Perempuan dan 95 orang pegawai Laki-Laki.

Tabel 2.1. Sumberdaya Manusia ASN Dinas Pertanian Tahun 2025

| No. | URAIAN | Jumlah Pegawai | | Gender | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | (orang) | % | L | P |
| 1 | STRUKTURAL | 64 | 30 | 36 | 28 |
| | - Pejabat Struktural | 20 | 10 | 8 | 12 |
| | -JF Penyetaraan | 9 | 4 | 5 | 4 |
| | -Jabatan Fungsional Umum (JFU) / Pelaksana | 31 | 15 | 21 | 10 |
| | -CPNS | 4 | 2 | 2 | 2 |
| 2 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | 146 | 70 | 79 | 67 |
| | -Penyuluh Pertanian PNS | 53 | 25 | 27 | 26 |
| | -Medik dan Paramedik PNS | 17 | 8 | 4 | 13 |
| | -Penyuluh Pertanian PPPK | 56 | 27 | 34 | 22 |
| | -Medik dan Paramedik PPPK | 8 | 4 | 5 | 3 |
| | -PPPK Teknis | 12 | 6 | 9 | 3 |
| JUMLAH | | 210 | 100% | 115 | 95 |

Sumber Data : Dinas Pertanian, 2025

Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPTD Dinas Pertanian




Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Sebagaimana dinas yang mengedepankan pengarusutamaan gender, komposisi Perempuan dan Laki-Laki di Dinas Pertanian relatif seimbang, yaitu 115 orang laki-laki berbanding 95 perempuan. Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas 28 orang perempuan menduduki jabatan struktural berbanding dengan laki-laki sebanyak 36 orang. Disisi lain pegawai lapangan Dinas Pertanian sebagian besar merupakan petugas laki-laki yaitu sebesar 38% dan sisanya 32% merupakan perempuan.

Tabel 2.2. Golongan Sumberdaya Manusia ASN Dinas Pertanian Tahun 2025

| No | Uraian | Golongan | | | | | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | | II | | III | | IV | | PPPK | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | STRUKTURAL | | | | | | | | | | | |
| | -Pejabat Struktural | | | | | 6 | 8 | 2 | 4 | | | 20 |
| | -JF Penyetaraan | | | | | 2 | 2 | 3 | 2 | | | 9 |
| | -Jabatan Fungsional Umum (JFU) / Pelaksana | | | 4 | 4 | 17 | 6 | | | | | 31 |
| | -CPNS | | | | | 2 | 2 | | | | | 4 |
| 2 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | | | | | | | | | | | |
| | -Penyuluh Pertanian PNS | | | 5 | 4 | 21 | 22 | | | | | 52 |
| | -Medik dan Paramedik PNS | | | 1 | 6 | 4 | 6 | | | | | 17 |
| | -Penyuluh Pertanian PPPK | | | | | | | | | 34 | 22 | 56 |
| | -Medik dan Paramedik PPPK | | | | | | | | | 5 | 3 | 8 |
| | -PPPK Teknis | | | | | | | | | 9 | 3 | 12 |

Sumber Data : Dinas Pertanian, 2025

Tabel 2.3. Pendidikan Sumberdaya Manusia ASN Dinas Pertanian Tahun 2025

| No | Uraian | Pendidikan Terakhir | | | | | | | | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | SMA/Sederajat | | D3 | | D4/S1 | | S2 | | |
| | | L | P | L | P | L | P | L | P | |
| 1 | STRUKTURAL | | | | | | | | | |
| | -Pejabat Struktural | | | | | 4 | 5 | 4 | 7 | 20 |
| | -JF Penyetaraan | | | | | | 1 | 5 | 3 | 9 |
| | -Jabatan Fungsional Umum (JFU) / Pelaksana | | | | | | | | | 0 |
| | -CPNS | | | | | 2 | 2 | | | 4 |
| 2 | Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) | | | | | | | | | |
| | -Penyuluh Pertanian PNS | | | | | | | | | 0 |
| | -Medik dan Paramedik PNS | | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | | | 17 |
| | -Penyuluh Pertanian PPPK | 2 | 2 | 8 | 2 | 24 | 18 | | | 56 |
| | -Medik dan Paramedik PPPK | 2 | 1 | 3 | 1 | | 1 | | | 8 |
| | -PPPK Teknis | 1 | | 2 | | 6 | 3 | | | 12 |

Sumber Data : Dinas Pertanian, 2025

Selain sumberdaya manusia, untuk mendukung pelaksanaan pelayanan Urusan Pertanian, ditunjang dengan ketersediaan sumberdaya aset dan unit-unit pelayanan teknis dinas yang berada di daerah. Pada Tahun 2021 jumlah aset yang dikelola oleh Dinas Pertanian sebesar Rp.90.188.072.277,- yang meliputi 5 jenis aset dan 1.740 objek. Aset tersebut diantaranya berupa 28 objek tanah, 1586 objek peralatan dan mesin, 92 objek gedung dan bangunan, 25 objek jalan, irigasi, dan jaringan, serta 9 objek aset tetap lainnya.

Tabel 2.4. Aset yang Dikelola Dinas Pertanian

| No | Jenis Aset | Jumlah | Harga (Rp) |
|---|---|---|---|
| 1 | Tanah | 28 objek | 14.747.913.371,00 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 1586 objek | 27.529.844.433,00 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 92 objek | 44.783.657.473,00 |
| 4 | Jalan, Irigasi dan Jaringan | 25 objek | 2.177.204.800,00 |
| 5 | Aset tetap lainnya | 9 objek | 949.452.200,00 |
| | Jumlah | 1.740 objek | 90.188.072.277,00 |

Sumber Data : Dinas Pertanian, 2024

Banyaknya jumlah objek yang dikelola sebanding dengan banyaknya fungsi Dinas Pertanian dalam pelayanan masyarakat tercermin dalam bagan struktur organisasi Dinas Pertanian yang merupakan Perangkat Daerah Type A dengan 6 Bidang dan Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) di daerah. Unit Pelaksana Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bandung, terdapat 6 (enam) UPTD yaitu:

1. UPTD Perbibitan Ternak, yang berlokasi di Ds. Cisondari Kec. Pasirjambu dan Ds. Lebak Muncang Kec. Ciwidey.
2. UPTD Puskeswan dan Laboratorium: yang berlokasi di Ds. Gandasari Kec. Katapang; Ds. Mekarsari Kec. Baleendah; Ds. Waluya Kec. Cicalengka; Ds. Pasirjambu Kec. Pasirjambu; Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan; Ds. Cikoneng Kec. Ciparay; Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi; dan Ds. Majasetra Kec. Majalaya.
3. UPTD Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unggas: yang berlokasi di Ds. Mekarsari Kec. Baleendah; Ds. Pangalengan Kec. Pangalengan; Ds. Majasetra Kec. Majalaya; dan Ds. Panyocokan Kec. Ciwidey.
4. UPTD Pasar Hewan; yang berlokasi di Ds. Majasetra Kec. Majalaya dan Ds. Maruyung Kec. Pacet.
5. UPTD Alat Mesin Pertanian dengan kedudukan kantor di Kantor Dinas Pertanian dengan pelayanan di 31 kecamatan.
6. UPTD Pengembangan Teknologi Pertanian, yang berlokasi di Ds. Jelekong Kec. Baleendah dan Ds. Cibeureum Kec. Kertasari.

Selain UPTD di atas, terdapat 14 (empat belas) kantor Balai Penyuluh Pertanian (BPP) kecamatan yang merupakan pusat pelayanan penyuluhan bagi 31 kecamatan.

### 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Pertanian

#### 2.1.3.1 Data-Data dan Informasi terkait Pelaksanaan Urusan yang menjadi Tanggung Jawab Dinas Pertanian

##### 2.1.3.1.1 Potensi Lahan Pertanian

Kabupaten Bandung memiliki topografi yang bervariasi, mulai dari dataran rendah hingga kawasan pegunungan. Keberagaman ini memengaruhi pola penggunaan lahan, termasuk dalam sektor pertanian. Berdasarkan data tahun 2024, total luas lahan pertanian di Kabupaten Bandung mencapai 143.988 Ha, yang terdiri atas 28.799,8 Ha lahan sawah dan 115.188 Ha lahan pertanian bukan sawah. Kecamatan dengan luas lahan pertanian terbesar adalah Pasirjambu dengan 23.325 hektar, diikuti oleh Pangalengan dan Rancabali. Sebaliknya, Kecamatan Margahayu tercatat memiliki luas lahan pertanian terkecil, yakni hanya 91 Ha.

Sebagian besar kecamatan memiliki dominasi lahan pertanian bukan sawah dibandingkan lahan sawah, mencerminkan pola pertanian yang lebih beragam. Lahan pertanian bukan sawah meliputi area yang digunakan untuk kegiatan pertanian selain budidaya padi atau tanaman lain yang memerlukan genangan air, seperti tegalan, perkebunan, hutan rakyat, ladang, dan padang rumput.

Tabel 2.5. Potensi Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung

| No | KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN PERTANIAN BUKAN SAWAH | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Pasirjambu | 683,03 | 22.642 | 23.325 |
| 2 | Pangalengan | 280,18 | 18.216 | 18.496 |
| 3 | Rancabali | 507,87 | 14.000 | 14.508 |
| 4 | Kertasari | 74,31 | 14.232 | 14.306 |
| 5 | Pacet | 1477,54 | 6.324 | 7.802 |
| 6 | Arjasari | 1178,05 | 3.594 | 4.772 |
| 7 | Cimaung | 1323,85 | 3.268 | 4.592 |
| 8 | Nagreg | 284,57 | 4.232 | 4.517 |
| 9 | Ibun | 1087,84 | 3.157 | 4.245 |
| 10 | Paseh | 1365,18 | 2.634 | 3.999 |
| 11 | Ciparay | 2633,57 | 1.332 | 3.966 |
| 12 | Kutawaringin | 1107,14 | 2.734 | 3.841 |

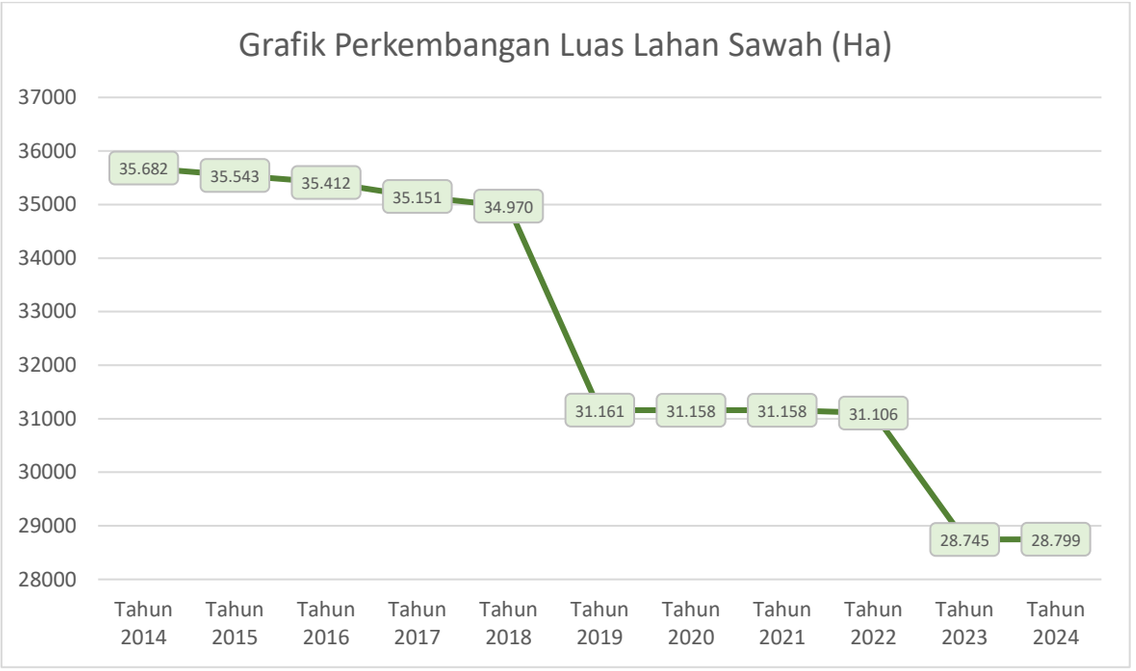
| No | KECAMATAN | LAHAN SAWAH | LAHAN PERTANIAN BUKAN SAWAH | JUMLAH |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 13 | Cikancung | 833,71 | 2.819 | 3.653 |
| 14 | Rancaekek | 3045,88 | 273 | 3.319 |
| 15 | Cimenyan | 110,32 | 3.035 | 3.145 |
| 16 | Ciwidey | 1326,58 | 1.658 | 2.985 |
| 17 | Banjaran | 1198 | 1.534 | 2.732 |
| 18 | Cicalengka | 798,75 | 1.548 | 2.347 |
| 19 | Cileunyi | 753,4 | 1.503 | 2.256 |
| 20 | Cilengkrang | 185,99 | 2.038 | 2.224 |
| 21 | Baleendah | 1075,33 | 1.004 | 2.079 |
| 22 | Bojongsoang | 1426,58 | 464 | 1.891 |
| 23 | Solokanjeruk | 1643,39 | 87 | 1.730 |
| 24 | Soreang | 576,55 | 1.027 | 1.604 |
| 25 | Cangkuang | 756,02 | 777 | 1.533 |
| 26 | Majalaya | 1148,09 | 342 | 1.490 |
| 27 | Margaasih | 427,74 | 523 | 951 |
| 28 | Pameungpeuk | 668,45 | 59 | 727 |
| 29 | Katapang | 622,69 | 19 | 642 |
| 30 | Dayeuhkolot | 144,73 | 77 | 222 |
| 31 | Margahayu | 54,43 | 37 | 91 |
| | JUMLAH | 28799,8 | 115.188 | 143.988 |

Sumber Data : Dinas Pertanian, 2024

Potensi sektor pertanian di Kabupaten Bandung sangat dipengaruhi oleh karakteristik geografis dan kondisi topografinya. Wilayah selatan yang didominasi oleh kawasan pegunungan memiliki potensi pertanian yang tinggi, khususnya pada subsektor hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Di wilayah tengah dengan topografi cenderung datar, didominasi oleh sub sektor tanaman pangan, khususnya sawah irigasi. Seiring dengan semakin terbatasnya ketersediaan lahan dan pertumbuhan penduduk, wilayah tengah dan utara cenderung lebih urban dan padat penduduk, dapat menjadikan tekanan terhadap perubahan pemanfaatan lahan pertanian. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan sektor pertanian adalah penyusutan lahan pertanian, khususnya lahan sawah. Selama kurun waktu sepuluh tahun terakhir, luas lahan sawah mengalami penurunan signifikan sebesar 6.882,25 Ha, dari 35.682 Ha pada tahun 2014 menjadi hanya 28.799,75 Ha pada tahun 2024. Penurunan ini mencerminkan tekanan perubahan

pemanfaatan lahan yang tinggi dan menjadi perhatian penting dalam upaya perlindungan serta optimalisasi lahan pertanian di masa mendatang. Informasi lebih lanjut mengenai perkembangan luas lahan sawah:

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Luas Lahan Sawah (Ha)




Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Lahan sawah memiliki fungsi strategis dalam ketahanan pangan karena merupakan sumber utama produksi beras sebagai pangan pokok masyarakat. Selain menjamin ketersediaan pangan, sawah juga menopang akses pangan melalui penyediaan lapangan kerja dan penghasilan bagi petani, serta berperan dalam menjaga stabilitas sistem pangan lokal. Fungsi ekologisnya sawah berperan sebagai penyerap air, pengatur iklim mikro, dan penyangga lingkungan, meningkatkan perlindungan sawah merupakan salah satu upaya untuk mendukung keberlanjutan produksi pangan. Oleh karena itu, perlindungan lahan sawah tidak hanya penting secara ekonomis, tetapi juga sebagai instrumen kedaulatan dan kemandirian pangan.

Pada tahun 2024, total potensi lahan sawah di Kabupaten Bandung mencapai 28.799,7 hektar, yang terdiri atas 20.671 hektar sawah irigasi dan 8.128,19 hektar sawah tadah hujan. Sebaran lahan sawah ini mencerminkan kondisi geografis dan sistem pengairan yang bervariasi di tiap kecamatan. Kecamatan dengan luas lahan sawah terbesar adalah Rancaekek dengan total 3.045,88 hektar, terdiri atas 1.582,18 hektar sawah irigasi dan 1.463,69 hektar sawah tadah hujan. Disusul oleh Ciparay (2633,57 ha), Solokan Jeruk (1643,3 ha), dan Pacet (1.477 ha), yang masing-masing juga memiliki proporsi cukup besar terhadap total luas lahan sawah di kabupaten ini.

Tabel 2.6. Potensi Luas Sawah Produktif di Kabupaten Bandung (Ha)

| No | Kecamatan | Jenis Sawah | | Luas Total (Ha) |
|---|---|---|---|---|
| | | Sawah Irigasi (Ha) | Sawah Tadah Hujan (Ha) | |
| 1 | Rancaekek | 1582,18 | 1463,69 | 3045,88 |
| 2 | Ciparay | 2550,09 | 83,48 | 2633,57 |
| 3 | Solokanjeruk | 838,94 | 804,45 | 1643,39 |
| 4 | Pacet | 1166,71 | 310,84 | 1477,54 |
| 5 | Bojongsoang | 538,23 | 888,35 | 1426,58 |
| 6 | Paseh | 1112,47 | 252,71 | 1365,18 |
| 7 | Ciwidey | 907,66 | 418,92 | 1326,58 |
| 8 | Cimaung | 998,20 | 325,64 | 1323,85 |
| 9 | Banjaran | 979,99 | 218,01 | 1198,00 |
| 10 | Arjasari | 780,14 | 397,91 | 1178,05 |
| 11 | Majalaya | 1129,14 | 18,95 | 1148,09 |
| 12 | Kutawaringin | 978,93 | 128,20 | 1107,14 |
| 13 | Ibun | 747,09 | 340,75 | 1087,84 |
| 14 | Baleendah | 956,89 | 118,43 | 1075,33 |
| 15 | Cikancung | 343,07 | 490,65 | 833,71 |
| 16 | Cicalengka | 381,12 | 417,63 | 798,75 |
| 17 | Cangkuang | 651,19 | 104,83 | 756,02 |
| 18 | Cileunyi | 392,87 | 360,53 | 753,40 |
| 19 | Pasirjambu | 259,44 | 423,59 | 683,03 |
| 20 | Pameungpeuk | 663,36 | 5,09 | 668,45 |
| 21 | Katapang | 609,79 | 12,90 | 622,69 |
| 22 | Soreang | 523,26 | 53,29 | 576,55 |
| 23 | Rancabali | 478,16 | 29,71 | 507,87 |
| 24 | Margaasih | 419,02 | 8,72 | 427,74 |
| 25 | Nagreg | 172,14 | 112,43 | 284,57 |
| 26 | Pangalengan | 255,09 | 25,09 | 280,18 |
| 27 | Cilengkrang | 67,07 | 118,92 | 185,99 |
| 28 | Dayeuhkolot | 115,84 | 28,89 | 144,73 |
| 29 | Cimenyan | 0,00 | 110,32 | 110,32 |
| 30 | Kertasari | 73,48 | 0,84 | 74,31 |
| 31 | Margahayu | 0,00 | 54,43 | 54,43 |
| | Total | 20671,56 | 8128,19 | 28799,75 |

Sumber Data: Dinas Pertanian, 2024

Sebagian besar lahan sawah irigasi terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan dengan sistem irigasi teknis yang baik, seperti Ciparay, Rancaekek dan majalaya. Sedangkan kecamatan Rancaekek, Bojongsoang dan Solokan Jeruk memiliki jumlah sawah tadah hujan yang signifikan, yang menandakan

ketergantungan pada curah hujan musiman dan rentan terhadap variabilitas iklim.

Lahan sawah tadah hujan juga tersebar cukup luas, mencapai lebih dari 8.000 hektar secara total. Hal ini menandakan adanya potensi pengembangan sistem irigasi untuk meningkatkan produktivitas pertanian di wilayah-wilayah tersebut. Secara keseluruhan, potensi lahan sawah di Kabupaten Bandung menunjukkan kapasitas besar dalam mendukung ketahanan pangan, namun tetap membutuhkan pengelolaan yang berkelanjutan dan pemerataan infrastruktur pengairan, khususnya di wilayah dengan dominasi sawah tadah hujan.

2.1.3.1.2 Potensi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan

a) Sub Sektor Tanaman Pangan

Subsektor tanaman pangan masih menjadi tulang punggung utama pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung, baik dari sisi luas tanam, keterlibatan tenaga kerja, maupun kontribusinya terhadap ketahanan pangan regional. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), total produksi tanaman pangan di Kabupaten Bandung menunjukkan dinamika yang fluktuatif. Pada tahun 2020, total produksi mencapai 866.829 ton, meningkat hingga 921.979ton pada 2022, sebelum mengalami penurunan menjadi 750.818 ton pada tahun 2024. Hal ini mencerminkan adanya tekanan pada stabilitas produksi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik teknis, iklim, maupun sosial ekonomi.

Padi tetap menjadi komoditas dominan dalam struktur produksi tanaman pangan, dengan kontribusi rata-rata lebih dari 75% terhadap total volume produksi tahunan. Namun, tren penurunan produksi padi yang terjadi secara konsisten dalam lima tahun terakhir turut mendorong penurunan agregat produksi subsektor ini secara keseluruhan. Sebaliknya, beberapa komoditas alternatif seperti ubi jalar, ubi kayu, dan jagung menunjukkan tren yang lebih positif dan cenderung mengalami peningkatan, khususnya pada tahun 2022 dan 2024, yang menandakan adanya potensi diversifikasi pangan lokal yang dapat diperkuat.

Selain komoditas utama tersebut, produksi komoditas kacang tanah dan kedelai masih tergolong rendah dan berkontribusi kecil terhadap total produksi. Bahkan pada tahun 2024, produksi kedelai tercatat nol ton, menandakan tantangan serius dalam pelestarian dan pengembangan pangan

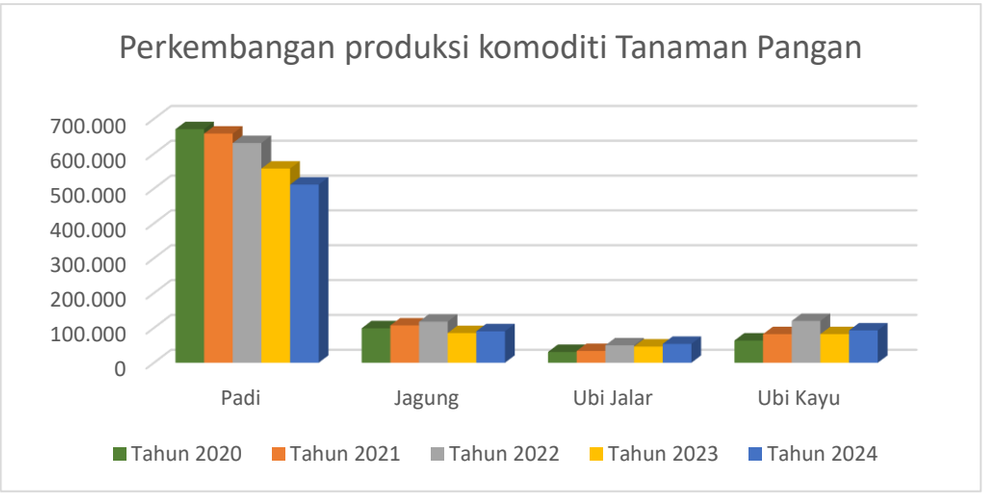
sumber protein nabati lokal. Kondisi ini sekaligus menjadi indikator bagi perlunya intervensi kebijakan yang tidak hanya berfokus pada komoditas dominan, tetapi juga mendorong penguatan diversifikasi dan ketahanan pangan berbasis komoditi unggulan.

Tabel 2.7. Produksi Tanaman Pangan pada periode Tahun 2020-2024

| No | Komoditas | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padi | 670.441 | 657.813 | 630.713 | 557.334 | 511.292 |
| 2 | Jagung | 98.967 | 107.154 | 118.011 | 85.336 | 90.390 |
| 3 | Kacang Tanah | 1.564 | 2.001 | 2.439 | 2.248 | 2.090 |
| 4 | Kedelai | 959 | 426 | 596 | 52 | 0 |
| 5 | Ubi Jalar | 31.067 | 33.876 | 50.179 | 46.614 | 54.189 |
| 6 | Ubi Kayu | 63.831 | 82.244 | 120.041 | 82.159 | 92.858 |
| | Jumlah | 866.829 | 883.514 | 921.979 | 773.743 | 750.818 |

Sumber Data : Dinas Pertanian, 2021-2024

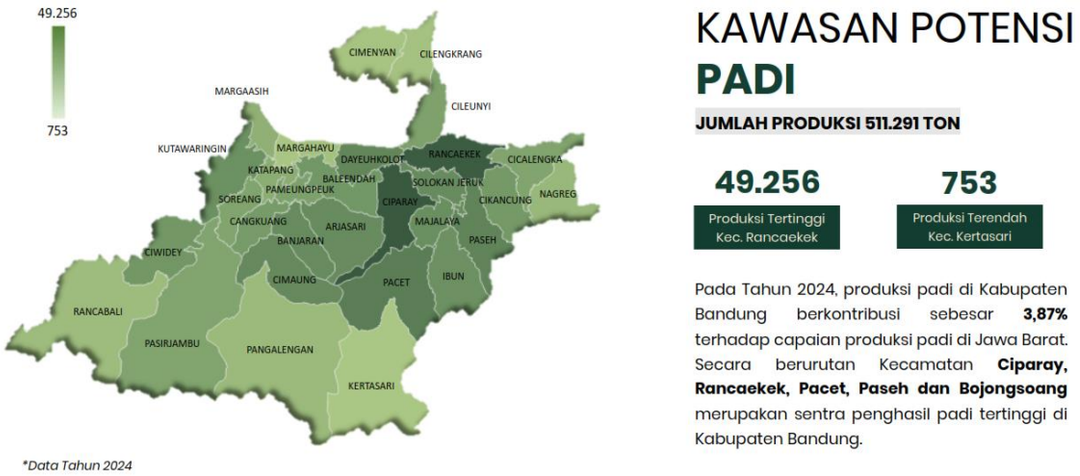
Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Pangan




Sumber : Dinas Pertanian, 2020-2024

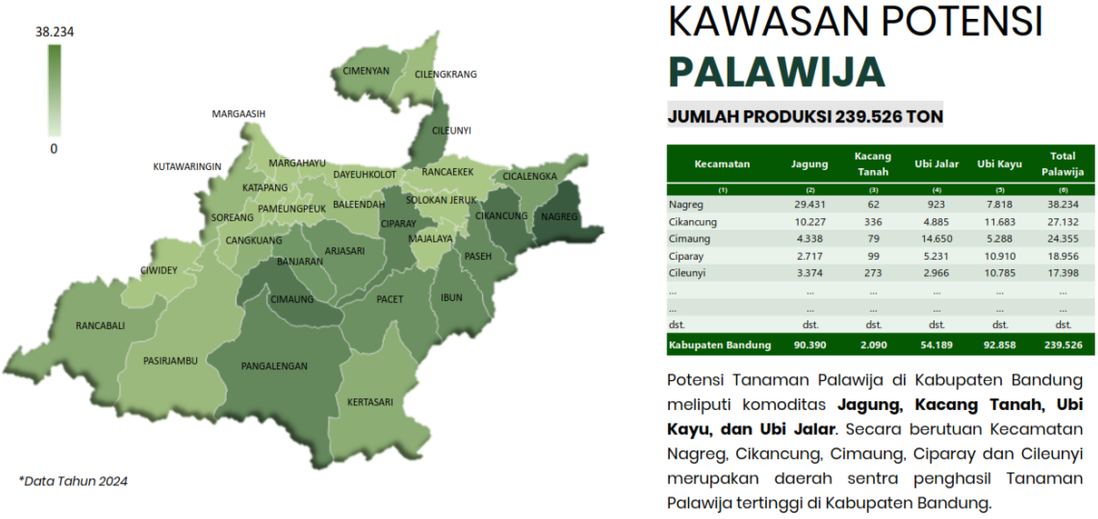
Adapun sebaran potensi Padi menyebar di seluruh kecamatan, namun potinsi sangat besar pada wilayah Tengah dan Timur kabupaten, sedangkan potensi Palawija menyebar mulai wilayah Timur dan Selatan kabupaten. Pada Tahun 2024 potensi pada palawija dapat dilihat pada gambar dalam infografis sebagai berikut:

Gambar 2.6 Peta Kawasan Potensi Padi




Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Gambar 2.7 Peta Kawasan Palawija




Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Produksi padi di Kabupaten Bandung dalam lima tahun terakhir menunjukkan tren penurunan yang cukup signifikan. Pada tahun 2020, produksi padi tercatat sebesar 670.440 ton, namun angka tersebut terus menurun dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2024 hanya mencapai sekitar 511.292 ton. Secara kumulatif, terjadi penurunan produksi sebesar lebih dari 159 ribu ton dalam kurun waktu lima tahun, atau setara dengan penurunan sekitar 23,7%.

Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan struktural dan teknis dalam subsektor tanaman pangan, khususnya pada komoditas padi yang merupakan komoditas strategis dalam mendukung ketahanan pangan

daerah maupun nasional. Beberapa faktor yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi penurunan produksi ini antara lain adalah penyusutan lahan sawah akibat alih fungsi, akses sarana produksi, serta kondisi iklim dan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) yang terjadi secara lebih intens beberapa tahun terakhir.

Selain itu, keterbatasan infrastruktur irigasi, khususnya di wilayah dengan dominasi sawah tadah hujan, turut mempengaruhi konsistensi produksi antar musim. Ketergantungan pada pola tanam konvensional tanpa dukungan mekanisasi atau pertanian presisi juga menjadi faktor pembatas dalam upaya peningkatan hasil panen. Di beberapa kecamatan yang mengalami tekanan pembangunan dan konversi lahan seperti Rancaekek, Baleendah, dan Majalaya, penurunan produksi juga tercermin dari menurunnya luas panen dan frekuensi tanam dalam satu tahun.

Perkembangan ini perlu menjadi perhatian serius dalam penyusunan arah kebijakan pembangunan pertanian ke depan. Penguatan perlindungan lahan sawah melalui program Lahan Sawah Dilindungi (LSD), perbaikan sistem irigasi tersier, serta peningkatan kapasitas petani melalui adopsi teknologi pertanian modern merupakan strategi kunci untuk membalikkan tren penurunan ini. Selain itu, penguatan kelembagaan petani dan sinergi lintas sektor juga diperlukan untuk memastikan bahwa komoditas padi tetap menjadi tulang punggung ketahanan pangan di Kabupaten Bandung.

Produksi padi di Kabupaten Bandung menunjukkan angka yang cukup signifikan dalam konteks regional dan nasional. Pada tahun 2023, produksi padi Kabupaten Bandung mencapai sekitar 303.919 ton gabah kering giling (GKG), meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 289.205 ton. Dengan capaian tersebut, Kabupaten Bandung berkontribusi sekitar 3,3% terhadap total produksi padi Provinsi Jawa Barat, yang secara keseluruhan memproduksi 9,14 juta ton GKG pada tahun yang sama. Jika dibandingkan dengan produksi padi nasional sebesar 53,98 juta ton GKG, kontribusi Kabupaten Bandung berada pada kisaran 0,56%, mencerminkan peran pentingnya dalam skala regional meskipun relatif kecil secara nasional.

Selain dari sisi kuantitas, keunggulan utama padi Kabupaten Bandung terletak pada kualitasnya. Sebagian besar padi yang dibudidayakan tergolong padi jenis premium, dengan varietas unggul yang memiliki tekstur pulen dan aroma khas, serta tingkat kepecahan yang rendah. Produk beras dari Kabupaten Bandung menjadi komoditas penting dalam memenuhi kebutuhan pasar regional di Jawa Barat dan memasok permintaan beras

premium ke Jakarta dan sekitarnya, sehingga memiliki nilai tambah yang signifikan bagi petani. Orientasi pada mutu ini juga sejalan dengan preferensi konsumen perkotaan kelas menengah ke atas yang semakin selektif terhadap kualitas dan keamanan pangan.

Potensi unggulan lainnya datang dari sektor pertanian berkelanjutan dan organik, yang ditunjukkan oleh keberadaan Kelompok Tani Sarinah Organik di Desa Bumiwangi, Kecamatan Ciparay. Kelompok ini telah menjadi pionir dalam pengembangan padi organik di Kabupaten Bandung sejak 2007 dan berhasil memperoleh sertifikasi nasional untuk sebagian besar lahan yang mereka kelola. Mereka tidak hanya unggul dari sisi teknis budidaya dengan menerapkan prinsip *System of Rice Intensification* (SRI), tetapi juga menunjukkan keberdayaan kelembagaan dan ekonomi melalui kemitraan dengan pasar terstruktur dan ritel modern jaringan distribusi pangan skala nasional, yang mensyaratkan standar kualitas tinggi dan kontinuitas pasokan secara konsisten. Dengan permintaan pasar yang mencapai lebih dari 15 ton per bulan, kelompok ini tidak hanya berhasil menjaga kuantitas, kualitas, dan kontinuitas, tetapi juga menggerakkan petani lain untuk beralih ke sistem pertanian ramah lingkungan.

Keberadaan Kelompok Tani Sarinah mencerminkan kemampuan Kabupaten Bandung dalam membangun model pertanian inklusif dan berdaya saing tinggi, yang memadukan pendekatan teknis, sosial, dan kelembagaan. Keberhasilan mereka juga menjadi refleksi bahwa strategi pembangunan pertanian ke depan perlu diarahkan pada penguatan kelembagaan tani, adopsi pertanian organik dan premium, serta perluasan pasar modern dan terstruktur. Dengan pendekatan semacam ini, Kabupaten Bandung tidak hanya mempertahankan posisinya sebagai lumbung pangan regional, tetapi juga mampu bertransformasi menuju pertanian modern yang tangguh dan berkelanjutan.

Pada Komoditas jagung menunjukkan dinamika produksi yang lebih fluktuatif. Diawal periode (2020), produksi jagung berada di angka 98.967 ton, meningkat cukup tajam hingga mencapai 118.011 ton pada 2022, namun kemudian menurun menjadi 85.336 ton di 2023, sebelum sedikit meningkat lagi menjadi 90.390 ton d**i** 2024. Meski ada fluktuasi, tren umum menunjukkan bahwa jagung berpotensi mengalami peningkatan jika didukung oleh pola tanam terpadu dan pasar pakan ternak yang kuat. Jagung memiliki peran penting sebagai bahan baku pakan dan pangan, sehingga tren ini perlu dijaga stabil melalui pengembangan kawasan sentra

jagung (seperti “cornbelt” di Nagreg dan sekitarnya). Nagreg, sebuah kecamatan di Kabupaten Bandung, telah berkembang menjadi salah satu sentra produksi jagung utama di Jawa Barat, yang dikenal sebagai bagian dari "*Corn Belt Jabar*". Wilayah ini memiliki potensi besar dalam mendukung ketahanan pangan nasional melalui produksi jagung yang signifikan.

Wilayah kecaraman Nagreg, Cicalengka, Cikancung dan Paseh memiliki luas lahan pertanian jagung yang cukup besar, dengan produksi rata-rata mencapai 6 hingga 7 ton per hektar. Hal ini menjadikan Nagreg sebagai salah satu daerah dengan kontribusi signifikan terhadap produksi jagung di Jawa Barat. Menurut data dari BPS tahun 2022, produksi jagung nasional masih belum mencukupi kebutuhan dalam negeri, sehingga pengembangan daerah seperti wilayah Nagreg dan sekitarnya sangat penting untuk mengurangi ketergantungan pada impor.

Pengembangan budidaya jagung di wilayah *corn belt* didukung oleh kemitraan antara petani, koperasi, dan lembaga keuangan. Koperasi Sinar Jagung Priangan, misalnya, berperan sebagai offtaker yang bekerja sama dengan perbankan untuk menyediakan pembiayaan kepada petani sekaligus memfasilitasi sistem kemitraan petani jagung. Melalui pendekatan ini, perputaran nilai ekonomi dari budidaya jagung di Nagreg mencapai sekitar Rp 17 miliar per musim tanam.

Pengembangan kawasan jagung di Nagreg sejalan dengan program strategis nasional, seperti Program Makmur yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas pertanian melalui pendekatan korporatisasi dan kemitraan. Selain itu, pengembangan ini juga mendukung upaya pemerintah dalam mencapai swasembada jagung dan mengurangi ketergantungan pada impor. Dengan potensi yang dimiliki, Nagreg dapat menjadi model pengembangan kawasan pertanian yang berkelanjutan dan berdaya saing tinggi.

Selain padi dan jagung, potensi komoditas umbi seperti ubi kayu dan ubi jalar cukup tinggi karena kondisi agroklimat yang mendukung di dataran tinggi. Ubi jalar mengalami pertumbuhan produksi yang positif. Dari angka 31.067 ton pada 2020, produksi meningkat hampir dua kali lipat menjadi 54.189 ton pada 2024. Lonjakan paling signifikan terjadi antara tahun 2021 ke 2022, yaitu naik dari 33.876 ton ke 50.179 ton. Ini menunjukkan peningkatan minat budidaya dan/atau perluasan areal tanam yang berhasil dilakukan. Peningkatan ini patut diapresiasi mengingat ubi jalar merupakan

komoditas pangan alternatif strategis, yang juga memiliki potensi ekspor dan pemanfaatan industri olahan (termasuk UMKM pangan lokal).

Kabupaten Bandung telah menunjukkan potensi besar dalam ekspor ubi jalar, khususnya dari Kecamatan Arjasari. Pada September 2020, Gubernur Jawa Barat secara simbolis melepas ekspor perdana sebanyak 30 ton ubi jalar varietas rancing ke Hong Kong. Ekspor ini direncanakan berlangsung setiap bulan selama satu tahun, dengan total mencapai 360 ton. Ubi jalar tersebut digunakan sebagai bahan baku untuk produk olahan seperti tepung, kue, dan es krim di Hong Kong. Ekspor ini merupakan bagian dari Gerakan Ekspor Tiga Kali (GRATIEKS) yang dicanangkan oleh Kementerian Pertanian, dengan tujuan meningkatkan volume ekspor produk pertanian Indonesia. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa ubi jalar dari Kabupaten Bandung memiliki kualitas yang memenuhi standar pasar internasional. Dengan keberhasilan ekspor ini, diharapkan dapat mendorong peningkatan produksi dan kualitas ubi jalar di Kabupaten Bandung serta membuka peluang pasar ekspor ke negara-negara lain yang memiliki permintaan tinggi terhadap produk ini.

b) Sub Sektor Hortikultura

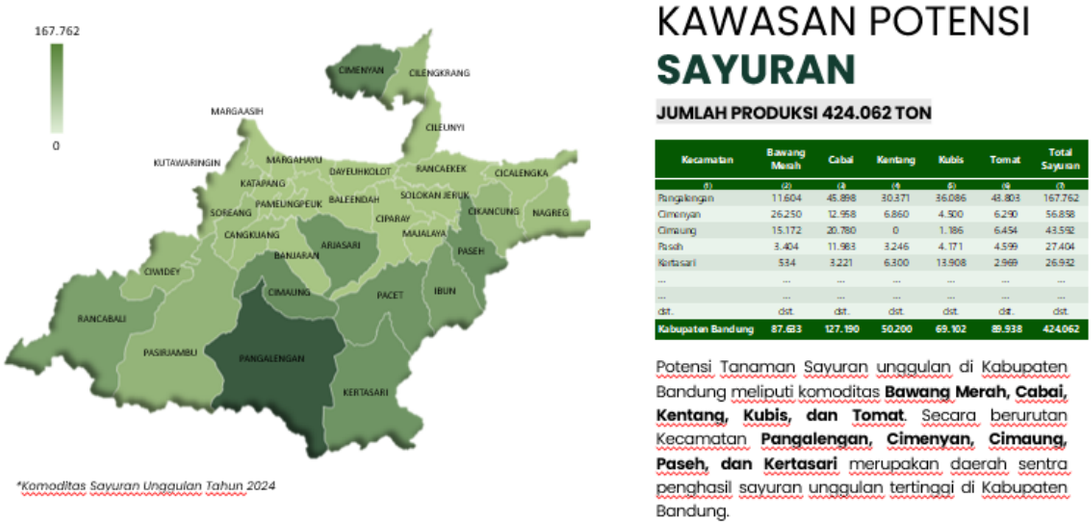
Kabupaten Bandung merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki potensi unggul dalam produksi sayuran. Dengan total produksi mencapai 424.062 ton pada tahun 2024, subsektor hortikultura, khususnya sayuran, memberikan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan, ekonomi lokal, dan pasokan pasar regional. Keunggulan ini tidak terlepas dari faktor agroekologi wilayah Kabupaten Bandung yang memiliki keragaman dataran rendah hingga tinggi, iklim yang sejuk di wilayah selatan, serta ketersediaan air yang cukup stabil di beberapa sentra produksi.

Komoditas sayuran unggulan yang dikembangkan antara lain bawang merah, cabai, kentang, kubis, dan tomat, dengan persebaran produksi yang cukup terfokus di wilayah-wilayah tertentu. Kecamatan Pangalengan tercatat sebagai penyumbang produksi terbesar dengan total 167.762 ton, didominasi oleh cabai dan kentang. Disusul oleh Cimenyan (86.282 ton) dan Cimaung (64.536 ton) yang juga unggul dalam produksi tomat dan cabai. Kecamatan lain seperti Paseh dan Kertasari turut menyumbang produksi penting meskipun dengan volume lebih terbatas, terutama pada komoditas cabai dan kubis.

Sentra produksi sayuran di Kabupaten Bandung tidak hanya melayani kebutuhan lokal, namun juga menjadi bagian dari rantai pasok pasar regional hingga nasional, termasuk untuk wilayah Jabodetabek. Hal ini terlihat dari dominasi komoditas bernilai ekonomi tinggi seperti cabai merah dan tomat, yang memiliki fluktuasi harga musiman namun tetap memiliki permintaan tinggi. Beberapa kecamatan bahkan telah mengembangkan pola tanam berbasis kawasan dan skema integrasi dengan pelaku agribisnis maupun koperasi tani.

Ke depan, potensi hortikultura sayuran di Kabupaten Bandung perlu terus dikembangkan melalui pendekatan kawasan hortikultura berbasis komoditas unggulan lokal. Peningkatan kualitas benih, perluasan adopsi sistem budidaya ramah lingkungan, serta penguatan sistem pascapanen dan logistik hortikultura menjadi strategi penting dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing subsektor ini. Dengan ekosistem produksi yang telah terbentuk kuat, Kabupaten Bandung berpeluang menjadi lumbung sayuran strategis di Jawa Barat yang mendukung ketahanan pangan nasional.

Gambar 2.8 Kawasan Potensi Sayuran




Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra produksi hortikultura unggulan di Provinsi Jawa Barat, dengan kondisi agroklimat yang mendukung pertanian dataran tinggi dan menengah. Selama periode 2020 hingga 2024, subsektor hortikultura menunjukkan kontribusi signifikan terhadap ketahanan pangan dan ekonomi lokal, dengan total produksi mencapai lebih dari 3 juta ton. Komoditas utama yang mendominasi produksi antara lain tomat (398 ribu ton), bawang merah (351 ribu ton), kubis (329 ribu ton), kentang (314 ribu ton), serta petsai/sawi (292 ribu ton).

Tingginya produktivitas pada komoditas-komoditas tersebut mencerminkan adanya kekuatan dalam aspek budidaya, struktur kelembagaan petani, dan kecocokan lahan.

Tabel 2.8. Perkembangan Produksi Komoditi Hortikultura (Sayuran)

| No | Komoditas | Satuan | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomat | Ton | 73.886,40 | 100.911,10 | 66.159,30 | 67.219,80 | 89.937,70 | 398.114,30 |
| 2 | Bawang Merah | Ton | 62.100,10 | 58.900,30 | 77.278,90 | 65.514,70 | 87.632,60 | 351.426,60 |
| 3 | Kubis | Ton | 97.813,00 | 66.302,90 | 50.017,60 | 46.596,10 | 69.102,00 | 329.831,60 |
| 4 | Kentang | Ton | 81.654,30 | 70.678,20 | 72.365,60 | 39.574,00 | 50.199,50 | 314.471,60 |
| 5 | Petsai/Sawi | Ton | 78.906,60 | 76.164,40 | 53.509,10 | 42.340,30 | 41.651,70 | 292.572,10 |
| 6 | Bawang Daun | Ton | 39.223,60 | 50.629,60 | 51.208,20 | 57.195,70 | 52.610,60 | 250.867,70 |
| 7 | Cabai Keriting | Ton | | 69.820,00 | 63.833,30 | 59.370,50 | 54.460,90 | 247.484,70 |
| 8 | Wortel | Ton | 48.564,60 | 51.833,50 | 61.734,40 | 32.971,10 | 26.022,70 | 221.126,30 |
| 9 | Cabai Besar/ TW / Teropong | Ton | 43.426,10 | 50.809,20 | 36.261,60 | 30.681,90 | 34.867,20 | 196.046,00 |
| 10 | Cabai Rawit | Ton | 21.044,60 | 23.679,90 | 30.760,10 | 27.637,80 | 37.861,80 | 140.984,20 |
| 11 | Mentimun | Ton | 19.473,90 | 28.851,10 | 20.970,80 | 20.273,20 | 27.824,60 | 117.393,60 |
| 12 | Buncis | Ton | 14.476,90 | 15.224,40 | 14.163,90 | 12.921,00 | 15.862,90 | 72.649,10 |
| 13 | Terung | Ton | 9.007,40 | 13.842,50 | 13.351,40 | 11.450,50 | 22.271,40 | 69.923,20 |
| 14 | Kembang Kol | Ton | 7.201,30 | 8.570,80 | 11.549,00 | 11.384,20 | 11.554,20 | 50.259,50 |
| 15 | Kangkung | Ton | 4.677,80 | 8.151,80 | 5.763,60 | 7.897,50 | 6.982,10 | 33.472,80 |
| 16 | Kacang Panjang | Ton | 4.148,70 | 7.318,00 | 6.094,70 | 4.775,50 | 9.222,30 | 31.559,20 |
| 17 | Bayam | Ton | 1.343,40 | 2.902,06 | 2.332,90 | 3.085,40 | 3.243,30 | 12.907,06 |
| 18 | Paprika | Ton | 83,70 | 1.825,30 | 1.383,50 | 875,70 | 492,20 | 4.660,40 |
| 19 | Bawang Putih | Ton | 2.909,10 | 316,30 | 416,50 | 150,60 | 204,90 | 3.997,40 |

Sumber Data: Dinas Pertanian, 2020-2024

Selain komoditas utama, beberapa jenis tanaman hortikultura lainnya juga menunjukkan perkembangan yang cukup menjanjikan, seperti cabai rawit, cabai besar, dan wortel, meskipun tingkat fluktuasi produksinya tergolong tinggi dari tahun ke tahun. Komoditas minor seperti paprika, bayam, kacang panjang, dan bawang putih masih berada pada skala produksi kecil, namun tetap memiliki peluang untuk dikembangkan melalui pendekatan diversifikasi usaha tani. Variabilitas cuaca, gangguan pasokan input produksi, serta keterbatasan infrastruktur pascapanen diduga menjadi penyebab utama fluktuasi volume produksi di beberapa komoditas, terutama yang mengalami penurunan tajam pada tahun 2023.

Beberapa komoditi sayuran seperti bawang merah merupakan komoditi unggulan tidak hanya dapat memasok kebutuhan local, namun ikut berperan penting dalam upaya pemerintah pusat dalam pengendalian inflasi dan gejolak harga pasar di tingkat regional maupun nasional. Kabupaten Bandung, khususnya Kecamatan Cimenyan, dikenal sebagai sentra produksi bawang merah yang penting secara nasional. Salah satu kelompok tani, yaitu kelompok Tricipta Mandiri ditetapkan sebagai Champion Komoditas Bawang

Merah oleh Kementerian Pertanian karena konsistensinya dalam menjaga pasokan ke pasar induk, terutama Jakarta. Kelompok ini memproduksi jenis bawang merah Batuijo dan aktif dalam sistem distribusi musiman, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Ramadan dan Idul Fitri. Kelompok Champion juga berperan aktif di tingkat regional melalui MoU yang telah dilakukan dengan beberapa daerah kabupaten kota di wilayah sekitar. Peranan ini sangat penting dalam upaya pengendalian inflasi pangan, sejalan dengan arahan Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Strategi Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang didukung Bank Indonesia. Bawang merah merupakan salah satu dari 12 komoditas yang berkontribusi besar terhadap fluktuasi inflasi di Indonesia.

Prestasi subsektor hortikultura lainnya adalah Pondok Pesantren Al-Ittifaq di Kecamatan Rancabali menjadi role model nasional untuk integrasi pendidikan dan agribisnis hortikultura modern. Ponpes ini menjalankan model bisnis pertanian berbasis teknologi yang menggabungkan sistem pertanian berbasis kawasan, pertanian presisi *(smart farming),* dan rantai pasok berbasis pasar. Model tersebut telah diapresiasi oleh Presiden Republik Indonesia dan dijadikan lokasi kunjungan kerja strategis. Al-Ittifaq merupakan pelopor pesantren agribisnis dengan sistem informasi berbasis digital dan pemasaran langsung ke ritel modern seperti Superindo dan *Ranch Market.* Pesantren ini juga aktif dalam mendukung program *One Pesantren One Product (OPOP)* dan korporatisasi petani hortikultura. Prestasi lainnya yaitu Lembaga Percontohan Korporasi Petani Hortikultura, dan Mitra strategis dalam pengembangan kelembagaan ekonomi pesantren (OJK dan Kemenkop UKM).

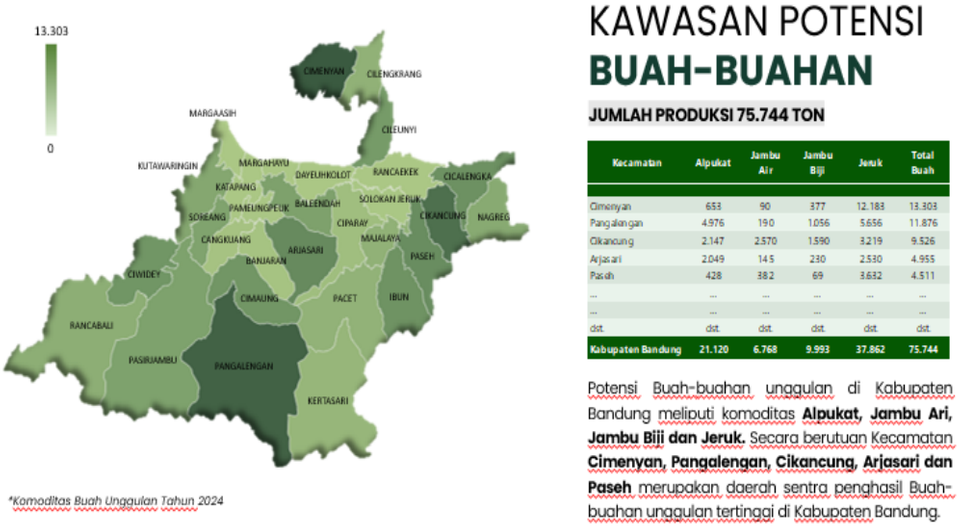
Namun, tantangan utama sektor hortikultura adalah perubahan iklim dan serangan hama penyakit tanaman, yang sering kali mempengaruhi hasil panen secara drastis. Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian telah menggencarkan pelatihan pengendalian hama terpadu (PHT), serta penggunaan teknologi rumah tanaman *(greenhouse)* di beberapa kelompok tani hortikultura.

Selain tanaman pangan dan sayuran, subsektor hortikultura Kabupaten Bandung juga memiliki potensi kuat dalam produksi buah-buahan. Berdasarkan data tahun 2024, total produksi buah-buahan unggulan di Kabupaten Bandung mencapai 75.744 ton, yang berasal dari komoditas utama seperti alpukat, jambu air, jambu biji, dan jeruk. Komoditas

buah ini tidak hanya berfungsi sebagai sumber pendapatan petani, tetapi juga sebagai penguat ketahanan pangan berbasis gizi dan diversifikasi usaha tani.

Secara spasial, produksi buah-buahan terdistribusi di beberapa kecamatan dengan karakter agroklimat yang mendukung. Cimenyan menjadi sentra produksi tertinggi dengan total 13.803 ton, didominasi oleh jeruk dan alpukat. Disusul oleh Pangalengan (13.196 ton) dan Cikancung (9.256 ton) yang juga memiliki kontribusi signifikan dalam komoditas jeruk dan jambu biji. Kecamatan Arjasari dan Paseh turut mencatatkan produksi yang cukup tinggi, menjadikan lima kecamatan ini sebagai kawasan prioritas pengembangan buah-buahan unggulan.

Gambar 2.9 Kawasan Potensi Buahbuahan




Sumber: Dinas Pertanian, 2024

Komoditas jeruk menjadi penyumbang terbesar dengan produksi 37.862 ton atau sekitar 50% dari total produksi buah-buahan. Hal ini menegaskan bahwa jeruk merupakan buah tropis utama yang telah berkembang baik di lahan-lahan dataran tinggi Kabupaten Bandung. Komoditas lainnya seperti alpukat dan jambu air juga menunjukkan potensi pasar yang stabil, terutama untuk konsumsi segar di wilayah perkotaan dan peluang pasar lokal yang terus tumbuh.

Untuk memperkuat subsektor buah-buahan, Pemerintah Kabupaten Bandung perlu mendorong penguatan kelembagaan tani hortikultura, promosi konsumsi buah lokal, serta fasilitasi distribusi dan pascapanen. Peningkatan kualitas varietas, peremajaan tanaman, dan integrasi dengan ekowisata berbasis agroforestri juga menjadi peluang besar di wilayah-wilayah seperti Cimenyan dan Pangalengan. Dengan strategi yang tepat, pengembangan komoditas buah-buahan ini berpotensi meningkatkan

kesejahteraan petani sekaligus memperkuat sistem pangan lokal yang sehat dan beragam.

c) Sub Sektor Perkebunan

Subsektor perkebunan di Kabupaten Bandung memiliki potensi spesifik dan bernilai ekonomi tinggi terutama di komoditas kopi, tembakau dan teh. Produksi perkebunan di Kabupaten Bandung mengalami pertumbuhan yang cukup baik, meskipun produktivitas beberapa komoditas mengalami penurunan. Produksi kopi meningkat sebesar 2,95%, dari 8.415,32 ton menjadi 8.663,98 ton, didorong oleh program intensifikasi lahan dan bantuan benih kopi. Namun, produktivitas kopi mengalami penurunan sebesar 8,81% akibat perubahan dalam manajemen budidaya. Sementara itu, produksi teh tetap stabil pada angka 3.177,30 ton, tanpa adanya perubahan luas areal maupun produktivitas. Produksi tembakau mengalami kenaikan sebesar 1,59%, dari 1.907,48 ton menjadi 1.937,73 ton, dengan kenaikan produktivitas sebesar 1,59%.

Pada sektor perkebunan, peningkatan produktivitas harus difokuskan pada pengelolaan tanaman yang lebih intensif, termasuk pemangkasan dan pemupukan yang tepat untuk tanaman kopi, teh, dan tembakau. Pemerintah juga perlu mendorong inovasi dalam pengolahan pascapanen dan hilirisasi produk agar nilai tambah komoditas meningkat dan lebih kompetitif di pasar. Selain itu, perluasan akses pasar dan distribusi hasil pertanian harus didukung dengan kebijakan yang berpihak pada petani, seperti memperkuat kemitraan dengan industri pengolahan dan jaringan pemasaran yang lebih luas.

Dalam upaya peningkatan nilai tambah, beberapa petani kopi telah mulai mengembangkan sistem pasca-panen seperti proses natural dan *honey*, serta membuka kedai kopi berbasis hasil lokal. Hal ini selaras dengan pertumbuhan industri kreatif di Kabupaten Bandung yang turut mengangkat sektor perkebunan sebagai bagian dari ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan. Perusahaan besar dan koperasi lokal juga turut mendukung pengembangan komoditas teh dengan praktik budidaya berkelanjutan.

Tabel 2.9. Perkembangan produksi perkebunan

| Uraian Komoditi | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|
| Kopi | | | |
| Luas Areal (Ha) | 15.254,85 | 15.307,27 | 0,34% |
| Produksi (Ton) | 8.415,32 | 8.663,98 | 2,95% |

| Uraian Komoditi | Tahun 2023 | Tahun 2024 | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|
| Produktivitas (Kg/Ha) | 892,90 | 814,27 | -8,81% |
| T e h | | | |
| Luas Areal (Ha) | 1.712,00 | 1.716,00 | 0,23% |
| Produksi (Ton) | 3.177,30 | 3.177,30 | 0,00% |
| Produktivitas (Kg/Ha) | 1.898,03 | 1.898,03 | 0,00% |
| Tembakau | | | |
| Luas Areal (Ha) | 1.761,00 | 1.761,00 | 0,00% |
| Produksi (Ton) | 1.907,48 | 1.937,73 | 1,59% |
| Produktivitas (Kg/Ha) | 1.083,18 | 1.100,36 | 1,59% |

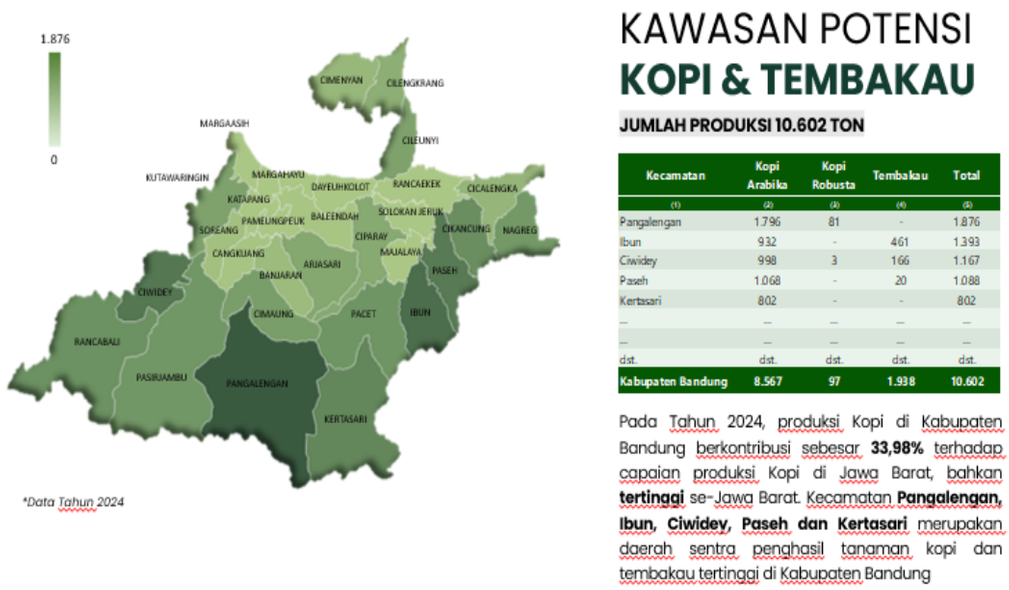
Sumber Data: Dinas Pertanian, 2023-2024

Kabupaten Bandung merupakan salah satu sentra utama penghasil kopi arabika di Jawa Barat, bahkan nasional. Pada tahun 2024, produksi kopi di Kabupaten Bandung tercatat mencapai 8.567 ton, yang sebagian besar berasal dari jenis kopi arabika. Jumlah tersebut mencakup sekitar 33,98% dari total produksi kopi di Provinsi Jawa Barat, menempatkan Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan kontribusi tertinggi terhadap komoditas ini di tingkat provinsi.

Kecamatan Pangalengan menjadi daerah dengan produksi kopi tertinggi, mencapai 1.876 ton, diikuti oleh Ibun (932 ton), Ciwidey (1.167 ton), Paseh (1.060 ton), dan Kertasari (860 ton). Wilayah-wilayah ini secara topografis berada di dataran tinggi dengan iklim yang sangat cocok untuk pengembangan kopi arabika berkualitas tinggi. Selain itu, varietas kopi dari Pangalengan dan Ciwidey telah dikenal luas di kalangan pelaku industri kopi spesialti (specialty coffee), termasuk oleh komunitas barista dan pasar ekspor skala kecil.

Pengembangan kopi di Kabupaten Bandung tidak hanya berorientasi pada volume, namun juga pada nilai tambah dan keberlanjutan. Upaya penguatan dilakukan melalui pembinaan pascapanen, pengolahan biji kopi, dan perluasan akses ke pasar kopi premium. Kolaborasi dengan pelaku usaha kopi, koperasi petani, dan sektor pariwisata melalui agrowisata kopi menjadi peluang strategis dalam meningkatkan pendapatan petani sekaligus mempertahankan eksistensi kopi sebagai identitas perkebunan unggulan Kabupaten Bandung.

Gambar 2.10 Kawasan Potensi Kopi & Tembakau




Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Selain kopi, komoditas tembakau juga menjadi bagian penting dari subsektor perkebunan di Kabupaten Bandung. Pada tahun 2024, total produksi tembakau mencapai 1.938 ton, dengan sentra produksi tersebar di beberapa kecamatan yang memiliki dataran kering dan musim kemarau yang mendukung. Meski kontribusinya terhadap total PDRB pertanian masih terbatas, tembakau berperan sebagai komoditas alternatif yang menopang ekonomi petani musiman, terutama di kawasan selatan dan timur Kabupaten Bandung.

Gambar 2.11 Kegiatan Petani Komoditas Tembakau



Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Keunggulan Kabupaten Bandung dalam komoditas tembakau semakin ditegaskan dengan keberadaan tiga varietas tembakau lokal yang telah memperoleh sertifikasi resmi dari Kementerian Pertanian, yaitu: Kayangan, Simojang dan Himar. Ketiga varietas ini merupakan hasil seleksi dan uji adaptasi lokal yang dikembangkan melalui kerja sama antara Dinas Pertanian dan Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas). Varietas ini dinilai unggul dalam daya adaptasi terhadap lingkungan, ketahanan

terhadap penyakit, serta mutu daun yang sesuai standar industri pengolahan. Saat ini, tembakau varietas Kayangan, Simojang, dan Himar telah dibudidayakan di sekitar 17 kecamatan, termasuk kawasan Cikancung, dengan total luasan mencapai 761 hektar.

Pengembangan tembakau di Kabupaten Bandung diarahkan pada pertanian rakyat berbasis lokalitas dan ramah lingkungan. Untuk mendukung keberlanjutan, intervensi penguatan kelembagaan petani, efisiensi teknologi budidaya, dan diversifikasi produk turunan tembakau menjadi kunci utama dalam meningkatkan nilai tambah komoditas ini di tengah dinamika regulasi nasional terkait hasil tembakau.

d) Sub Sektor Peternakan

Subsektor peternakan merupakan salah satu komponen penting dalam struktur pertanian Kabupaten Bandung. Potensinya tidak hanya mencakup aspek produksi pangan asal hewan, tetapi juga berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat pedesaan, kemandirian ekonomi lokal, dan ketahanan pangan berbasis protein hewani. Kabupaten Bandung memiliki ekosistem peternakan yang cukup lengkap, dengan pengembangan komoditas utama seperti sapi perah, sapi potong, domba, ayam ras, ayam buras, serta itik dan kambing.

Subsektor peternakan berperan strategis dalam penyediaan pangan hewani, pendapatan rumah tangga petani, dan kontribusi terhadap perekonomian lokal. Pada tahun 2024, total populasi ternak di Kabupaten Bandung tercatat mencapai 7.127.164 ekor, mengalami peningkatan sebesar 5,50% dibandingkan tahun sebelumnya (2023), yang berada di angka 6.755.595 ekor.

Tabel 2.10. Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2024

| No | Jenis Ternak | Tahun 2023 (Ekor) | Tahun 2024 (Ekor) | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sapi Potong | 23.691 | 23.465 | -0,95% |
| 2 | Sapi Perah | 27.661 | 25.449 | -8,00% |
| 3 | Kambing | 19.905 | 20.867 | 4,83% |
| 4 | Domba | 222.588 | 240.092 | 7,86% |
| 5 | Ayam Buras | 1.625.716 | 1.712.539 | 5,34% |
| 6 | Ayam Ras Petelur | 440.881 | 469.938 | 6,59% |
| 7 | Ayam Ras Pedaging | 4.063.367 | 4.272.078 | 5,14% |

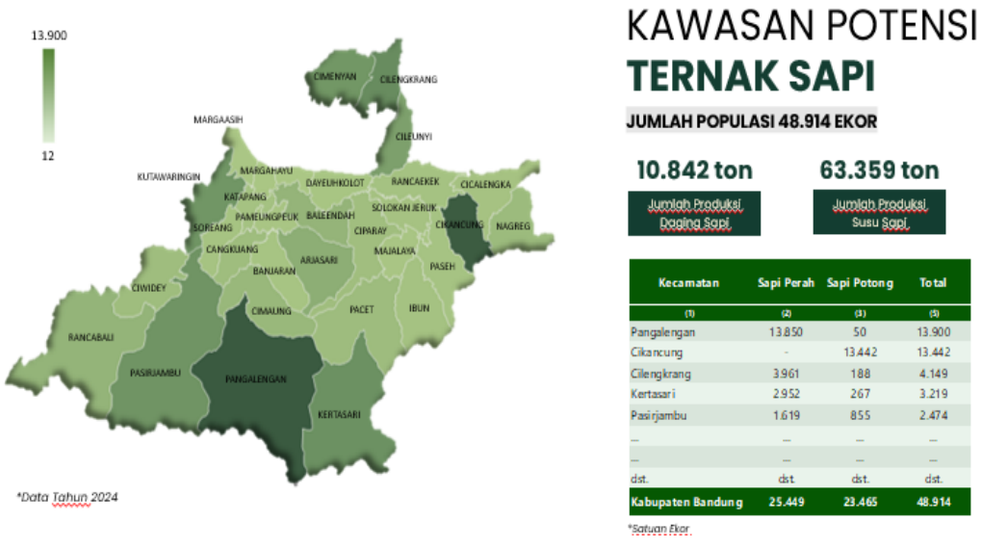
| No | Jenis Ternak | Tahun 2023 (Ekor) | Tahun 2024 (Ekor) | Pertumbuhan (%) |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Itik | 331.786 | 362.736 | 9,33% |
| Jumlah | | 6.755.595 | 7.127.164 | 5,50% |

Sumber Data : Dinas Pertanian, 2023-2024

Komoditas ternak sapi masih menjadi salah satu andalan subsektor peternakan. Total populasi sapi tercatat 48.914 ekor, yang terdiri atas 25.449 ekor sapi perah dan 23.465 ekor sapi potong. Meskipun secara agregat menurun dibandingkan tahun sebelumnya, terutama pada sapi perah yang mengalami penurunan signifikan sebesar -8,00%, namun secara spasial terdapat konsentrasi populasi tinggi di kecamatan Pangalengan (13.900 ekor), yang dikenal sebagai sentra utama produksi susu segar di Jawa Barat. Wilayah lain seperti Kertasari, Cilengkrang, dan Pasirjambu turut menopang populasi sapi perah, sementara Cikancung menjadi pusat pengembangan sapi potong terbesar di kabupaten.

Penurunan ini disebabkan oleh merebaknya kembali wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) pada bulan Desember 2024 di beberapa wilayah, yaitu Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, dan Pangalengan. Beberapa kasus menunjukkan adanya ternak yang mati, sementara beberapa lainnya mengalami sakit sehingga harus dipotong paksa. Hingga saat ini, vaksinasi PMK di Kabupaten Bandung belum sepenuhnya tersalurkan, terutama karena wabah lebih banyak menyerang ternak muda, seperti pedet dan dara, yang belum menerima vaksinasi. Sementara itu, ternak yang telah divaksin masih dalam tahap pemulihan, baik dari segi reproduksi maupun imunitas. Selain itu, lalu lintas pemasukan dan pengeluaran ternak tidak seketat seperti pada tahun 2023, yang turut mempermudah penyebaran wabah PMK yang baru. Untuk meningkatkan performa populasi ternak, diperlukan penguatan sistem pencegahan penyakit melalui percepatan vaksinasi PMK dan LSD serta pengawasan ketat terhadap lalu lintas ternak. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan obat dan vitamin untuk meningkatkan daya tahan ternak.

Gambar 2.12 Kawasan Potensi Ternak Sapi

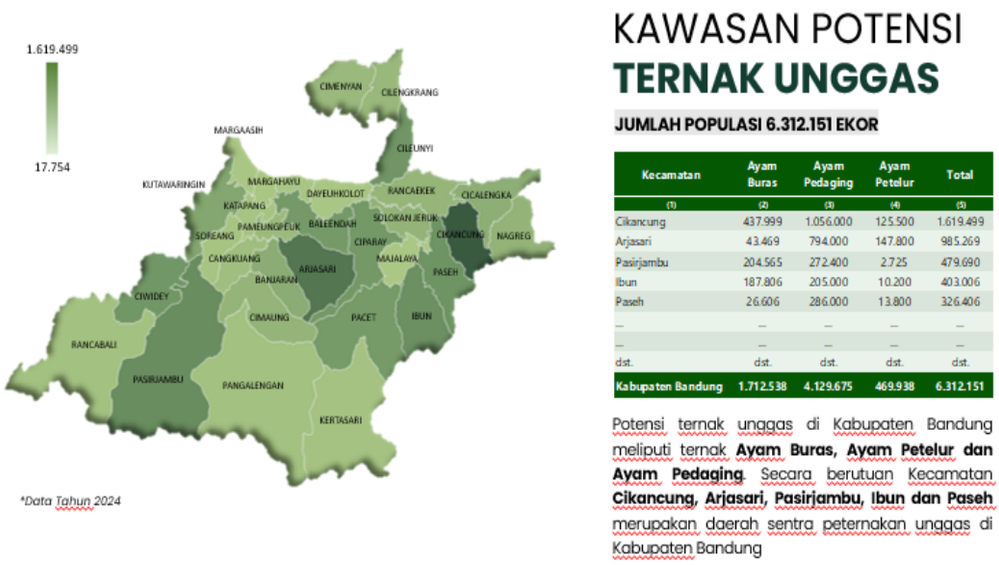



Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Dari sisi produksi, Kabupaten Bandung menghasilkan sekitar 63.359 ton susu sapi dan 10.842 ton daging sapi per tahun. Nilai ini menunjukkan kontribusi besar terhadap pemenuhan kebutuhan protein hewani, baik di tingkat lokal maupun wilayah Bandung Raya. Ini menunjukkan bahwa ternak sapi merupakan salah satu subsektor dengan nilai ekonomi strategis, baik untuk konsumsi lokal maupun industri pengolahan susu dan daging. Namun, penurunan populasi sapi perlu segera ditanggapi dengan kebijakan penguatan pembibitan, stabilisasi harga susu di tingkat peternak, dan perlindungan usaha peternak rakyat melalui pendekatan koperasi serta integrasi pakan lokal.

Sementara itu, ternak unggas menunjukkan pertumbuhan yang sangat positif. Total populasi unggas pada tahun 2024 mencapai 6.312.151 ekor, meningkat dari 2023 sebesar 5,34%. Komoditas unggas ini mencakup ayam buras (1.712.538 ekor), ayam ras pedaging (4.272.078 ekor), dan ayam ras petelur (469.938 ekor). Kenaikan tertinggi terjadi pada ayam petelur (6,59%) dan ayam buras, mencerminkan meningkatnya permintaan protein hewani serta peluang pasar di sektor pangan rumah tangga dan industri olahan.

Gambar 2.13 Kawasan Potensi Ternak Unggas




Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Komoditi ternak unggas di Kabupaten Bandung merupakan salah satu yang paling dominan dalam struktur peternakan. Total populasi unggas pada tahun 2024 mencapai 6.312.151 ekor, terdiri dari ayam buras (1.712.538 ekor), ayam pedaging (4.129.675 ekor), dan ayam petelur (469.938 ekor). Volume ini mencerminkan skala produksi yang sangat besar, baik untuk konsumsi rumah tangga maupun pasokan industri pangan dan rumah potong unggas.

Wilayah Cikancung menempati urutan pertama sebagai sentra unggas dengan total populasi mencapai 1.619.499 ekor, didominasi oleh ayam pedaging dan ayam buras. Disusul oleh Arjasari (985.269 ekor) dan Pasirjambu (475.893 ekor), yang juga merupakan wilayah dengan kepadatan kandang mandiri maupun sistem kemitraan skala kecil-menengah. Kecamatan Ibun dan Paseh melengkapi deretan sentra penghasil unggas terbesar, yang berperan penting dalam menyuplai daging dan telur ke wilayah Bandung Raya dan kota-kota besar lainnya.

Komoditas ayam pedaging menjadi tulang punggung dengan kontribusi produksi terbesar. Namun demikian, populasi ayam buras tetap penting sebagai sumber protein keluarga di wilayah pedesaan dan komoditas budaya (ayam kampung). Ayam petelur juga menunjukkan potensi pengembangan di kawasan timur sebagai penyuplai kebutuhan telur konsumsi harian.

Dengan tingginya permintaan pasar, potensi unggas Kabupaten Bandung dapat terus diperkuat melalui pengembangan sentra peternakan berbasis kawasan, modernisasi sistem kandang, serta penguatan biosekuriti

dan kesehatan hewan. Integrasi dengan UMKM olahan hasil ternak unggas juga menjadi peluang besar untuk mendorong ekonomi lokal dan memperluas rantai nilai peternakan.

Komoditas peternakan yang penting lainnya, kambing dan domba mengalami peningkatan populasi yang stabil. Domba tumbuh sebesar 7,86% menjadi 240.092 ekor, sedangkan kambing meningkat sebesar 4,83% menjadi 20.867 ekor. Komoditas ini penting sebagai sumber daging alternatif dan bagian dari tradisi lokal, khususnya domba Garut yang juga memiliki nilai budaya di masyarakat Kabupaten Bandung. Adapun itik mengalami pertumbuhan paling tinggi sebesar 9,33%, menjadi 362.736 ekor, menjadikan komoditas ini sebagai peluang potensial untuk diversifikasi peternakan unggas lokal.

Dengan ekosistem peternakan yang lengkap dan sebaran geografis yang mendukung, Kabupaten Bandung memiliki landasan kuat untuk terus mengembangkan subsektor ini. Penguatan pada aspek hulu seperti pembibitan, pakan, dan manajemen kesehatan hewan, hingga ke hilir berupa pascapanen, logistik, dan akses pasar, menjadi strategi utama dalam mewujudkan peternakan tangguh, berkelanjutan, dan berbasis ekonomi kerakyatan.

2.1.3.1.3 Potensi Kelembagaan Petani

Kelembagaan petani merupakan salah satu pilar fundamental dalam pembangunan pertanian Kabupaten Bandung. Peran kelembagaan tidak hanya terbatas sebagai wadah organisasi petani, tetapi juga berfungsi sebagai penggerak kegiatan produksi, distribusi sarana dan prasarana, penjamin kontinuitas usaha tani, serta mitra dalam kemitraan agribisnis dan akses program pemerintah. Dalam konteks pembangunan pertanian modern, keberadaan kelembagaan yang kuat dan adaptif menjadi kunci bagi peningkatan daya saing, keberlanjutan usaha tani, dan kemandirian petani secara ekonomi.

Kabupaten Bandung memiliki jaringan kelembagaan petani yang cukup luas dan beragam. Sebagian besar petani tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) yang tersebar di seluruh kecamatan, yang kemudian terorganisasi dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tingkat desa dan kecamatan. Data tahun terakhir menunjukkan terdapat ribuan kelompok tani aktif yang menjadi mitra strategis Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program bantuan

pemerintah, seperti distribusi sarana produksi, pelatihan teknis, hingga pelaksanaan program kartu tani dan pemutakhiran RDKK.

Selain Poktan dan Gapoktan, kelembagaan ekonomi petani juga berkembang dalam bentuk koperasi tani, kelompok usaha bersama (KUB), dan korporasi petani yang mulai dibina di beberapa wilayah melalui pendekatan model pertanian berbasis kawasan. Salah satu contoh kelembagaan unggulan adalah Koperasi Peternak Sapi Bandung Selatan (KPBS Pangalengan) dan Kelompok Tani Sarinah Organik Ciparay, yang telah berhasil membangun kemitraan dengan pasar terstruktur dan memperoleh sertifikasi nasional. Keberadaan kelembagaan seperti ini menjadi bukti bahwa petani di Kabupaten Bandung memiliki potensi kemandirian usaha apabila didukung dengan tata kelola yang profesional dan akses pasar yang jelas.

Dalam mendukung keberdayaan kelembagaan petani, Kabupaten Bandung juga telah menempatkan peran penting penyuluh pertanian dan tenaga pendamping. Melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dan unit pelaksana teknis lainnya, penguatan kapasitas kelompok dilakukan secara berkelanjutan. Fungsi penyuluhan semakin strategis dalam mendorong transformasi kelembagaan petani dari hanya penerima bantuan menuju pelaku usaha tani yang berorientasi pasar, terutama dalam konteks pembangunan pertanian modern dan adaptasi terhadap perubahan iklim dan pasar digital.

Dengan kondisi tersebut, potensi kelembagaan petani di Kabupaten Bandung tidak hanya terletak pada jumlah dan sebaran kelompok yang luas, tetapi juga pada pengalaman kolektif, struktur sosial pedesaan yang kuat, serta dukungan kebijakan lokal yang membuka ruang bagi penguatan model pertanian berbasis korporasi. Ke depan, pengembangan kelembagaan petani perlu diarahkan pada integrasi hulu–hilir, peningkatan tata kelola usaha tani, dan perluasan akses ke pembiayaan dan pasar digital agar petani tidak hanya menjadi produsen, tetapi juga pelaku utama dalam rantai nilai pertanian.

Kabupaten Bandung memiliki total 4.224 kelompok tani aktif dengan jumlah anggota mencapai 132.942 orang yang tersebar di 31 kecamatan. Sebaran ini mencerminkan struktur kelembagaan petani yang cukup kuat dan menjangkau hampir seluruh wilayah administrasi kabupaten. Keberadaan kelompok tani ini menjadi tulang punggung pelaksanaan program-program pembangunan pertanian, penyaluran bantuan, serta peningkatan kapasitas dan pemberdayaan petani di lapangan. Kelembagaan

petani juga menjadi sarana untuk konsolidasi kebutuhan produksi, pemasaran hasil tani, dan adopsi teknologi pertanian.

Tabel 2.11. Potensi Kelompok Tani di Kabupaten Bandung

| NO. | KECAMATAN | JUMLAH KELOMPOK | JUMLAH ANGGOTA |
|---|---|---|---|
| 1 | Arjasari | 174 | 9.335 |
| 2 | Baleendah | 95 | 3.099 |
| 3 | Banjaran | 172 | 4.333 |
| 4 | Bojongsoang | 123 | 1.528 |
| 5 | Cangkuang | 90 | 2.647 |
| 6 | Cicalengka | 99 | 3.685 |
| 7 | Cikancung | 117 | 5.243 |
| 8 | Cilengkrang | 82 | 2.930 |
| 9 | Cileunyi | 88 | 2.817 |
| 10 | Cimaung | 236 | 6.135 |
| 11 | Cimenyan | 127 | 4.044 |
| 12 | Ciparay | 238 | 6.244 |
| 13 | Ciwidey | 164 | 7.210 |
| 14 | Dayeuhkolot | 46 | 422 |
| 15 | Ibun | 131 | 6.370 |
| 16 | Katapang | 44 | 2.007 |
| 17 | Kertasari | 278 | 8.150 |
| 18 | Kutawaringin | 121 | 4.101 |
| 19 | Majalaya | 84 | 3.042 |
| 20 | Margaasih | 29 | 848 |
| 21 | Margahayu | 17 | 357 |
| 22 | Nagreg | 98 | 3.133 |
| 23 | Pacet | 215 | 4.217 |
| 24 | Pameungpeuk | 69 | 1.439 |
| 25 | Pangalengan | 460 | 10.086 |
| 26 | Paseh | 125 | 4.930 |
| 27 | Pasirjambu | 235 | 9.834 |
| 28 | Rancabali | 152 | 3.887 |
| 29 | Rancaekek | 128 | 4.723 |
| 30 | Solokan Jeruk | 103 | 3.442 |
| 31 | Soreang | 84 | 2.704 |
| JUMLAH TOTAL | | 4.224 | 132.942 |

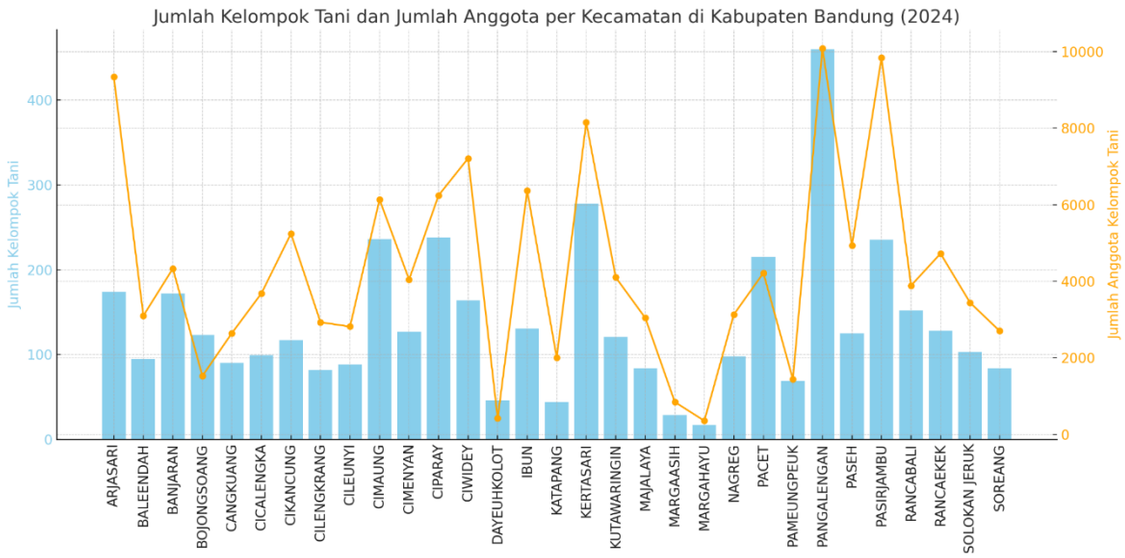
Sumber Data : Dinas Pertanian, 2024

Secara kuantitatif, Kecamatan Pangalengan mencatat jumlah kelompok tani tertinggi, yaitu 460 kelompok dengan 10.086 anggota. Posisi ini sejalan dengan status Pangalengan sebagai sentra pertanian, peternakan, dan hortikultura utama di wilayah selatan Kabupaten Bandung. Diikuti oleh Kecamatan Kertasari (278 kelompok) dan Ciparay (238 kelompok), yang juga merupakan kawasan strategis dalam produksi sayuran dataran tinggi dan tanaman pangan. Ketiganya mencerminkan wilayah dengan intensitas kegiatan pertanian yang tinggi dan tingkat partisipasi petani dalam kelembagaan yang kuat.

Beberapa kecamatan lain dengan jumlah kelompok besar adalah Pasirjambu (235 kelompok), Cimaung (236 kelompok), dan Pacet (215 kelompok). Jumlah ini memperlihatkan bahwa kawasan-kawasan di selatan dan tenggara Kabupaten Bandung memiliki kepadatan kelembagaan petani yang cukup tinggi, seiring dengan karakteristik wilayah agraris yang didukung oleh sumber daya alam yang memadai. Tingginya jumlah kelompok tani di kawasan tersebut membuka peluang pengembangan model pertanian berbasis kawasan, penguatan koperasi tani, serta integrasi ke dalam rantai nilai pasar modern.

Di sisi lain, terdapat pula kecamatan-kecamatan dengan jumlah kelompok relatif kecil, seperti Margahayu (17 kelompok), Margaasih (29 kelompok), dan Dayeuhkolot (46 kelompok). Keterbatasan jumlah kelompok di wilayah ini dapat dikaitkan dengan dominasi kawasan permukiman, industrialisasi, dan menurunnya aktivitas pertanian. Meski demikian, kelompok tani di wilayah ini tetap berperan dalam pengelolaan pertanian lahan sempit, urban farming, dan pengembangan ketahanan pangan berbasis rumah tangga.

Berdasarkan tabel tersebut, dapat divisualisasikan ke dalam grafik perbandingan kelompok dengan jumlah anggota pada tiap kecamatan. Grafik berikut menggambarkan bahwa pada beberapa kecamatan memiliki rata-rata anggota yang tinggi dan sebaliknya. Kecamatan Arjasari, Ibun, Katapang, dan Cikancung memiliki rasio anggota per kelompok tertinggi, menandakan efisiensi organisasi kelompok yang cukup tinggi atau tingginya partisipasi petani dalam satu kelompok. Sebaliknya, kecamatan seperti Dayeuhkolot, Bojongsoang, dan Pacet menunjukkan rasio terendah, yang bisa mengindikasikan tantangan dalam pengorganisasian petani, penyebaran kelompok terlalu kecil, atau rendahnya minat keanggotaan. Hal ini dapat digunakan untuk menilai efektivitas program kelembagaan petani per wilayah, serta sebagai dasar dalam intervensi penguatan kelembagaan dan konsolidasi kelompok tani.




Ketersediaan tenaga penyuluh pertanian menjadi faktor penting dalam keberhasilan pembangunan pertanian di tingkat lapangan. Berdasarkan data tahun 2024, Kabupaten Bandung memiliki total 150 penyuluh pertanian yang tersebar di 31 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) kecamatan. Penyuluh ini terdiri dari berbagai status kepegawaian, yakni PNS sebanyak 53 orang, PPPK sebanyak 39 orang, THL-TBPP sebanyak 5 orang, dan THL-TBPPD sebanyak 53 orang. Secara keseluruhan, distribusi penyuluh masih tergolong belum merata dan belum ideal dibandingkan dengan jumlah kelompok tani yang ada. Beberapa kecamatan yang memiliki cakupan kelompok tani dan wilayah pertanian luas, seperti Pangalengan, Ciparay, Paseh, dan Arjasari, memang mendapatkan alokasi penyuluh lebih banyak, masing-masing 7 orang. Namun di sisi lain, terdapat pula kecamatan dengan jumlah penyuluh hanya 2–3 orang, seperti Margahayu (2 penyuluh), Dayeuhkolot (2), dan Rancabali (3), dimana wilayah-wilayah tersebut tetap memiliki kegiatan pertanian aktif dan kelompok tani yang perlu pendampingan.

Tabel 2.12 Sebaran penyuluh pertanian per kecamatan Tahun 2024

| NO | BPP KECAMATAN | JUMLAH PENYULUH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PENYULUH PNS | PPPK | THL-TBPP | THL-TBPPD | JUMLAH |
| 1 | Arjasari | 3 | 1 | | 3 | 7 |
| 2 | Baleendah | 1 | 3 | | 2 | 6 |
| 3 | Banjaran | 1 | 2 | | 3 | 6 |
| 4 | Bojongsoang | 3 | | | 1 | 4 |
| 5 | Cangkuang | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| 6 | Cicalengka | 1 | 2 | | 3 | 6 |
| 7 | Cikancung | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| 8 | Cilengkrang | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| 9 | Cileunyi | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |

| NO | BPP KECAMATAN | JUMLAH PENYULUH | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | PENYULUH PNS | PPPK | THL-TBPP | THL-TBPPD | JUMLAH |
| 10 | Cimaung | 3 | | | 2 | 5 |
| 11 | Cimenyan | 1 | 1 | | 4 | 6 |
| 12 | Ciparay | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 |
| 13 | Ciwidey | 2 | | | 2 | 4 |
| 14 | Dayeuhkolot | 1 | | | 1 | 2 |
| 15 | Ibun | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 16 | Katapang | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| 17 | Kertasari | 1 | 2 | | 2 | 5 |
| 18 | Kutawaringin | 2 | 2 | | 1 | 5 |
| 19 | Majalaya | 2 | 3 | | 1 | 6 |
| 20 | Margaassih | 1 | | | 2 | 3 |
| 21 | Margahayu | 1 | 1 | | 0 | 2 |
| 22 | Nagreg | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | Pacet | 1 | 1 | | 3 | 5 |
| 24 | Pameungpeuk | 2 | 1 | | 1 | 4 |
| 25 | Pangalengan | 2 | | 1 | 4 | 7 |
| 26 | Paseh | 2 | 1 | | 4 | 7 |
| 27 | Pasirjambu | | 3 | | | 3 |
| 28 | Rancabali | 2 | | | 1 | 3 |
| 29 | Rancaekek | 4 | 3 | | 1 | 8 |
| 30 | Solokan Jeruk | 1 | 2 | | 1 | 4 |
| 31 | Soreang | 3 | 1 | | 1 | 5 |
| JUMLAH | | 53 | 39 | 5 | 53 | 150 |

Sumber Data : Dinas Pertanian, 2024

Terdapat 150 orang penyuluh pertanian baik ASN, THL TBPPD (provinsi) maupun THL TBPP (pusat) dalam membina 4.093 kelompok tani/gapoktan. Rasio penyuluh terhadap kelompok tani yaitu 1:27,29 dengan kata lain 1 orang penyuluh melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap 27 kelompok tani. Hal tersebut mengindikasikan bahwa dalam peningkatan kualitas kelompok tani yang dapat diidentifikasi melalui kelas kelompok, para penyuluh pertanian lapangan membutuhkan inovasi dan efektifitas dalam penyuluhan agar dapat melayani seluruh kelompok binaan. Sejalan dengan terbitnya Inpres Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pemberdayagunaan Penyuluh Pertanian dalam rangka Percepatan Swasembada Pangan, Fungsi Penyuluhan beserta Penyuluh Pertanian yang ada di daerah, akan ditarik menjadi pegawai pusat, walaupun dalam pelaksanaannya PPL ASN akan ditugaskan kembali di daerah masing-masing. Kebijakan tersebut akan mulai efektif pada awal Tahun 2026. Kebijakan ini pula berdampak pada tidak adanya penyuluh Non ASN (THL-TBPPD) provinsi, dimana fungsinya akan dirubah sebagaimana menjadi non penyuluh pertanian, sebagaimana fungsi Pemrov Jawa Barat. Hal tersebut perlu

dilakukan penyesuaian terhadap sasaran pembangunan daerah, khususnya dalam rangka peningkatan kapasitas kelompok tani.

Struktur kelembagaan petani di Kabupaten Bandung tahun 2024 masih didominasi oleh kelompok tani kelas Pemula. Dari total 4.093 kelompok tani yang terdaftar, sebanyak 2.893 kelompok (70,7%) berada pada kategori Pemula, menandakan bahwa sebagian besar kelembagaan masih berada pada fase awal pembentukan dan memerlukan pembinaan intensif untuk naik kelas. Secara proporsi, jumlah kelompok pemula di Kabupaten Bandung menyumbang 11,44% dari total kelompok pemula di Jawa Barat dan 1,16% dari total kelompok pemula secara nasional, mencerminkan skala partisipasi kelembagaan yang cukup besar namun belum sepenuhnya berkembang.

Tabel 2.13 Perbandingan Rincian Kelas Kelompok Tani terhadap provinsi dan Nasional pada tahun 2024

| Kelas Kelompok | Kab. Bandung | Prov. Jawa Barat | Nasional | % Provinsi | % Nasional |
|---|---|---|---|---|---|
| PEMULA | 2.893 | 22.566 | 222.436 | 11,44 | 1,16 |
| LANJUT | 1.086 | 11.030 | 88.630 | 11,20 | 1,39 |
| MADYA | 99 | 1.264 | 12.968 | 7,75 | 0,76 |
| UTAMA | 15 | 70 | 1.264 | 10,00 | 0,55 |
| JUMLAH | 4.093 | 34.930 | 325.298 | 11,23 | 1,21 |
| Jumlah Kategori Kelompok Tani Maju | 114 | 1.334 | 14.232 | | |
| Persentase | 2,79% | 3,82% | 4,38% | | |

Sumber Data : Distan, 2024

Kelompok dengan kategori Lanjut berjumlah 1.086 kelompok atau sekitar 26,5% dari total Poktan di Kabupaten Bandung, yang menunjukkan adanya progres kelembagaan yang mulai mapan dari sisi administrasi, pertemuan rutin, dan kegiatan kolektif petani. Secara provinsi, jumlah ini berkontribusi 11,20% terhadap total kelompok Lanjut di Jawa Barat, sedangkan pada skala nasional berkontribusi 1,39%.

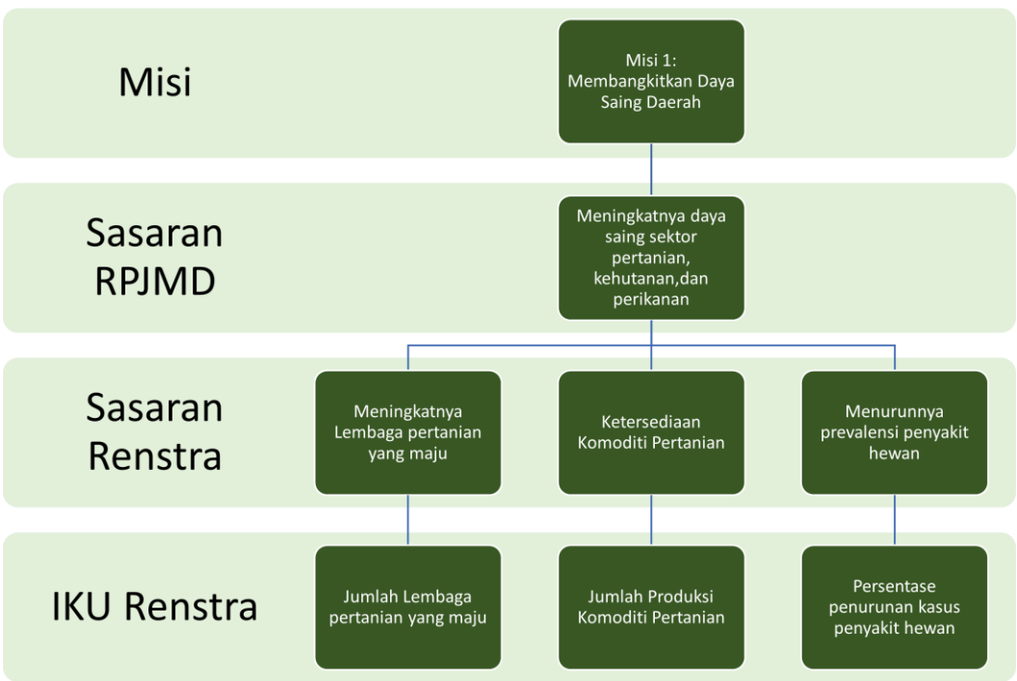
Sementara itu, hanya 99 kelompok (2,4%) yang masuk ke dalam kategori Madya, dan 15 kelompok (0,37%) yang berhasil mencapai kategori Utama, yaitu kelompok dengan kemandirian tinggi, kemampuan manajemen usaha tani kolektif, dan integrasi dalam kemitraan pasar atau koperasi. Jika digabung, jumlah kelompok kategori "Maju" (Madya + Utama) hanya sebanyak 114 kelompok atau setara 2,79% dari total kelompok di Kabupaten Bandung. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan persentase kelompok maju di tingkat Provinsi Jawa Barat (3,82%) dan Nasional (4,38%), menandakan bahwa akselerasi peningkatan kapasitas kelembagaan perlu diprioritaskan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara kuantitas Kabupaten Bandung merupakan salah satu kabupaten dengan jumlah kelompok tani terbanyak di Jawa Barat (berkontribusi 11,23% terhadap jumlah total kelompok tani provinsi), secara kualitas dan tahapan perkembangan kelembagaan, masih terdapat kesenjangan yang perlu diatasi melalui strategi pembinaan kelembagaan yang lebih terarah dan berkelanjutan.

2.1.3.2 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian Pelaksanaan IKU dan IKK Tahun 2021-2026

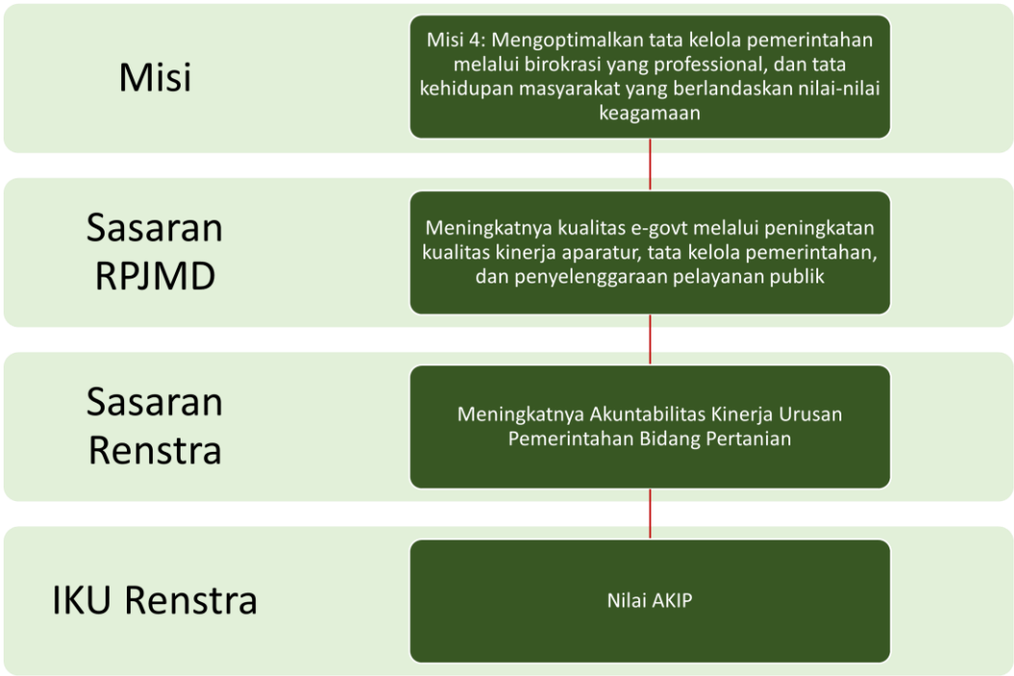
Dalam rangka pencapaian misi RPJMD menciptakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing, yang bertujuan pembangunan yang ditetapkan adalah meningkatkan daya saing perekonomian Kabupaten Bandung dan mewujudkan ketahanan pangan daerah. Adapun sasaran yang ditetapkan dalam menunjang tujuan dan menjadi acuan Dinas Pertanian yaitu Meningkatkan daya saing sektor pertanian, Dinas Pertanian mendorong pencapaian target indikator sasaran tersebut melalui penetapan sasaran dan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2021-2026. Sasaran daerah lainnya yaitu

Gambar 2.14 Cascading IKU Renstra Misi 1




Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Gambar 2.15 Cascading IKU Renstra Misi 4




Sumber : Dinas Pertanian, 2024

Sebagai pembanding pelaksanaan dan target pelayanan Dinas Pertanian pada periode Renstra Tahun 2021-2026, disajikan indikator dan target-realisasi Pelayanan Perangkat Daerah berikut Target-Realisasi pendanaannya. Target dan realisasi Indikator kinerja disajikan dalam Tabel Indikator Kinerja. Sedangkan gambaran pendanaan selama periode Renstra sebelumnya disajikan dalam Tabel Anggaran.

Pada periode Renstra Dinas Pertanian Tahun 2021-2026, guna mendukung pencapaian Visi dan Misi kepala daerah, terdapat 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) Renstra Dinas Pertanian, yaitu:

1. Nilai AKIP
2. Jumlah Produksi Komoditi Pertanian
3. Persentase penurunan kasus penyakit hewan
4. Jumlah lembaga pertanian yang maju

Tabel 2.14. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

| Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah | Target SPM | Target IKK | Target Indikator Lainnya (IKU) | Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke- | | | | | Realisasi Capaian Tahun | | | | | Rasio Capaian Pada Tahun | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | (13) | (14) | (15) | (16) | (17) | (18) | (19) | (20) |
| Nilai AKIP (poin) | | | √ | 80,1 | 82 | 82,3 | 84 | 84.5 | 81,93 | 82,96 | 84 | 84,55 | | 102,28 | 101,17 | 102,07 | 100,65 | |
| Jumlah Produksi Komoditi Pertanian (ton) | | | √ | 1.237.248 | 1.392.624 | 1.446.255 | 1.471.057 | 1.366.340 | 1.500.976 | 1.544.093 | 1.435.637 | 1.486.749 | | 121,32 | 110,88 | 99,27 | 101,07 | |
| Persentase penurunan kasus penyakit hewan (%) | | | √ | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 0 | 20 | 85,83 | 51,19 | | | 100,00 | 429,15 | 255,95 | |
| Jumlah lembaga pertanian yang maju (kelompok) | | | √ | 99 | 100 | 105 | 110 | 115 | 100 | 103 | 105 | 114 | | 101,01 | 103,00 | 100,00 | 103,64 | |

Sumber Data: Distan 2021-2024

2.1.3.2.1 Nilai AKIP

Rata-rata capaian indikator sasaran IKU Dinas Pertanian pada akhir periode Renstra sebesar 105,43%. Capaian Nilai AKIP menunjukkan konsistensi yang tinggi dan stabil di atas target, dengan rata-rata ketercapaian 101,54%. Hal ini mencerminkan bahwa aspek tata kelola dan akuntabilitas kinerja Dinas telah berada pada level sangat baik dan relatif stabil selama periode Renstra.

Nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) mencerminkan kualitas pelaksanaan manajemen kinerja instansi secara menyeluruh—mulai dari perencanaan, pelaksanaan program, hingga pelaporan dan evaluasi. Rata-rata capaian di atas 100% menunjukkan bahwa Dinas Pertanian Kabupaten Bandung telah berhasil melaksanakan siklus manajemen kinerja secara konsisten. Secara teknis, hal ini berkaitan erat dengan:

- Penyusunan perjanjian kinerja dan indikator yang tepat,
- Ketersediaan data yang valid dan sistem pelaporan yang baik (melalui pemanfaatan teknologi informasi terintegrasi),
- Integrasi dokumen perencanaan (Renstra, Renja, dan RKA) dengan capaian kinerja yang terukur.

Capaian yang stabil juga menunjukkan bahwa SDM perencana dan pelaksana program sudah cukup memahami kerangka logis indikator kinerja dan mampu mempertahankan dokumen perencanaan yang akuntabel. Namun untuk peningkatan ke depan, nilai AKIP dapat didorong lebih tinggi melalui integrasi sistem digital evaluasi kinerja dan penguatan pelaporan berbasis output dan outcome kinerja.

2.1.3.2.2 Jumlah Produksi Komoditi Pertanian

Indikator Jumlah Produksi Komoditi Pertanian Kabupaten Bandung dibentuk dari total produksi empat subsektor utama, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024), indikator ini menunjukkan tren fluktuatif namun tetap berada di atas atau mendekati target Renstra, yang menunjukkan ketahanan dan dinamika pertanian daerah dalam menghadapi tantangan iklim, pasar, dan teknis budidaya.

Indikator Jumlah Produksi Komoditi Pertanian mencatat rata-rata capaian sebesar 108,14%, menunjukkan kinerja produksi pertanian yang secara umum melampaui target. Tahun 2021 dan 2022 mencatat surplus produksi tinggi, sedangkan tahun 2023 sempat menurun sedikit di bawah target (99,27%) sebelum kembali naik pada 2024. Secara keseluruhan, ini

menandakan keberhasilan dalam aspek produktivitas dan kesinambungan produksi.

Subsektor tanaman pangan merupakan pondasi utama pembangunan pertanian Kabupaten Bandung, baik dari sisi volume produksi maupun kontribusinya terhadap ketahanan pangan daerah. Komoditas utama dalam subsektor ini adalah padi, jagung, ubi jalar, ubi kayu, kacang tanah, dan kedelai. Berdasarkan data tahun 2020–2024, padi menyumbang volume terbesar, meskipun mengalami pertumbuhan yang penurunan produksi dari 670.441 ton (2020) menjadi 511.292 ton (2024). Penurunan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi mencerminkan tantangan struktural, seperti menurunnya luas panen akibat perubahan pemanfaatan lahan sawah, perubahan iklim dan perubahan pola tanam.

Meskipun produksi padi menurun, terdapat sinyal positif dari komoditas pangan lokal alternatif. Ubi jalar, misalnya, mengalami lonjakan produksi dari 31.067 ton (2020) menjadi 54.189 ton (2024). Demikian pula ubi kayu, yang tumbuh dari 63.831 ton ke 92.858 ton. Ini menunjukkan bahwa diversifikasi pangan berbasis umbi-umbian mulai mendapatkan tempat dalam praktik pertanian dan konsumsi masyarakat, terutama sebagai respons terhadap ancaman krisis pangan global dan dinamika harga beras. Hal ini penting untuk terus didorong melalui program substitusi pangan lokal dan pengembangan industri pengolahan.

Kinerja jagung juga menunjukkan fluktuasi, dengan puncak produksi di tahun 2022 (118.011 ton) yang kemudian turun pada 2023 dan naik kembali di 2024 (90.390 ton). Kinerja jagung sangat dipengaruhi oleh program pemerintah, pasar pakan ternak dan pola kemitraan petani dengan industri. Salah satu kawasan potensial yang dapat terus dikembangkan adalah "cornbelt" di Nagreg dan sekitarnya, yang memiliki keunggulan agroklimat dan historis budidaya jagung. Namun tantangan yang masih dihadapi antara lain akses benih berkualitas, modal kerja petani, dan rantai distribusi yang efisien.

Subsektor hortikultura di Kabupaten Bandung berkembang pesat dan menjadi tulang punggung kedua setelah tanaman pangan. Pada tahun 2024, total produksi hortikultura mencapai 499.806 ton, terdiri dari 424.062 ton sayuran dan 75.744 ton buah-buahan. Sayuran menjadi komoditas paling menonjol karena didukung oleh agroklimat dataran tinggi, terutama di wilayah selatan seperti Pangalengan, Pasirjambu, Ciwidey, Rancabali, Cimaung, dan Cimenyan. Komoditas utama mencakup kol, kentang, cabai, tomat, dan sayuran daun seperti sawi dan bayam.

Pangalengan merupakan produsen sayuran terbesar (167.762 ton), disusul oleh Cimenyan (86.282 ton) dan Cimaung (64.536 ton). Keunggulan kawasan ini tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga pada aspek ketersediaan irigasi teknis, pola tanam intensif, serta akses ke pasar Bandung Raya dan Jabodetabek. Namun tantangan utama dalam hortikultura adalah fluktuasi harga musiman, serangan hama penyakit dan organisme pengganggu tanaman, serta keterbatasan fasilitas pascapanen dan distribusi dingin (cold chain).

Komoditas buah-buahan juga menunjukkan pertumbuhan yang positif. Produksi buah unggulan seperti jeruk, alpukat, jambu biji, dan jambu air tersebar di kecamatan Cimenyan, Pangalengan, Cikancung, dan Paseh. Produksi jeruk menjadi yang tertinggi, mencapai 37.862 ton pada 2024. Sebaran produksi buah ini penting untuk mendukung konsumsi gizi masyarakat, pengembangan pasar buah segar lokal, dan potensi pengolahan seperti sari buah, dodol buah, dan minuman fermentasi. Perluasan kebun buah rakyat juga sejalan dengan tren pariwisata berbasis agroedukasi.

Program yang dapat dikembangkan lebih lanjut antara lain adalah penguatan kawasan hortikultura berbasis komoditas unggulan lokal, pemberian insentif kepada kelompok tani hortikultura berprestasi, dan fasilitasi kemitraan langsung dengan pelaku pasar modern. Selain itu, adopsi teknologi hidroponik dan urban farming juga perlu diperluas, terutama di kecamatan padat penduduk seperti Baleendah dan Bojongsoang.

Subsektor perkebunan di Kabupaten Bandung tidak sebesar tanaman pangan dan hortikultura dalam hal volume, namun memiliki nilai tambah dan identitas khas. Komoditas unggulan meliputi kopi, teh, dan tembakau. Produksi kopi pada tahun 2024 tercatat sebesar 8.567 ton, didominasi oleh kopi arabika dari kawasan Pangalengan, Kertasari, Ciwidey, dan sebagian Ciparay. Kabupaten Bandung menyumbang sekitar 33,98% dari total produksi kopi Jawa Barat, menandakan peran strategisnya dalam pasar kopi spesialti nasional.

Kopi arabika Bandung dikenal karena kualitas rasa dan aroma khasnya. Pengembangan kopi tidak hanya berdampak pada ekonomi petani, tetapi juga mendukung pariwisata berbasis komunitas (agrowisata kopi), industri roasting lokal, dan ekspor mikro. Namun demikian, petani kopi masih menghadapi kendala dalam hal produktivitas per pohon, peremajaan tanaman, dan fluktuasi harga biji kopi hijau. Dukungan teknis dari penyuluh dan koperasi perlu ditingkatkan untuk memperbaiki praktik budidaya dan pascapanen.

Komoditas tembakau, meskipun kecil secara volume (1.938 ton), memiliki keunikan tersendiri karena dikembangkan di 17 kecamatan dan sudah memiliki tiga varietas unggulan yang tersertifikasi nasional, yakni Kayangan, Simojang, dan Himar. Hal ini menjadikan Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan identitas varietas tembakau lokal yang kuat.

Teh, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam data produksi agregat, tetap menjadi bagian dari lanskap perkebunan dataran tinggi. Perlu dilakukan revitalisasi data dan integrasi kemitraan antara petani teh rakyat dan PTPN agar produksi dan kesejahteraan petani teh dapat kembali meningkat. Komoditas perkebunan juga ideal untuk pengembangan program konservasi lahan dan ekosistem, karena umumnya ditanam di lereng-lereng rawan longsor.

Subsektor peternakan memberikan kontribusi signifikan terhadap produksi pangan hewani, keseimbangan gizi masyarakat, dan diversifikasi pendapatan petani. Tahun 2024 mencatat total populasi ternak sebesar 7.127.164 ekor, terdiri atas sapi potong dan perah (48.914 ekor), domba dan kambing (260.959 ekor), serta unggas (ayam ras, ayam buras, itik) lebih dari 6,3 juta ekor. Produksi yang dihasilkan mencakup susu, daging, dan telur.

Sapi perah menjadi komoditas utama dari sektor ini, dengan produksi susu mencapai 63.359 ton per tahun. Sentra utama berada di Pangalengan, diikuti oleh Kertasari, Ciwidey, dan Cilengkrang. Sistem kelembagaan yang kuat (seperti KPBS), dukungan koperasi, dan kemitraan industri susu menjadi faktor penentu keberhasilan wilayah ini. Namun ke depan perlu diperhatikan pertumbuhan  penurunan populasi sapi perah akibat harga susu yang fluktuatif dan keterbatasan peternak muda.

Sapi potong, domba, dan kambing juga menunjukkan tren yang sehat dengan pertumbuhan populasi moderat. Domba garut tetap menjadi ciri khas Kabupaten Bandung, dengan wilayah-wilayah seperti Banjaran, Cangkuang, dan Katapang sebagai sentra pengembangan. Komoditas ini memiliki potensi tinggi untuk dikembangkan dalam kerangka budaya, pariwisata ternak, dan program peternakan rakyat.

Sektor unggas mendominasi volume ternak, dengan populasi ayam pedaging lebih dari 4 juta ekor dan ayam petelur hampir 470 ribu ekor. Wilayah Cikancung, Arjasari, dan Ibun merupakan kantong produksi utama. Namun, sektor unggas sangat sensitif terhadap harga pakan, penyakit seperti AI, dan fluktuasi harga jual ayam. Oleh karena itu, pendekatan biosekuriti dan integrasi sistem rantai dingin sangat dibutuhkan.

2.1.3.2.3 Persentase penurunan kasus penyakit hewan

Rata-rata ketercapaian Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan sebesar 261,70%. Indikator ini mengukur efektivitas intervensi kesehatan hewan dalam menurunkan jumlah kasus penyakit hewan menular strategis (PHMS) seperti PMK, AI, LSD, Brucellosis, dan Rabies. Penurunan kasus menunjukkan keberhasilan deteksi dini, pengendalian, vaksinasi, pelayanan kesehatan hewan, serta penegakan biosekuriti.

Tingginya capaian tersebut menandakan bahwa intervensi kesehatan hewan menunjukkan hasil yang sangat signifikan, bahkan jauh melampaui target. Tingginya capaian 2023 dan 2024 kemungkinan besar berkaitan dengan keberhasilan penanganan penyakit besar (misalnya PMK, LSD, atau AI). Namun, lonjakan capaian ini juga mengindikasikan bahwa target awal terlalu konservatif atau terdapat fluktuasi situasional yang ekstrem. Beberapa faktor pendorong capaian tersebut ditunjang dengan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, yaitu:

- Meningkatnya jumlah penyakit hewan menular strategis yang ditangani, peningkatan ini didorong oleh kemampuan Dinas dan UPT Keswan dalam menanggulangi secara aktif penyakit seperti PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) di sapi potong dan perah, LSD (Lumpy Skin Disease) di sapi, Avian Influenza (AI) di unggas, dan Brucellosis di sapi betina. Penanganan mencakup pelaksanaan vaksinasi, pengobatan lapangan, dan penelusuran kasus secara aktif (active case finding). Koordinasi lintas sektor dan pelibatan penyuluh serta petugas medik paramedic veteriner di lapangan menjadi kunci percepatan respons.
- Terlaksananya pengawasan lalu lintas ternak masuk dan keluar Kabupaten Bandung, melalui Peningkatan pemeriksaan dokumen dan fisik ternak di pintu-pintu distribusi (jalan kabupaten dan pasar hewan), Kolaborasi dengan Polres, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan terutama saat puncak lalulintas ternak pada musim Idul Kurban. untuk menertibkan lalu lintas ternak tanpa dokumen. Efektivitas pengawasan mencegah masuknya ternak sakit dari luar daerah, serta membatasi penyebaran penyakit lintas kecamatan.
- Terlaksananya pelayanan kesehatan hewan melalui Puskeswan dan UPTD, Puskeswan berperan sebagai pusat pelayanan diagnostik, pengobatan, dan vaksinasi. Pelayanan ini didukung oleh Ketersediaan tenaga medik-veteriner dan paramedik veteriner, serta Dukungan logistik seperti vaksin, bahan diagnostik, dan sarana mobilitas lapangan.

- Terlaksananya monitoring penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, dan Halal), baik di RPH maupun unit-unit pemotongan, retail dan pasar.

2.1.3.2.4 Jumlah lembaga pertanian yang maju

Jumlah Lembaga Pertanian yang Maju Dengan rata-rata capaian 101,91%, indikator ini mencerminkan konsistensi pembinaan kelembagaan tani menuju kelompok maju. Kinerja yang konsisten melebihi target menandakan bahwa strategi pembinaan kelompok tani berjalan dengan baik dan berhasil mendorong transformasi kelembagaan. Terhadap target akhir Renstra tahun 2025 (120 kelompok), capaian pada tahun 2024 telah mencapai 95%, menandakan kemajuan yang sangat signifikan. Beberapa faktor pendorong capaian tersebut ditunjang dengan keberhasilan pelaksanaan program kegiatan, yaitu:

- Terlatihnya penyuluh pertanian dalam penilaian kelas kelompok tani, Penyuluh berperan sebagai fasilitator dan evaluator perkembangan kelembagaan. Kompetensi mereka dalam klasifikasi kelompok tani melalui Simluhtan memungkinkan pendampingan yang lebih terfokus dan terarah kepada kelompok potensial untuk naik kelas.
- Tersedianya sarana kelengkapan penyuluhan, Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat kecamatan telah difungsikan sebagai Kostratani (Komando Strategis Pembangunan Pertanian), menyediakan alat bantu penyuluhan, ruang pelatihan, media informasi, dan jaringan koordinasi kelompok tani.
- Terlatihnya petani melalui Sekolah Lapang, Program sekolah lapang (SL-PHT, SL-IKM, SL-PAH) telah menjadi media efektif dalam meningkatkan keterampilan teknis, manajerial, dan kewirausahaan petani. Kelompok tani yang mengikuti sekolah lapang memiliki kecenderungan lebih cepat naik kelas dibanding kelompok biasa.
- Pendampingan kelembagaan oleh penyuluh pertanian, kegiatan fasilitasi legalisasi kelompok, pengadministrasian, penguatan struktur pengurus, dan pendampingan pemasaran, dalam membentuk kemandirian dan kesiapan kelompok untuk naik ke kelas Madya dan Utama.

2.1.3.3 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian SDG’s Tahun 2022-2024

Dinas Pertanian mendukung target pencapaian TPB ke-2 (Tanpa Kelaparan). Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG) ke-2, Dinas

Pertanian Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan yang sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian serta perlindungan terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan.

Salah satu indikator kunci yang menjadi perhatian adalah nilai tambah sektor pertanian per tenaga kerja (rupiah per tenaga kerja), yang mencerminkan efisiensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tambah Pertanian (NTP) Indikator ini menunjukkan berapa besar kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja di sektor pertanian, dan merupakan cerminan dari efisiensi, skala produksi, akses terhadap teknologi, serta nilai komersial dari produk pertanian yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai tambah per tenaga kerja, semakin tinggi pula produktivitas dan potensi kesejahteraan petani. Dalam kerangka TPB 2 (Tanpa Kelaparan), peningkatan nilai tambah pertanian sangat penting untuk mendorong pertanian yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan petani, serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan. Oleh karena itu, Dinas Pertanian secara aktif berperan dalam memfasilitasi adopsi inovasi teknologi, penyediaan sarana produksi yang efisien, serta pengembangan hilirisasi produk untuk memperbesar nilai tambah yang dihasilkan petani.

Selain itu, Dinas Pertanian juga mendukung pencapaian TPB melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi) adalah bagian dari kebijakan nasional dalam rangka perlindungan lahan pertanian, khususnya lahan sawah, agar tidak mengalami alih fungsi yang masif ke penggunaan non-pertanian. Kebijakan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan teknis lainnya. Di daerah, penetapan LSD merupakan bagian penting dari perencanaan tata ruang dan kebijakan ketahanan pangan jangka panjang.

Tabel 2-15. Evaluasi Realisasi TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024

| Kode | Indikator Metadata | Satuan Data Target | Data 2021 (Baseline) | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian | Status | Target | Capaian | Status | Target | Capaian | Status |
| 2.3.1* | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | Rupiah | 53.847.251 | pm | pm | Data Tidak Tersedia | pm | pm | Data Tidak Tersedia | pm | pm | Data Tidak Tersedia |
| 2.4.1 | Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. | Persen | 18,38 | 37,22 | 55,27 | Tercapai | 39,08 | 58,84 | Tercapai | 41,03 | 58,74 | Tercapai |

Sumber Data : RAD TPB/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

2.1.3.4 Penyajian Hasil Evaluasi Capaian dan kinerja yang menjadi tanggung jawab PD pada Renstra tahun 2021-2026 mencakup program, kegiatan, dan sub kegiatan

Dalam periode pelaksanaan Renstra Tahun 2021–2026, kinerja keuangan program Dinas Pertanian Kabupaten Bandung secara umum menunjukkan pertumbuhan yang positif, baik dari sisi pertumbuhan anggaran tahunan maupun realisasi anggarannya. Berdasarkan analisis terhadap data anggaran dan realisasi pada setiap program, pengelolaan keuangan telah diarahkan secara adaptif terhadap kebutuhan pembangunan sektor pertanian dan tantangan kondisi lapangan yang dinamis.

Total rata-rata pertumbuhan anggaran seluruh program selama lima tahun terakhir tercatat sebesar +12,20% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan realisasi mencapai +28,85% per tahun. Kesenjangan positif ini mencerminkan bahwa Dinas Pertanian mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan anggaran di lapangan, ditandai dengan meningkatnya daya serap program prioritas dan efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini tidak terlepas dari dukungan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, keterpaduan dokumen perencanaan (Renstra, Renja, RKA), serta peran aktif kelembagaan pendukung baik sub unit bidang pelaksana, peran serta UPTD, struktural pengadministrasi maupun petugas di lapangan seperti penyuluh atau fungsional lainnya.

Secara sektoral, program-program dengan kontribusi pertumbuhan signifikan terhadap realisasi adalah Program Penyuluhan Pertanian (dengan realisasi tumbuh hampir 99% per tahun) dan Program Sarana Pertanian (+20,81% per tahun). Pertumbuhan ini menandakan konsistensi prioritas daerah dalam memperkuat kelembagaan petani, transfer teknologi budidaya, dan dukungan input produksi. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan pertanian Kabupaten Bandung yang berbasis penguatan kawasan, peningkatan produktivitas, peningkatan kesejahteraan petani dan kemandirian kelompok tani.

Sementara itu, terdapat beberapa program yang menunjukkan pertumbuhan negatif, khususnya Program Perizinan Usaha Pertanian dan Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian. Penurunan ini mencerminkan adanya tantangan dalam implementasi, baik dari sisi dinamika regulasi (terutama perizinan OSS berbasis risiko yang tersentralisasi), maupun sifat kegiatan yang tidak rutin dan sangat

tergantung pada kejadian di lapangan (seperti serangan hama dan bencana iklim).

Dalam hal efisiensi, capaian realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2024, yang mencapai lebih dari 94% terhadap anggaran, menunjukkan perbaikan tata kelola pelaksanaan kegiatan dari tahun ke tahun. Capaian ini diperkuat oleh keberhasilan penyerapan anggaran program pengendalian penyakit hewan strategis dan penguatan kelembagaan petani melalui sekolah lapang, pelatihan, serta fasilitasi klasifikasi kelompok.

Selain itu, Dinas Pertanian juga melakukan evaluasi capaian kinerja. Evaluasi capaian kinerja merupakan proses penilaian terhadap keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung selama periode Renstra 2021–2026. Evaluasi ini tidak hanya mengukur tingkat ketercapaian target yang telah ditetapkan dalam indikator kinerja, tetapi juga menelaah kualitas hasil, efektivitas strategi, serta relevansi capaian terhadap tujuan pembangunan pertanian daerah. evaluasi capaian kinerja bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendalian, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran organisasi. Melalui evaluasi ini, Dinas Pertanian dapat melakukan penyesuaian strategi, peningkatan efektivitas program, serta memperkuat sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan target Renstra 2021–2026 dapat tercapai secara berkelanjutan dan berdampak nyata bagi petani serta masyarakat.

Tabel 2.16. Kinerja dan Realisasi Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2021-2024

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Nilai SAKIP | 80,10% | 80,10% | 100,00% | 82 Poin | 82.96 Poin | 101,17% | 82.30 Poin | 84.00 Poin | 102,07% | 84 Poin | 84.55 Poin | 100,65% |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Index Kepuasan Masyarakat | 0 | 0 | 0,00% | 87 Poin | 82 Poin | 94,25% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen perencanaan dan pelaporan disusun \| Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan capain kinerja dinas | 100% | 100% | 100,00% | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100,00% | 15 Dokumen | 15 Dokumen | 100,00% | 13 dokumen | 14 dokumen | 107,69% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00% | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100,00% | 5 Dokumen | 5 Dokumen | 100,00% | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100,00% | 6 Dokumen | 6 Dokumen | 100,00% | 6 Laporan | 6 Laporan | 100,00% | 6 Laporan | 6 Laporan | 100,00% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah bulan pelayanan keuangan dinas \| Persentase ketersediaan dokumen keuangan yang diselesaikan tepat waktu | 100% | 100% | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2.736 Orang/bulan | 2.321 Orang/bulan | 84,83% | 2736 Orang/bulan | 2445 Orang/bulan | 89,36% |
| | Jumlah bulan gaji dan tunjangan pegawai terpenuhi | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 0 | 0% | |
| | Jumlah Periode Verifikasi terhadap Dokumen Keuangan | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD \| Jumlah Dokumen laporan Keuangan Akhir Tahun yang diselesaikan tepat waktu | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD \| Jumlah Dokumen keuangan yang dilaporkan | 17 laporan | 17 laporan | 100,00% | 17 laporan | 17 laporan | 100,00% | 17 laporan | 17 laporan | 100,00% | 17 Laporan | 17 Laporan | 100,00% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Jumlah bulan pelayanan kepegawaian dinas \| Persentase pemenuhan pelayanan kepegawaian | 100% | 100% | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 12 dokumen | 12 dokumen | 100,00% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00% |
| | Jumlah bulan pelayanan kepegawaian dinas | 0 | 0 | 0,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00% |
| | Jumlah Periode Monitoring Kinerja Pegawai | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 50 orang | 50 orang | 100,00% | 50 Orang | 50 Orang | 100,00% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Bimbingan Teknis Kepegawaian Terlaksana | 0 | 0 | 0,00% | 1 Kali | 1 Kali | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Jumlah bulan pelayanan umum kantor dinas \| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana umum dinas | 100% | 100% | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 Paket | 6 Paket | 100,00% | 6 Paket | 6 Paket | 100,00% | 1 paket | 1 paket | 100,00% | 1 Paket | 1 Paket | 100,00% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 Paket | 16 Paket | 100,00% | 16 Paket | 16 Paket | 100,00% | 1 Paket | 1 Paket | 100,00% | 1 Paket | 1 Paket | 100,00% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 Paket | 3 Paket | 100,00% | 3 Paket | 3 Paket | 100,00% | 1 paket | 1 paket | 100,00% | 1 Paket | 1 Paket | 100,00% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 Paket | 1 Paket | 100,00% | 1 Paket | 1 Paket | 100,00% | 1 paket | 1 paket | 100,00% | 1 Paket | 1 Paket | 100,00% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 29 Paket | 29 Paket | 100,00% | 29 Paket | 29 Paket | 100,00% | 1 paket | 1 paket | 100,00% | 1 Paket | 1 Paket | 100,00% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 0 | 0 | 0,00% | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 100,00% | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |
| | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 30 laporan | 43 laporan | 143,33% | 25 Laporan | 25 Laporan | 100,00% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah orang yang melaksanakan rapat koordinasi/konsultasi ke luar daerah | 148 OK | 137 OK | 92,57% | 430 HOK | 430 HOK | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah barang milik daerah penunjang kantor dinas disediakan \| Persentase pemenuhan pemeliharaan BMD Dinas | 100% | 100% | 100,00% | 5 jenis | 5 jenis | 100,00% | 2 jenis | 2 jenis | 100,00% | 2 jenis | 2 jenis | 100,00% |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 15 Unit | 15 Unit | 100,00% | 24 Unit | 24 Unit | 100,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 Paket | 2 Paket | 100,00% | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% | 100 unit | 100 unit | 100,00% | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 3 Unit | 3 Unit | 100,00% | 3 Unit | 3 Unit | 100,00% | 2 unit | 2 unit | 100,00% | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan kantor dinas \| Persentase pemenuhan jasa penunjang dinas | 100% | 100% | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan/bulan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan/bulan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 12 laporan | 12 laporan | 100,00% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan/bulan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 Bulan | 12 Bulan | 100,00% | 12 laporan | 12 laporan | 100,00% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Jumlah bulan barang milik daerah dipelihara \| Persentase pemenuhan kebutuhan sarana umum dan kepegawaian dinas | 100% | 100% | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 unit | 2 unit | 100,00% | 1 Unit | 1 Unit | 100,00% |
| | Jumlah mobil jabatan yang dipelihara | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 110 unit | 108 unit | 98,18% | 110 Unit | 105 Unit | 95,45% |
| | Jumlah mobil operasional yang dipelihara | 0 | 0 | 0,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 uit | 2 uit | 100,00% | 2 Jenis | 2 Jenis | 100,00% | 2 unit | 2 unit | 100,00% | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% |
| Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor atau | 9 unit | 9 unit | 100,00% | 9 unit | 9 unit | 100,00% | 3 unit | 3 unit | 100,00% | 4 Unit | 4 Unit | 100,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi | | | | | | | | | | | | |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah bulan administrasi keuangan dan operasional kepala daerah dan wakil kepala daerah | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 12 bulan | 12 bulan | 100,00% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 24 orang/bulan | 24 orang/bulan | 100,00% |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Jumlah Populasi komoditi sub sektor peternakan | 0 | 0 | 0,00% | 7029529 ekor | 6729367 ekor | 95,73% | 7,064,676 ekor | 6,755,595 ekor | 95,62% | 7100000 ekor | 7127164 ekor | 100,38% |
| | Produksi komoditi sub sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan) | 0 | 0 | 0,00% | 1302998 ton | 1387683 ton | 106,50% | 1193770 ton | 1237647 ton | 103,68% | 1,187,554 ton | 1355640 ton | 114,15% |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase kelompok tani yang difasilitasi sarana pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 6% | 4,91% | 81,83% | 6.00 persen | 9.43 persen | 157,17% | 6 % | 7.43 % | 123,83% |
| | Jumlah kelompok padi palawija yang diawasi dan dibina dalam penggunaan teknologi tanaman pangan (kelompok) | 183 Kelompok | 97 Kelompok | 53,01% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0% |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 11 Laporan | 11 Laporan | 100,00% |
| | Jumlah sarana pertanian yang terpelihara dan dapat digunakan | 0 | 0 | 0,00% | 30 Unit | 30 Unit | 100,00% | 100 unit | 209 unit | 209,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah SDM yang meningkat pengetahuannya dalam penggunaan sarana pendukung pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 30 Orang | 30 Orang | 100,00% | 20 Orang | 20 Orang | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah dokumen data produksi pertanian dan dokumen fasilitasi alat mesin pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah fasilitasi sarana penunjang budidaya tembakau | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 paket | 1 Paket | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah fasilitas sarana pertanian (Alat Perbengkelan ) | 0 | 0 | 0,00% | 6 | 6 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Jumlah Fasilitasi sarana dan prasarana pasca panen pertanian (DAK Fisik) | 0 | 0 | 0,00% | 7 | 7 | 100,00% | 13 Paket | 13 Paket | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah paket sarana prapanen tersedia (DAK) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 20 Paket | 20 Paket | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Fasilitasi sarana dan prasarana pengolahan pertanian (DAK FISIK) | 0 | 0 | 0,00% | 5 | 5 | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah sarana pertanian yang terpelihara dan dapat digunakan | 0 | 0 | 0,00% | 54.8 Unit | 54.8 Unit | 100,00% | 0 | 0 | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah kelompok tani akabi dibina dalam penggunaan sarana (alsintan) budidaya (kelompok) | 3 Kelompok | 3 Kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah kelompok tani akabi yang mengolah produk bernilai tambah (kelompok) | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah pengembangan budidaya akabi (komoditi) | 3 Kelompok | 1 Kelompok | 33,33% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% |
| | Jumlah fasilitasi sarana pendukung pertanian yang disediakan | 0 | 0 | 0,00% | 7 Jenis | 7 Jenis | 100,00% | 5 Unit | 5 Unit | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah implementasi teknologi sarana pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | | | |
| | Jumlah kelompok tani yang di fasilitasi Sarana Produksi Pertanian, Alsintan Pra Panen, Alsintan Pasca Panen, dan alsintan pengolahan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 61 Kelompok | 61 Kelompok | 100,00% | | | |
| | Fasilitasi sarana benih, pengolahan tanah, dan pompa | 0 | 0 | 0,00% | 160 Paket | 160 Paket | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Terlaksananya proses pendaftaran varietas | 0 | 0 | 0,00% | 4 Varietas | 4 Varietas | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah komoditi unggulan pertanian dikembangkan | 0 | 0 | 0,00% | 4 Komoditi | 4 Komoditi | 100,00% | 3 Komoditi | 3 Komoditi | 100,00% | 3 komoditi | 3 komoditi | 100,00% |
| | Jumlah kelompok terfasilitasi alsintan dalam penanganan inflasi daerah | 0 | 0 | 0,00% | 8 Kelompok | 8 Kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah benih padi lokal berlabel dihasilkan bagi masyarakat (Kg gkg) | 49170 kg | 49170 kg | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah jenis bibit tanaman yang dikembangkan oleh UPT perbibitan pertanian (jenis) | 12 jenis | 10 jenis | 83,33% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00% |
| | Jumlah penerapan tekologi pertanian yang dikembangkan | 0 | 0 | 0,00% | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Fasilitasi Sarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 20 Kelompok | 20 Kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah fasilitasi sarana pasca panen kopi (DID) | 0 | 0 | 0,00% | 15 Unit | 15 Unit | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah luas lahan intensifikasi tanaman pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 10 Ha | 10 Ha | 100,00% | 0 | 0% | |
| | Jumlah Demplot/Demarea/Demfarm Pertanian Unggulan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 100,00% | 0 | 0% | |
| Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah kelompok tani terdampingi dalam penumbuhan/pengembangan korporasi petani kopi | 71 kelompok | 71 kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah komoditi perkebunan unggulan lokal yang dieksplorasi dan dilindungi (jenis) | 1 komoditi | 1 komoditi | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah luas lahan pengembangan komoditi perkebunan unggulan (Hektar) | 12.5 Ha | 31.5 Ha | 252,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah penunjangan Major Project Korporasi Kopi (kegiatan) | 1 kegiatan | 1 kegiatan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 100,00% |
| | Jumlah luas lahan komoditi perkebunan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 20 Ha | 20 Ha | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah luas lahan pengembangan komoditi pertanian unggulan | 0 | 0 | 0,00% | 10 Ha | 10 Ha | 100,00% | 35 Ha | 35 Ha | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah pengembangan tanaman pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 3 Komoditi | 3 Komoditi | 100,00% | 3 Komoditi | 3 Komoditi | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah luas lahan intensifikasi tanaman pertanian (ha) | 0 | 0 | 0,00% | 10 Ha | 10 Ha | 100,00% | 10 Ha | 10 Ha | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah penelitian mendukung pengembangan pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman | Jumlah luasan pengembangan konservasi lahan pertanian (Ha) | 73.02 Ha | 30 Ha | 41,08% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Fasilitasi Bibit dan Pengolah Lahan | 0 | 0 | 0,00% | 18 Paket | 18 Paket | 100,00% | 3 Paket | 3 Paket | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 VUB | 1 VUB | 100,00% | 1 VUB | 1 VUB | 100,00% |
| | Jumlah bibit tanaman bersertifikat yang dihasilkan oleh UPTD | 0 | 0 | 0,00% | 1 Jenis | 1 Jenis | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah komoditi unggulan pertanian yang dilestarikan dan dikembangkan di UPTD | 0 | 0 | 0,00% | 3 Komoditi | 3 Komoditi | 100,00% | 3 Komoditi | 3 Komoditi | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | Jumlah pengawasan obat hewan yang mutu khasiat dan keamananya sesuai ketentuan di lokasi peredaran obat hewan (laporan) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | Jumlah pemeriksaan mutu, khasiat dan keamanan peredaran obat hewan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kelompok ternak yang difasilitasi dalam pengembangan bibit ternak dan hijauan pakan ternak | 0 | 0 | 0,00% | 3,50% | 4,78% | 136,57% | 1,50% | 1,93% | 128,67% | 3.5 % | 3.69 % | 105,43% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Peningkatan luas tanaman buah-buahan, intensifikasi tanaman perkebunan dan pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 75.5 Ha | 75.5 Ha | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah lokasi yang difasilitasi bibit sayuran strategis | 0 | 0 | 0,00% | 31 Lokasi | 31 Lokasi | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah kelompok yang meningkat sarana dan kapasitas kelompok budidaya ternak (kelompok) | 102 Kelompok | 103 Kelompok | 100,98% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 12 laporan | 12 laporan | 100,00% |
| | Fasilitasi Bibit Ternak Pada Kelompok Tani | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 47 Kelompok | 47 Kelompok | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Fasilitasi Bibit Ternak | 0 | 0 | 0,00% | 113 Paket | 110 Paket | 97,35% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah peternak yang mampu menerapkan teknis budidaya ternak yang baik | 0 | 0 | 0,00% | 145 Orang | 145 Orang | 100,00% | 70 orang | 70 orang | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah kelompok difasilitasi pengembangan budidaya puyuh (DID) | 0 | 0 | 0,00% | 4 Kelompok | 4 Kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Fasilitasi pakan ternak dalam upaya penanganan inflasi | 0 | 0 | 0,00% | 51 Kelompok | 58 Kelompok | 113,73% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah fasilitasi pakan ternak yang didistribusikan (DID) | 0 | 0 | 0,00% | 200 Ton | 196 Ton | 98,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah bibit ternak unggul hasil seleksi (komoditi) | 4 komoditi | 0 Komoditi | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 10 Ekor | 10 Ekor | 100,00% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% |
| | Jumlah bibit ternak yang terfasilitasi recording ternak | 0 | 0 | 0,00% | 75 ekor | 75 ekor | 100,00% | 75 ekor | 75 ekor | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Fasilitasi sarana kandang dan pengolahan limbah ternak | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 3 Kelompok | 3 Kelompok | 100,00% | - | 0% | 0,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Jumlah Kelompok ternak yang difasilitasi pasca panen dan pengolahan peternakan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 3 Kelompok | 3 Kelompok | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah laporan monitoring ketersediaan benih/bibit ternak | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah pelaku usaha yang mendapat fasilitasi pembinaan sertifikasi | 0 | 0 | 0,00% | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 0,00% | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Beredar | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 25 Dokumen | 25 Dokumen | 100,00% | 20 Laporan | 24 Laporan | 120,00% |
| | Jumlah benih/bibit ternak unggul yang dihasilkan di UPTD | 100 Ekor | 31 Ekor | 31,00% | 30 Ekor | 9 ekor | 30,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah Produksi Susu di UPTD Pembibitan Ternak | 0 | 0 | 0,00% | 12000 liter | 12416 liter | 103,47% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Tersedia | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 125 Ton | 161 Ton | 128,80% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% |
| | Jumlah Sapi Potong/Perah yang di Inseminasi Buatan | 0 | 0 | 0,00% | 9000 ekor | 18717 ekor | 207,97% | 0 | 0 | 0,00% | 0% | 0% | 0,00% |
| | Jumlah fasilitasi sarana inseminasi buatan | 0 | 0 | 0,00% | 4 Unit | 4 Unit | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah jenis fasilitasi bahan inseminasi buatan | 0 | 0 | 0,00% | 4 Jenis | 4 Jenis | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah kelompok terfasilitasi mesin tetas telur | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 100,00% | 0 | 0% | |
| | Jumlah Sapi Potong/Perah yang di Inseminasi Buatan | 19000 ekor | 18470 ekor | 97,21% | 0 | 0 | 0,00% | 7000 ekor | 10505 ekor | 150,07% | 0 | 0% | |
| Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah sarana perkandangan pembibitan sapi perah | 0 | 0 | 0,00% | 4 Kelompok | 4 Kelompok | 100,00% | 6 Kelompok | 6 Kelompok | 100,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Persentase prasarana unit pelayanan pertanian sebagai simpul inovasi pertanian yang maju | 0 | 0 | 0,00% | 15,00% | 15,00% | 300,00% | 15.00 Persen | 16.66 Persen | 100,00% | 15% | 15% | 100,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Rasio lahan pertanian yang difasilitasi pengembangan prasarana pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 10% | 6,21% | 62,10% | 8.63 Persen | 8.63 Persen | 100,00% | 9,5% | 10,26% | 108,00% |
| | Rasio luas wilayah LP2B yang sudah dipetakan | 0 | 0 | 0,00% | 77% | 100% | 129,87% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah dokumen perkembangan prasarana pendukung pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 13 Dokumen | 10 Dokumen | 76,92% | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00% | 13 Dokumen | 10 Dokumen | 76,92% |
| Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B | Jumlah Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B yang tersusun | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 0 | 0 | 0,00% | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00% |
| Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 3 unit | 3 unit | 100,00% |
| Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura | Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 unit | 1 unit | 100,00% |
| Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 100,00% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00% | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100,00% |
| Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah unit pelayanan teknis dinas yang dibangun/dipelihara | 0 | 0 | 0,00% | 3 Unit | 0 Unit | 0,00% | | | | 7 Unit | 3 Unit | 42,86% |
| | Luas lahan terdampak yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 2950 Ha | 1620 Ha | 54,92% | 2,685 Ha | 2,685 Ha | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 4 Lokasi | 4 Lokasi | 100,00% | 7 Unit | 7 Unit | 100,00% | 34 Unit | 34 Unit | 100,00% | 25 Unit | 35 Unit | 140,00% |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | Jumlah DAM parit yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara | 6 Lokasi | 6 Lokasi | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 4 Unit | 4 Unit | 100,00% |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 6 Lokasi | 6 Lokasi | 100,00% | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% | 3 Unit | 1 Unit | 33,33% | 22 Unit | 18 Unit | 81,82% |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah Jaringan Irigasi Usaha Tani yang Direhabilitasi | 4 Unit | 11 Unit | 275,00% | 22 Unit | 21 Unit | 95,45% | 46 Unit | 46 Unit | 100,00% | 31 Unit | 42 Unit | 135,48% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 100,00% | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% | 1 unit/lokasi | 1 unit/lokasi | 100,00% | 2 Unit | 2 Unit | 100,00% |
| | Persentase status kesehatan hewan ternak | 73% | 77% | 105,48% | 73,05 % | 0% | #VALUE! | 73.05 Persen | 75.42 Persen | 103,24% | 74 % | 84.37 % | 114,01% |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Peningkatan kualitas kesmavet produk asal hewan | 0 | 0 | 0,00% | 85,10% | 0% | #VALUE! | 85,15% | 95,71% | 112,40% | 0 | 0% | 0,00% |
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang ditangani | 0 | 0 | 0,00% | 4 PHMS | 0 | #VALUE! | 4 PHMS | 6 PHMS | 150,00% | 4 PMHS | 6 PMHS | 150,00% |
| Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | Jumlah hewan yang tertangani kesehatannnya | 26000 ekor | 26242 ekor | 100,93% | | | | | | | | | |
| | Jumlah wilayah pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan dan zoonosis | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah hewan yang divaksin (ekor) | 0 | 0 | 0,00% | 15050 ekor | 48433 ekor | 321,81% | 9600 ekor | 11376 ekor | 118,50% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah surveilance penyakit hewan strategis yang dilaksanakan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 80 ekor | 646 ekor | 807,50% | - | 0% | 0,00% |
| | Sosialisi PMK | 0 | 0 | 0,00% | 150 orang | 150 orang | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah ternak yang terlayani kesehatan hewan akibat gangguan reproduksi dan parasiter (ekor) | 7500 ekor | 13401 ekor | 178,68% | | | | | | | | | |
| | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0 | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% |
| | Jumlah kelompok terdampak kasus yang difasilitasi | 0 | 0 | 0,00% | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Wilayah | 1 Wilayah | 100,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Jumlah kontrol populasi/eliminasi hewan berpotensi | 400 ekor | 858 ekor | 214,50% | | | | | | | | | |
| | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% |
| Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Surveillance untuk kompartemen yang terkendali PHMS | 0 | 0 | 0,00% | 1 lokasi | 1 lokasi | 100,00% | 1 lokasi | 1 lokasi | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ternak masuk dan keluar daerah yang terawasi kesehatannya | 0 | 0 | 0,00% | 10200 ekor | 17026 ekor | 166,92% | 10200 ekor | 22711 ekor | 222,66% | 10200 ekor | 13940 ekor | 136,67% |
| Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% |
| | Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 laporan | 1 laporan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah lahan pasar hewan | 0 | 0 | 0,00% | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 100,00% | 2 Lokasi | 2 Lokasi | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah pelayanan penjualan ternak di pasar hewan | 9000 ekor | 10746 ekor | 119,40% | 2000 ekor | 17026 ekor | 860,30% | 9000 ekor | 15493 ekor | 774,65% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/ Kota | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ternak yang terawasi status kesehatannya | 22000 ekor | 34401 ekor | 156,37% | 10000 ekor | 27224 ekor | 272,24% | 17500 ekor | 14505 ekor | 82,89% | - | 0% | 0,00% |
| Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | Jumlah Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan HPM di perbatasan tempat pemeriksaan HPM | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 laporan | 1 laporan | 100,00% |
| Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah pelayanan Puskeswan dilayani | 0 | 0 | 0,00% | 31 Kecamatan | 31 Kecamatan | 100,00% | 31 Kecamatan | 31 Kecamatan | 100,00% | 31 Kecamatan | 31 Kecamatan | 100,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100,00% |
| Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah hewan/ternak yang terlayani kesehatan hewan oleh UPT Puskeswan | 22500 ekor | 63532 ekor | 282,36% | 32000 ekor | 48276 ekor | 150,86% | 32500 ekor | 42046 ekor | 129,37% | - | 0% | 0,00% |
| Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah lokasi yang dimonitor penerapan Produk Asal Hewan (PAH) yang ASUH | 0 | 0 | 0,00% | 8 Lokasi | 8 Lokasi | 100,00% | 8 Lokasi | 8 Lokasi | 100,00% | 8 lokasi | 11 lokasi | 137,50% |
| | Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 laporan | 1 laporan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | Jumlah ternak yang dipotong di UPTD RPH dalam pemenuhan produk hewan yang HAUS \| Jumlah pemotongan hewan ruminansia | 0 | 0 | 0,00% | 8000 Ekor | 8000 Ekor | 100,00% | 5.475 Ekor | 5.485 Ekor | 100,18% | | | |
| | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% |
| Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah produk hewan yang diperiksa | 250 sampel | 250 sampel | 100,00% | 200 Sampel | 200 Sampel | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | Jumlah penerapan persyaratan Teknis Kesmavet di masyarat | 0 | 0 | 0,00% | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100,00% | 1 Kegiatan | 1 Kegiatan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 dokumen | 1 dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% |
| Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah sampel hasil produk ternak yang diuji tingkat halal aman utuh dan sehat | 0 | 0 | 0,00% | 200 Sampel | 200 Sampel | 100,00% | | | | | | |
| Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 100,00% |
| Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | Jumlah Unit Usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Unit Usaha | 1 Unit Usaha | 100,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | Persentase wilayah pertanian yang dikendalikan dan ditanggulangi dampak perubahan lingkungan | 0 | 0 | 0,00% | 3,20% | 1,46% | 45,63% | 1.20 Persen | 1.22 Persen | 101,67% | 0.13 % | 0.13 % | 100,00% |
| Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | Jumlah Luas Lahan yang difasilitasi penanggulangan OPT dan bencana pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 450 Ha | 450 Ha | 100,00% | 200 Ha | 381 Ha | 190,50% | 38 Ha | 38 Ha | 100,00% |
| Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan pengendalian OPT pertanian tanaman pangan dan hortikultura dengan baik | 80 Kelompok | 25 Kelompok | 31,25% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan,Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan | 0 | 0 | 0,00% | 1 Ha | 1 Ha | 100,00% | 5 Ha | 5 Ha | 100,00% | 35 Ha | 35 Ha | 100,00% |
| | Fasilitasi sarana pengendalian OPT | 0 | 0 | 0,00% | 117 Paket | 117 Paket | 100,00% | 4 Paket | 4 Paket | 100,00% | - | 0% | - |
| | Jumlah kelompok yang mampu melaksanakan pengendalian OPT pertanian dengan baik | 0 | 0 | 0,00% | 10 Kelompok | 10 Kelompok | 100,00% | 5 Kelompok | 5 Kelompok | 100,00% | - | 0% | - |
| Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 175 Ha | 175 Ha | 100,00% | 2 Ha | 2 Ha | 100,00% |
| | Jumlah fasilitasi penanganan OPT sebagai upaya menjaga ketersediaan pasokan dalam penanganan inflasi | 0 | 0 | 0,00% | 25 Kelompok | 25 Kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | Jumlah pencegahan dan penanganan gangguan usaha perkebunan (lokasi) | 12 kelompok | 12 kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Ha | 1 Ha | 100,00% | 1 Ha | 1 Ha | 100,00% |
| | Jumlah fasilitasi, penanganan kebakaran lahan dan gangguan usaha tanaman pangan hortikultura dan perkebunan | 0 | 0 | 0,00% | 3 Kali | 3 Kali | 100,00% | 1 Kali | 1 Kali | 100,00% | - | 0% | 0,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Jumlah ternak terlindungi AUTSK | 0 | 0 | 0,00% | 7980 ekor | 7980 ekor | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah luas lahan terlindungi AUTP | 0 | 0 | 0,00% | 49316 Ha | 23093.14 Ha | 46,83% | 0 | 0 | 0,00% | - | 0% | 0,00% |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | Persentase pelaku usaha yang difasilitasi untuk memperoleh perizinan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 100.00 Persen | 100.00 Persen | 100,00% | 100 % | 100 % | 100,00% |
| Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelaku Usaha yang dilayani dan diedukasi dalam izin usaha pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 10 Pelaku Usaha | 10 Pelaku Usaha | 100,00% | 4 pelaku | 4 pelaku | 100,00% | 10 Pelaku usaha | 10 Pelaku Usaha | 100,00% |
| | Jumlah Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 20 Dokumen | 20 Dokumen | 100,00% | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 100,00% | 10 Dokumen | 10 Dokumen | 100,00% |
| Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 6 Dokumen | 10 Dokumen | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| | Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1 Laporan | 1 Laporan | 100,00% | 2 Laporan | 2 Laporan | 100,00% |
| Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | Jumlah Fasilitasi pembinaan dan pengawasan penerapan izin usaha pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100,00% | 2 Kegiatan | 2 Kegiatan | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Persentase peningkatan kelas kelompok Tani | 51,02% | 51,02% | 100,00% | 2,45% | 5,47% | 223,27% | 8.95 Persen | 19.77 Persen | 220,89% | 4.85 % | 28.83 % | 594,43% |
| Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Cakupan penyuluhan pertanian | 31 Kecamatan | 31 Kecamatan | 100,00% | 31 Kecamatan | 31 Kecamatan | 100,00% | 31 Kecamatan | 31 Kecamatan | 100,00% | 31 kecamatan | 31 kecamatan | 100,00% |
| | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 31 Unit | 31 Unit | 100,00% | 31 unit | 31 unit | 100,00% |
| | Jumlah Penyuluh ASN dan Non-ASN yang meningkat pengetahuan teknis | 0 | 0 | 0,00% | 30 Orang | 30 Orang | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 |
| | Jumlah penyuluh pertanian yang dipenuhi kebutuhan administrasi dan operasional | 0 | 0 | 0,00% | 155 Orang | 155 Orang | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah penyuluh yang dibina penanganan PMK | 0 | 0 | 0,00% | 160 Orang | 160 Orang | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Jumlah tersedianya stok bibit sayuran strategis di BPP dalam upaya penanganan inflasi | 0 | 0 | 0,00% | 14 BPP | 14 BPP | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 |
| | Jumlah jenis kegiatan kepenyuluhan tingkat kabupaten, provinsi dan pusat diikuti/dilaksanakan | 4 Kali | 4 Kali | 100,00% | 3 Kali | 3 Kali | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 |
| | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 1.287 Unit | 1.258 Unit | 97,75% | 50 Unit | 50 Unit | 100,00% |
| | Jumlah kelompok dan lembaga tani yang difasilitasi peningkatan kemampuan manajemen organisasi | 50 Kelompok | 50 Kelompok | 100,00% | 6 Kelompok | 6 Kelompok | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah lokasi stunting yang difasilitasi produk peternakan | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 14 Lokasi | 14 Lokasi | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 |
| | Jumlah fasilitasi laporan dan evaluasi kegiatan penyuluhan (laporan) | 12 laporan | 12 laporan | 100,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0% | 0,00% |
| | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 4 Unit | 4 Unit | 100,00% | 30 Unit | 27 Unit | 90,00% | 30 Unit | 30 Unit | 100,00% |
| | Jumlah paket sarana keinformasian BPP tersedia (DAK) | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 26 Paket | 26 Paket | 100,00% | - | 0% | 0 |
| | Jumlah ruang data dan sistem informasi BPP dibangun (DAK) | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 27 Lokasi | 27 Lokasi | 100,00% | - | 0% | 0 |
| Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah jenis sarana dan prasarana penyuluhan pertanian yang tersedia | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 5 Unit | 5 Unit | 100,00% | 27 Unit | 27 Unit | | | 0% | 0,00% |
| | Jumlah kelompok tani yang terlibat dalam pengambangan pemasaran (kelompok) | 6 Kelompok | 1 Kelompok | 16,67% | | | | | | | | | |
| | Jumlah Badan Usaha Milik Petani yang Dibentuk | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 5 Unit | 5 Unit | 100,00% | 1 unit | 1 unit | 100,00% | - | 0% | 0,00% |
| Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | Jumlah jenis komoditi sayuran rawan inflasi yang didistribusikan ke masyarakat (DID) | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 14 Lokasi | 14 Lokasi | 100,00% | 0 | 0 | 0 | - | 0% | 0 |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | Indikator | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| | Jumlah kelembagaan petani yang difasilitasi sarana dan prasarana pengembangan usaha | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 5 Unit | 5 Unit | 100,00% | - | 0% | 0 |
| Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi | 0 Unit | 0 Unit | 0,00% | 3 unit | 3 unit | 100,00% | 3 unit | 3 unit | 100,00% | 3 Unit | 3 Unit | 100,00% |

Sumber : LKIP Distan 2021-2024

Tabel 2.17. Anggaran dan Capaian Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2021-2024

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 39.995.141.806 | 33.964.213.971 | 91,27% | 43.648.791.704 | 39.836.094.625 | 91,27% | 48.011.517.172 | 39.974.977.677 | 83,26% | 47.885.798.178 | 44.624.103.929 | 93,19% |
| Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 139.901.984 | 133.693.290 | 82,66% | 226.393.140 | 187.128.510 | 82,66% | 392.528.201 | 378.288.600 | 96,37% | 234.447.800 | 223.858.740 | 95,48% |
| Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 84.499.964 | 79.578.770 | 94,18% | 158.265.000 | 129.731.900 | 81,97% | 229.757.201,00 | 218.185.600 | 94,96% | 109.558.400 | 99.415.600 | 90,74% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 8.236.380 | 8.236.380 | 100,00 % | 6.241.400 | 6.241.400 | 100,00 % | 7.290.000,00 | 6.880.000 | 94,38% | 4.061.000 | 4.021.000 | 99,02% |
| Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 8.236.380 | 8.236.380 | 100,00 % | 14.481.370 | 14.481.370 | 100,00 % | 14.580.000,00 | 13.804.800 | 94,68% | 8.122.400 | 8.001.600 | 98,51% |
| Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | 6.008.880 | 6.008.880 | 100,00 % | 8.240.000 | 8.239.970 | 100,00 % | 7.290.000,00 | 6.938.800 | 95,18% | 4.032.000 | 4.032.000 | 100,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | 8.236.380 | 8.236.380 | 100,00 % | 14.481.370 | 14.481.370 | 100,00 % | 14.580.000,00 | 13.580.800 | 93,15% | 8.122.000 | 8.058.000 | 99,21% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 24.684.000 | 23.396.500 | 94,78% | 24.684.000 | 13.952.500 | 56,52% | 119.031.000,00 | 118.898.600 | 99,89% | 100.552.000 | 100.330.540 | 99,78% |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 33.615.914.716 | 28.137.807.085 | 83,70% | 36.805.534.502 | 33.372.215.360 | 90,67% | 40.583.246.910 | 32.826.750.174 | 80,89% | 39.433.362.883 | 36.585.200.160 | 92,78% |
| Penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 33.566.137.576 | 28.112.604.637 | 83,75% | 36.774.413.646 | 33.341.774.600 | 90,67% | 40.536.185.710,00 | 32.780.185.374 | 80,87% | 39.204.906.483 | 36.356.964.380 | 92,74% |
| Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 4.297.140 | 4.082.283 | 95,00% | 1.718.856 | 1.718.856 | 100,00 % | 0 | - | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 10.000.000 | 7.492.665 | 74,93% | 5.989.500 | 5.989.404 | 100,00 % | 13.920.000,00 | 13.734.400 | 98,67% | 204.978.800 | 204.862.580 | 99,94% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | 35.480.000 | 13.627.500 | 38,41% | 23.412.500 | 22.732.500 | 97,10% | 33.141.200,00 | 32.830.400 | 99,06% | 23.477.600 | 23.373.200 | 99,56% |
| Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 13.748.616 | 6.904.296 | 50,22% | 122.705.591 | 105.583.179 | 86,05% | 81.183.900 | 78.842.100 | 97,12% | 315.152.000 | 249.829.800 | 79,27% |
| Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian | 5.663.616 | 2.496.098 | 44,07% | 25.616.885 | 23.724.797 | 92,61% | 18.184.900,00 | 18.168.100 | 99,91% | 4.800.000 | 4.796.800 | 99,93% |
| Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 8.085.000 | 4.408.198 | 54,52% | 29.244.706 | 20.238.382 | 69,20% | 15.370.000,00 | 13.045.000 | 84,87% | 22.490.000 | 22.404.000 | 99,62% |
| Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 47.629.000,00 | 47.629.000 | 100,00% | 287.862.000 | 222.629.000 | 77,34% |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | 752.098.890 | 710.625.565 | 94,49% | 912.334.073 | 855.586.130 | 93,78% | 977.011.600 | 937.100.167 | 95,91% | 808.590.500 | 776.057.032 | 95,98% |
| Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 18.905.650 | 9.831.640 | 52,00% | 20.000.000 | 19.675.300 | 98,38% | 19.926.200,00 | 19.926.200 | 100,00% | 12.909.500 | 12.909.500 | 100,00% |
| Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 435.853.800 | 418.302.375 | 95,97% | 562.764.073 | 556.622.230 | 98,91% | 573.243.300,00 | 570.311.613 | 99,49% | 450.379.300 | 444.559.500 | 98,71% |
| Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | 117.654.400 | 107.491.150 | 91,36% | 75.250.000 | 74.899.200 | 99,53% | 93.859.800,00 | 92.304.675 | 98,34% | 86.021.700 | 69.989.000 | 81,36% |
| Penyediaan Bahan Logistik Kantor | 7.741.700 | 7.720.500 | 99,73% | 40.000.000 | 39.160.000 | 97,90% | 53.950.000,00 | 50.549.300 | 93,70% | 56.852.000 | 56.573.500 | 99,51% |
| Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 106.592.200 | 104.989.900 | 98,50% | 106.600.000 | 104.652.400 | 98,17% | 92036300 | 78.487.300 | 85,28% | 70.154.000 | 67.963.927 | 96,88% |
| Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 3.150.000 | 3.150.000 | 100,00 % | 3.150.000 | 3.095.000 | 98,25% | 3.150.000,00 | 2.932.800 | 93,10% | 3.146.000 | 2.952.000 | 93,83% |
| Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 62.201.140 | 59.140.000 | 95,08% | 104.570.000 | 57.482.000 | 54,97% | 140.846.000,00 | 122.588.279 | 87,04% | 129.128.000 | 121.109.605 | 93,79% |
| Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 298708050 | 274543782 | 91,91% | 461.642.838 | 438.518.400 | 94,99% | 683.538.900 | 672.005.000 | 98,31% | 1.089.793.300 | 1.084.444.998 | 99,51% |
| Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 461.520.000,00 | 450.825.000 | 97,68% | 883.853.500 | 883.545.000 | 99,97% |
| Pengadaan Mebel | 261.388.050 | 246.223.782 | 94,20% | 378.822.838 | 374.084.300 | 98,75% | 153.988.900,00 | 153.150.000 | 99,46% | 144.739.800 | 140.400.000 | 97,00% |
| Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 37.320.000 | 28.320.000 | 75,88% | 82.820.000 | 64.434.100 | 77,80% | 68.030.000,00 | 68.030.000 | 100,00% | 61.200.000 | 60.499.998 | 98,86% |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 3.726.607.800 | 3.457.635.305 | 92,78% | 4.043.040.715 | 3.909.341.848 | 96,69% | 4.400.539.640 | 4.250.031.825 | 96,58% | 5.084.256.170 | 4.878.174.222 | 95,95% |
| Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1.500.000 | 1.200.000 | 80,00% | 2.930.000 | 2.926.000 | 99,86% | 2.206.127,00 | 2.170.000 | 98,36% | 1.500.000 | 1.500.000 | 100,00% |
| Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 554.257.800 | 338.361.177 | 61,05% | 484.317.000 | 381.022.792 | 78,67% | 541.192.713,00 | 435.212.145 | 80,42% | 723.439.810 | 578.989.206 | 80,03% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 3.170.850.000 | 3.118.074.128 | 98,34% | 3.555.793.715 | 3.525.393.056 | 99,15% | 3.857.140.800,00 | 3.812.649.680 | 98,85% | 4.359.316.360 | 4.297.685.016 | 98,59% |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1.448.161.750 | 1.243.004.648 | 85,83% | 1.077.140.845 | 967.721.198 | 89,84% | 893.468.021 | 831.959.811 | 93,12% | 874.666.342 | 804.540.143 | 91,98% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | 47.000.000 | 32.521.348 | 69,19% | 57.000.000 | 47.640.807 | 83,58% | 19.332.000,00 | 17.243.037 | 89,19% | 4.350.000 | 3.940.420 | 90,58% |
| Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 391.947.500 | 234.435.240 | 59,81% | 279.400.000 | 186.352.891 | 66,70% | 390.101.000,00 | 332.081.153 | 85,13% | 354.733.700 | 319.649.251 | 90,11% |
| Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | 20.000.000 | 18.449.500 | 92,25% | 46.390.000 | 42.163.500 | 90,89% | 24.880.000,00 | 24.818.000 | 99,75% | 25.540.000 | 25.481.000 | 99,77% |
| Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya | 989.214.250 | 957.598.560 | 96,80% | 694.350.845 | 691.564.000 | 99,60% | 459.155.021,00 | 457.817.621 | 99,71% | 490.042.642 | 455.469.472 | 92,94% |
| Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 45.529.183 | 21.998.834 | 48,32% |
| Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 45.529.183 | 21.998.834 | 48,32% |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | 18.029.095.555 | 16.359.228.918 | 90,74% | 26.738.266.381 | 24.352.497.972 | 91,08% | 21.196.138.333 | 20.340.838.608 | 95,96% | 30.794.841.711 | 28.842.441.114 | 93,66% |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | 4.836.720.000 | 4.418.784.775 | 91,36% | 11.147.516.000 | 10.362.863.492 | 92,96% | 10.516.451.742 | 10.199.246.170 | 96,98% | 12.523.130.086 | 11.240.646.541 | 89,76% |
| Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas Teknologi dan Spesifik Lokasi | 4.279.763.800 | 3.896.828.875 | 91,05% | 3.848.120.000 | 3.537.662.720 | 91,93% | 8.226.044.742,00 | 8.042.814.470 | 97,77% | 9.258.094.386 | 8.316.254.611 | 89,83% |
| Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 556.956.200 | 521.955.900 | 93,72% | 7.299.396.000 | 6.825.200.772 | 93,50% | 2.290.407.000,00 | 2.156.431.700 | 94,15% | 3.265.035.700 | 2.924.391.930 | 89,57% |
| Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | 8.336.104.097 | 7.286.346.571 | 87,41% | 7.870.578.000 | 7.127.922.558 | 90,56% | 4.498.488.310 | 4.117.910.998 | 91,54% | 11.087.849.120 | 10.533.678.358 | 95,00% |
| Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 794.241.000 | 789.720.300 | 99,43% | 2.130.136.372 | 1.947.088.200 | 91,41% | 773.544.300,00 | 694.413.250 | 89,77% | 2.429.091.802 | 2.323.436.500 | 95,65% |
| Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 3.267.331.600 | 2.757.230.971 | 84,39% | 5.217.841.628 | 4.715.632.653 | 90,38% | 3.343.594.010,00 | 3.042.810.448 | 91,00% | 8.246.303.600 | 7.800.038.094 | 94,59% |
| Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | 4.274.531.497 | 3.739.395.300 | 87,48% | 522.600.000 | 465.201.705 | 89,02% | 381.350.000,00 | 380.687.300 | 99,83% | 412.453.718 | 410.203.764 | 99,45% |
| Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | | 9.681.000,00 | 9.680.800 | 100,00% | - | 0 | 0,00% |
| Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 9.681.000,00 | 9.680.800 | 100,00% | - | 0 | 0,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 4.856.271.458 | 4.654.097.572 | 95,84% | 7.720.172.381 | 6.861.711.922 | 88,88% | 6.171.517.281 | 6.014.000.640 | 97,45% | 7.183.862.505 | 7.068.116.215 | 98,39% |
| Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 3.285.666.751 | 3.182.870.100 | 96,87% | 5.951.483.331 | 5.254.910.985 | 88,30% | 3.300.840.095,00 | 3.262.549.410 | 98,84% | 4.878.740.795 | 4.790.251.825 | 98,19% |
| Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | 207.524.000 | 206.290.497 | 99,41% | 223.750.000 | 216.603.147 | 96,81% | 291.988.500,00 | 284.582.500 | 97,46% | 565.262.110 | 555.206.990 | 98,22% |
| Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | 1.094.068.207 | 1.016.428.325 | 92,90% | 1.111.000.000 | 999.423.400 | 89,96% | 892.696.686,00 | 853.182.250 | 95,57% | 1.077.679.700 | 1.071.879.700 | 99,46% |
| Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | 269.012.500 | 248.508.650 | 92,38% | 433.939.050 | 390.774.390 | 90,05% | 1.685.992.000,00 | 1.613.686.480 | 95,71% | 662.179.900 | 650.777.700 | 98,28% |
| PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | 14.795.910.830 | 11.907.638.582 | 80,48% | 11.837.254.761 | 10.805.575.256 | 91,28% | 26.832.698.499 | 26.017.618.928 | 96,96% | 35.687.141.326 | 33.760.460.781 | 94,60% |
| Pengembangan Prasarana Pertanian | 3.721.853.000 | 3.339.503.000 | 89,73% | 959.820.000 | 903.665.000 | 94,15% | 1.045.666.500 | 953.643.900 | 91,20% | 8.044.444.048 | 7.270.553.064 | 90,38% |
| Penyusunan Peta Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/ LP2B | 511.944.000 | 498.128.350 | 97,30% | 252.800.000 | 201.223.000 | 79,60% | 152.800.000,00 | 152.537.900 | 99,83% | | | |
| Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian lainnya | 2.018.776.500 | 1.660.293.150 | 82,24% | 385.000.000 | 381.937.000 | 99,20% | 565.871.500,00 | 500.965.000 | 88,53% | 96.195.069 | 84.093.000 | 87,42% |
| Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 3.586.050.000 | 3.301.179.020 | 92,06% |
| Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 4.050.350.000 | 3.577.929.694 | 88,34% |
| Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | 1.191.132.500 | 1.181.081.500 | 99,16% | 322.020.000 | 320.505.000 | 99,53% | 326.995.000,00 | 300.141.000 | 91,79% | 311.848.979 | 307.351.350 | 98,56% |
| Pembangunan Prasarana Pertanian | 10.224.883.718 | 7.744.138.722 | 75,74% | 9.993.497.000 | 9.029.338.620 | 90,35% | 25.787.031.999 | 25.063.975.028 | 97,20% | 27.642.697.278 | 26.489.907.717 | 95,83% |
| Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Embung Pertanian | 1.255.780.000 | 775.780.000 | 61,78% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | 820.694.000 | 736.454.000 | 89,74% | 784.000.000 | 778.844.500 | 99,34% | 6.904.216.000,00 | 6.686.876.000 | 96,85% | 7.538.129.858 | 7.332.639.004 | 97,27% |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan DAM Parit | 1.030.424.000 | 785.424.000 | 76,22% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 740.400.000 | 740.380.000 | 100,00% |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | 358.756.250 | 357.900.422 | 99,76% | 5.173.147.000 | 4.312.650.720 | 83,37% | 9.521.160.000,00 | 9.064.005.228 | 95,20% | 8.338.979.568 | 8.183.463.306 | 98,14% |
| Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | 3.334.034.400 | 1.770.626.500 | 53,11% | 3.511.350.000 | 3.429.584.600 | 97,67% | 9.153.776.000,00 | 9.106.446.000 | 99,48% | 8.517.108.852 | 8.193.326.725 | 96,20% |
| Pembangunan, Rehabilitasi, dan Pemeliharaan Pintu Air | 120.854.000 | 85.854.000 | 71,04% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | 659.451.968 | 637.468.300 | 96,67% | 0 | 0 | 0,00% | 207.879.999,00 | 206.647.800 | 99,41% | 2.508.079.000 | 2.040.098.682 | 81,34% |
| Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemelihaan Balai Penyuluh di kecamatan serta sarana pendukungnya | 2.644.889.100 | 2.594.631.500 | 98,10% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | 849.174.112 | 823.996.860 | 97,04% | 883.937.761 | 872.571.636 | 98,71% | 0 | - | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak | 849.174.112 | 823.996.860 | 97,04% | 883.937.761 | 872.571.636 | 98,71% | 0 | - | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% |
| PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | 2.478.923.183 | 2.449.280.596 | 98,80% | 8.184.839.892 | 7.703.621.919 | 94,12% | 3.040.043.309 | 2.916.673.157 | 95,94% | 3.220.946.935 | 2.962.979.395 | 91,99% |
| Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | 1.108.313.382 | 1.103.700.410 | 99,58% | 5.214.947.610 | 4.791.873.278 | 91,89% | 546.333.500 | 502.957.740 | 92,06% | 575.647.600 | 511.899.506 | 88,93% |
| Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis | 443.542.682 | 441.499.500 | 99,54% | 456.210.450 | 413.544.440 | 90,65% | 271.317.500,00 | 250.007.740 | | | | |
| Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | 110.500.000 | 110.332.650 | 99,85% | 3.001.016.160 | 2.688.144.442 | 89,57% | 58.716.000,00 | 57.461.700 | 97,86% | 120.178.500 | 118.851.908 | 98,90% |
| Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | 554.270.700 | 551.868.260 | 99,57% | 1.757.721.000 | 1.690.184.396 | 96,16% | 216.300.000,00 | 195.488.300 | 90,38% | 246.920.000 | 197.945.305 | 80,17% |
| Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 208.549.100 | 195.102.293 | 93,55% |
| Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | 637007000 | 619893416 | 97,31% | 397.316.530 | 395.299.751 | 99,49% | 336.794.800 | 335.224.280 | 99,53% | 174.394.530 | 173.017.280 | 99,21% |
| Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 60.517.330 | 60.017.030 | 99,17% |
| Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan | 467.650.000 | 452.444.006 | 96,75% | 247.316.530 | 246.141.751 | 99,52% | 191.378.800,00 | 189.808.480 | 99,18% | - | 0 | 0,00% |
| Pemeriksaan Kesehatan Hewan dan Produk Hewan di Perbatasan Lintas Daerah Kabupaten/Kota | 169.357.000 | 167.449.410 | 98,87% | 150.000.000 | 149.158.000 | 99,44% | 145.416.000,00 | 145.415.800 | 100,00% | - | 0 | 0,00% |
| Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 113.877.200 | 113.000.250 | 99,23% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | 493415001 | 485499240 | 98,40% | 1.373.040.722 | 1.338.045.065 | 97,45% | 1.512.939.709 | 1.435.937.637 | 94,91% | 2.092.097.293 | 1.908.236.854 | 91,21% |
| Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 49.250.000,00 | 48.929.050 | 99,35% | 0 | 0 | 0,00% |
| Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 493.415.001 | 485.499.240 | 98,40% | 1.373.040.722 | 1.338.045.065 | 97,45% | 1.463.689.709,00 | 1.387.008.587 | 94,76% | 2.092.097.293 | 1.908.236.854 | 91,21% |
| Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | 240.187.800 | 240.187.530 | 100,00 % | 1.289.722.830 | 1.268.596.055 | 98,36% | 643.975.300 | 642.553.500 | 99,78% | 378.807.512 | 369.825.755 | 97,63% |
| Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan | 0 | 0 | 0,00% | 864.535.030 | 844.514.825 | 97,68% | 420.175.600,00 | 419.020.750 | | | | |
| Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 240.187.800 | 240.187.530 | 100,00 % | 240.187.800 | 240.187.530 | 100,00 % | 50.893.000,00 | 50.892.800 | 100,00% | 124.513.000 | 123.649.000 | 99,31% |
| Penetapan Pemenuhan Persyaratan Teknis | 0 | 0 | 0,00% | 50.000.000 | 49.490.000 | 98,98% | 81.166.700,00 | 81.166.000 | | | | |
| Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 0 | 0 | 0,00% | 135.000.000 | 134.403.700 | 99,56% | 91.740.000,00 | 91.473.950 | 99,71% | 188.998.512 | 182.412.893 | 96,52% |
| Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 11.246.000 | 11.191.162 | 99,51% |
| Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 0 | - | 0,00% | 54.050.000 | 52.572.700 | 97,27% |
| PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN | 1.521.232.000 | 1.310.579.451 | 86,15% | 3.800.825.529 | 3.313.271.701 | 87,17% | 2.610.403.750 | 2.505.821.890 | 95,99% | 985.200.900 | 925.057.000 | 93,90% |
| Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota | 1.521.232.000 | 1.310.579.451 | 86,15% | 3.800.825.529 | 3.313.271.701 | 87,17% | 2.610.403.750 | 2.505.821.890 | 95,99% | 985.200.900 | 925.057.000 | 93,90% |
| Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 1.234.562.000 | 1.049.540.201 | 85,01% | 2.525.540.489 | 2.085.003.661 | 82,56% | 827.297.750,00 | 760.552.690 | 91,93% | 405.500.000 | 358.396.000 | 88,38% |
| Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 1.688.222.000,00 | 1.659.351.000 | 98,29% | 491.764.300 | 485.362.000 | 98,70% |
| Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan | 286.670.000 | 261.039.250 | 91,06% | 1.275.285.040 | 1.228.268.040 | 96,31% | 94.884.000,00 | 85.918.200 | 90,55% | 87.936.600 | 81.299.000 | 92,45% |
| PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN | 0 | 0 | 0,00% | 1.455.558.610 | 1.255.331.205 | 86,24% | 920.190.248 | 829.582.295 | 90,15% | 487.210.300 | 453.682.823 | 93,12% |
| Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0,00% | 1.455.558.610 | 1.255.331.205 | 86,24% | 920.190.248 | 829.582.295 | 90,15% | 487.210.300 | 453.682.823 | 93,12% |
| Penilaian Kelayakan dan Pemberian Pertimbangan Teknis Izin Usaha Pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 125.000.000 | 118.522.500 | 94,82% | 147.773.200,00 | 127.161.200 | 86,05% | 93.866.300 | 83.749.300 | 89,22% |
| Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian | 0 | 0 | 0,00% | 1.330.558.610 | 1.136.808.705 | 85,44% | 772.417.048,00 | 702.421.095 | 90,94% | 393.344.000 | 369.933.523 | 94,05% |

| Program, Kegiatan, Subkegiatan | 2021 | | | 2022 | | | 2023 | | | 2024 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian | Target | Realisasi | Capaian |
| PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | 1.881.537.636 | 1.802.123.734 | 95,78% | 6.674.372.000 | 6.241.761.851 | 93,52% | 32.786.443.040 | 32.425.675.830 | 98,90% | 33.072.222.100 | 32.922.399.076 | 99,55% |
| Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | 1.881.537.636 | 1.802.123.734 | 95,78% | 6.674.372.000 | 6.241.761.851 | 93,52% | 32.786.443.040 | 32.425.675.830 | 98,90% | 33.072.222.100 | 32.922.399.076 | 99,55% |
| Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | 473.604.536 | 456.771.934 | 96,45% | 1.041.864.000 | 942.023.475 | 90,42% | 571.435.340,00 | 570.355.950 | 99,81% | 874.037.100 | 860.616.200 | 98,46% |
| Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | 235.045.000 | 232.044.800 | 98,72% | 1.897.981.220 | 1.866.566.514 | 98,34% | 26.585.077.900,00 | 26.580.354.300 | 99,98% | 31.756.990.200 | 31.621.645.870 | 99,57% |
| Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | 575.765.000 | 565.664.000 | 98,25% | 2.872.075.980 | 2.852.588.162 | 99,32% | 5.401.874.800,00 | 5.049.765.780 | 93,48% | 396.455.600 | 395.570.206 | 99,78% |
| Pembentukan Badan Usaha Milik Petani | 597.123.100 | 547.643.000 | 91,71% | 862.450.800 | 580.583.700 | 67,32% | 79.075.000,00 | 79.070.000 | 99,99% | - | 0 | 0,00% |
| Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota | 0 | 0 | 0,00% | 0 | 0 | 0,00% | 148.980.000,00 | 146.129.800 | 98,09% | 44.739.200 | 44.566.800 | 99,61% |
| Total | 78.701.841.010 | 67.793.065.252 | 86,14% | 102.339.908.877 | 93.508.154.529 | 91,37% | 135.397.434.351 | 125.011.188.385 | 92,33% | 152.133.361.450 | 144.491.124.118 | 94,98% |

Sumber : LKIP Distan 2021-2024

Tabel 2.18. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian

| URAIAN | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Anggaran | Realisasi |
| Nilai AKIP | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 39.995.141.806 | 43.648.791.704 | 48.011.517.172 | 47.885.798.178 | 48.838.638.964 | 33.964.213.971 | 39.836.094.625 | 39.974.977.677 | 44.624.103.929 | | 84,92 | 91,27 | 83,26 | 93,19 | 0,00 | 5,12 | 9,53 |
| Jumlah Produksi Komoditi Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian | 18.029.095.555 | 26.738.266.381 | 21.196.138.333 | 30.794.841.711 | 20.706.879.538 | 16.359.228.918 | 24.352.497.972 | 20.340.838.608 | 28.842.441.114 | | 90,74 | 91,08 | 95,96 | 93,66 | 0,00 | 3,52 | 20,81 |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 14.795.910.830 | 11.837.254.761 | 26.832.698.499 | 35.687.141.326 | 13.253.897.024 | 11.907.638.582 | 10.805.575.256 | 26.017.618.928 | 33.760.460.781 | | 80,48 | 91,28 | 96,96 | 94,60 | 0,00 | -2,71 | 41,53 |
| Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian | 1.521.232.000 | 3.800.825.529 | 2.610.403.750 | 985.200.900 | 3.061.448.750 | 1.310.579.451 | 3.313.271.701 | 2.505.821.890 | 925.057.000 | | 86,15 | 87,17 | 95,99 | 93,90 | 0,00 | 19,11 | -10,96 |

| URAIAN | Anggaran Pada Tahun ke- | | | | | Realisasi Anggaran pada Tahun ke- | | | | | Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun Ke - | | | | | | Rata-rata Pertumbuhan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Anggaran | Realisasi |
| Program Perizinan Usaha Pertanian | 0 | 1.455.558.610 | 920.190.248 | 487.210.300 | 666.521.040 | 0 | 1.255.331.205 | 829.582.295 | 453.682.823 | | 0 | 86,24 | 90,15 | 93,12 | 0,00 | -22,92 | -39,88 |
| Persentase Penurunan Kasus Penyakit Hewan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 2.478.923.183 | 8.184.839.892 | 3.040.043.309 | 3.220.946.935 | 2.831.566.814 | 2.449.280.596 | 7.703.621.919 | 2.916.673.157 | 2.962.979.395 | | 98,80 | 94,12 | 95,94 | 91,99 | 0,00 | 3,38 | 6,55 |
| Jumlah Lembaga Pertanian Yang Maju | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Program Penyuluhan Pertanian | 1.881.537.636 | 6.674.372.000 | 32.786.443.040 | 33.072.222.100 | 36.179.774.400 | 1.802.123.734 | 6.241.761.851 | 32.425.675.830 | 32.922.399.076 | | 95,78 | 93,52 | 98,90 | 99,55 | 0,00 | 109,41 | 163,37 |
| JUMLAH | 78.701.841.010 | 102.339.908.877 | 135.397.434.351 | 152.133.361.450 | 125.538.726.530 | 67.793.065.252 | 93.508.154.529 | 125.011.188.385 | 144.491.124.118 | | 86,14 | 91,37 | 92,33 | 94,98 | 0,00 | 12,38 | 28,69 |

Sumber Data: Distan 2021-2024

### 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pertanian

Kelompok sasaran layanan merupakan elemen kunci yang menjadi prioritas utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung. Sasaran utama layanan tersebut yaitu petani serta pelaku usaha pertanian lainnya yang memegang peranan strategis dalam penguatan ketahanan pangan, peningkatan produktivitas pertanian, dan kesejahteraan petani secara umum.

Dalam periode Renstra ini, fokus utama diarahkan pada pemberdayaan kelompok tani melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian, pemberian akses yang lebih luas terhadap teknologi dan inovasi pertanian, serta penguatan infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi, jalan usaha tani, dan fasilitas pascapanen. Sasaran layanan ini juga mencakup pelaku usaha pertanian yang terlibat dalam rantai nilai produk pertanian, mulai dari tahap produksi hingga pemasaran, dengan tujuan memperkuat posisi tawar petani di pasar dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian.

Selain itu, perhatian khusus diberikan kepada petani milenial, strategi ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi generasi muda di bidang pertanian serta memastikan peran aktif dalam mendukung pertumbuhan sektor pertanian yang inklusif dan berkelanjutan.

Sasaran layanan kepada petani diarahkan untuk petani tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Sebagian besar petani tersebut tergabung dalam Kelompok Tani (Poktan) yang tersebar di seluruh kecamatan, yang kemudian terorganisasi dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di tingkat desa dan kecamatan. Data tahun terakhir menunjukkan terdapat ribuan kelompok tani aktif yang menjadi mitra strategis Dinas Pertanian dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah, seperti distribusi sarana produksi, pelatihan teknis, hingga pelaksanaan program kartu tani dan pemutakhiran RDKK. Selain Poktan dan Gapoktan, kelembagaan ekonomi petani juga berkembang dalam bentuk koperasi tani, kelompok usaha bersama (KUB), dan korporasi petani yang mulai dibina di beberapa wilayah melalui pendekatan model pertanian berbasis kawasan. Salah satu contoh kelembagaan unggulan adalah Koperasi Peternak Sapi

Bandung Selatan (KPBS Pangalengan) dan Kelompok Tani Sarinah Organik Ciparay, yang telah berhasil membangun kemitraan dengan pasar terstruktur dan memperoleh sertifikasi nasional. Keberadaan kelembagaan seperti ini menjadi bukti bahwa petani di Kabupaten Bandung memiliki potensi kemandirian usaha apabila didukung dengan tata kelola yang profesional dan akses pasar yang jelas.

Dengan demikian, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung menetapkan kelompok sasaran layanan ini sebagai pilar utama dalam perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan guna tercapainya pertanian yang mandiri, berkelanjutan, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### 2.1.5 Mitra Dinas Pertanian dalam Pemberian Pelayanan

#### 2.1.5.1 Lembaga Legislatif (DPRD)

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki peran strategis dalam mendukung layanan Dinas Pertanian melalui tiga fungsi utama, yaitu legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Dalam fungsi legislasi, DPRD terlibat dalam pembentukan peraturan daerah yang berkaitan dengan pembangunan pertanian, seperti regulasi mengenai perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B), distribusi pupuk bersubsidi, serta penguatan ketahanan pangan daerah. Dalam fungsi penganggaran, DPRD menetapkan dan menyetujui alokasi anggaran program dan kegiatan Dinas Pertanian dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), termasuk mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui pokok-pokok pikiran hasil reses yang diarahkan pada penguatan kesejahteraan petani. Sementara itu, dalam fungsi pengawasan, DPRD melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program dan realisasi anggaran kegiatan pertanian, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program bantuan pertanian yang dijalankan oleh perangkat daerah. Dengan demikian, DPRD menjadi mitra penting dalam menjembatani aspirasi petani, mendorong penguatan anggaran sektor pertanian, serta memastikan bahwa setiap layanan publik yang diberikan oleh Dinas Pertanian benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.

2.1.5.2 Instansi Pemerintah

a. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPERIDA)

BAPPERIDA merupakan mitra utama Dinas Pertanian dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah, baik tahunan maupun lima tahunan. Melalui koordinasi dengan BAPPERIDA, Dinas Pertanian dapat menyusun program dan kegiatan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah. Selain itu, BAPPERIDA berperan penting dalam menyinkronkan indikator kinerja sektor pertanian dengan indikator makro daerah, serta melaksanakan evaluasi kinerja pembangunan. Fungsi penelitian dan pengembangan yang dimiliki BAPPERIDA juga mendukung program inovasi pertanian, sehingga memperkuat perencanaan berbasis bukti dan kebutuhan lapangan.

b. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki keterkaitan erat dengan Dinas Pertanian dalam hal penyediaan, distribusi, dan pengendalian stok pangan, termasuk cadangan pangan pemerintah. Kerja sama ini penting untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga komoditas pangan strategis, terutama dalam situasi rawan pangan dan inflasi. Sinergi kedua dinas ini memastikan bahwa hasil produksi pertanian dapat memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat secara berkelanjutan.

c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)

Dinas PUPR berperan dalam pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian seperti jaringan irigasi, embung, dan jalan usaha tani. Infrastruktur tersebut sangat vital untuk mendukung produktivitas dan efisiensi usaha tani. Selain itu, Dinas PUPR juga memiliki peran dalam sinkronisasi tata ruang wilayah melalui penyusunan dan pengawasan pelaksanaan RTRW, termasuk perlindungan terhadap Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

d. Dinas Lingkungan Hidup (DLH)

Keterlibatan Dinas Lingkungan Hidup sangat penting dalam memastikan keberlanjutan kegiatan pertanian melalui pengawasan terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas pertanian dan peternakan. DLH juga mendukung program pertanian ramah lingkungan,

termasuk dalam hal pengelolaan limbah dan penggunaan pestisida yang berisiko terhadap ekosistem. Kerja sama ini memastikan praktik pertanian berkelanjutan dan sesuai prinsip pembangunan hijau.

e. Dinas Komunikasi dan Informasi (Diskominfo)

Diskominfo memiliki peran mendukung pengelolaan informasi dan data pertanian melalui penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi. Melalui kerja sama ini, Dinas Pertanian dapat memanfaatkan aplikasi pelayanan publik digital untuk penyuluhan, pelaporan, maupun pengaduan masyarakat. Selain itu, Diskominfo membantu menyebarluaskan informasi program pertanian secara transparan dan cepat ke masyarakat.

f. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil)

Disdukcapil memiliki peran penting dalam mendukung validasi data penerima manfaat program pertanian melalui pemanfaatan data kependudukan berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK). Hal ini penting dalam penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan mencegah tumpang tindih data. Data kependudukan juga digunakan dalam pemetaan wilayah berbasis demografi untuk perencanaan intervensi kebijakan pertanian.

g. Inspektorat Daerah

Inspektorat merupakan mitra pengawasan dan pembinaan internal Dinas Pertanian, yang bertugas memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat juga mendampingi dalam penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), sehingga pengelolaan anggaran dan aset dalam program pertanian lebih akuntabel dan minim risiko penyimpangan.

h. Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)

BKAD memiliki fungsi penting dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah yang digunakan oleh Dinas Pertanian. Dalam hal ini, BKAD mengoordinasikan penyusunan anggaran pertanian, proses pengadaan barang/jasa, serta pelaporan keuangan. Selain itu, BKAD juga memastikan tertib administrasi penatausahaan alat dan mesin pertanian sebagai barang milik daerah.

i. Badan Pusat Statistik (BPS)

BPS merupakan mitra strategis Dinas Pertanian dalam penyediaan data dan informasi statistik sektoral yang akurat dan terpercaya. Data dari BPS,

seperti Nilai Tukar Petani (NTP), indeks produksi, dan hasil Survei Pertanian Antar Sensus (SUTAS), menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan, evaluasi kinerja, serta pelaporan pembangunan pertanian. Kerja sama ini juga meliputi pelaksanaan survei bersama dan validasi data sektoral.

2.1.5.3 Lembaga Pendidikan dan Penelitian

Masyarakat petani, pelaku usaha agribisnis, konsumen, serta komunitas lokal secara langsung terlibat dalam menerima berbagai layanan seperti penyuluhan, bantuan sarana produksi, pelatihan, dan fasilitasi pemasaran. Tidak hanya itu, masyarakat juga berkontribusi melalui partisipasi aktif dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), pengisian survei kepuasan layanan, serta pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program. Peran masyarakat sebagai sumber aspirasi, pengawas partisipatif, dan mitra kolaboratif sangat penting dalam memastikan bahwa kebijakan dan program pertanian yang disusun benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, keterlibatan DPRD dan masyarakat menjadi pilar penting dalam mewujudkan tata kelola pelayanan pertanian yang partisipatif, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan petani serta ketahanan pangan daerah.

2.1.5.4 Lembaga Keuangan dan Perbankan

Perbankan yang tersebar di wilayah kab. Berperan dalam fasilitasi akses permodalan bagi petani dan pelaku usaha pertanian. Lembaga perbankan memiliki keterkaitan yang erat dan strategis sebagai mitra bagi Dinas Pertanian dalam mendukung pembangunan sektor pertanian daerah. Salah satu bentuk keterkaitan tersebut terwujud dalam penyediaan akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha agribisnis yang menjadi sasaran program-program Dinas Pertanian. Melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) Pertanian, perbankan dapat menyalurkan pembiayaan berbunga rendah yang selaras dengan program pemberdayaan petani, pengembangan korporasi petani, dan peningkatan kapasitas usaha tani yang dirancang oleh dinas. Secara keseluruhan, hubungan kemitraan antara lembaga perbankan dan Dinas Pertanian bersifat saling menguatkan, di mana Dinas Pertanian sebagai lembaga teknis memfasilitasi pembinaan dan pendampingan petani, sementara perbankan menyediakan dukungan finansial dan akses layanan

keuangan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor pertanian di daerah. Kolaborasi ini menjadi kunci dalam mendorong transformasi pertanian ke arah yang lebih modern, terintegrasi, dan berkelanjutan.

2.1.5.5 Dunia Usaha dan swasta

Dunia usaha dan pihak swasta memiliki keterkaitan yang sangat penting sebagai mitra strategis bagi Dinas Pertanian dalam mendorong pembangunan pertanian yang berdaya saing dan berkelanjutan. Keterlibatan mereka menjadi katalisator bagi transformasi sektor pertanian, khususnya dalam aspek hilirisasi, pemasaran, adopsi teknologi, dan penguatan kelembagaan petani. Kemitraan ini umumnya terjalin melalui pola public-private partnership (PPP), kerja sama korporasi petani, maupun kolaborasi dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Sebagai mitra, dunia usaha berperan dalam menyediakan pasar yang lebih pasti bagi hasil produksi petani, melalui skema kemitraan kontraktual (contract farming) antara petani dengan perusahaan pengolahan atau distributor produk pertanian. Dinas Pertanian berperan sebagai fasilitator dan pembina agar kemitraan berjalan adil dan saling menguntungkan. Melalui pola ini, petani mendapat jaminan harga, kepastian pembelian, serta bimbingan teknis, sementara dunia usaha memperoleh pasokan bahan baku berkualitas secara berkelanjutan.

Selain itu, sektor swasta juga berperan dalam penerapan inovasi dan teknologi pertanian. Perusahaan penyedia sarana produksi pertanian (pupuk, benih, pestisida, alat mesin pertanian) menjadi mitra penting dalam program diseminasi teknologi dan demonstrasi plot (demplot). Dinas Pertanian dapat bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk mengadakan pelatihan, bimbingan teknis, serta promosi penggunaan teknologi tepat guna kepada petani. Sinergi ini mempercepat modernisasi pertanian dan peningkatan produktivitas.

Dari sisi kelembagaan ekonomi, dunia usaha juga dapat bermitra dengan koperasi tani atau kelompok usaha bersama (KUB) dalam bentuk investasi, pendampingan manajerial, maupun pembentukan offtaker dalam sistem rantai nilai agribisnis. Dinas Pertanian berperan dalam mendorong

terbentuknya kelembagaan petani yang kuat dan memenuhi standar kemitraan, serta melakukan fungsi pengawasan agar hubungan kemitraan berjalan sesuai regulasi.

2.1.5.6 Organisasi dan kelembagaan petani

Organisasi dan kelembagaan petani memegang peranan yang sangat strategis sebagai mitra utama Dinas Pertanian dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan berbagai program pembangunan pertanian di daerah. Kelembagaan ini mencakup berbagai bentuk seperti Kelompok Tani (Poktan), Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), Lembaga Ekonomi Petani (LEP), hingga organisasi berbasis keanggotaan seperti himpunan dan asosiasi petani. Keterlibatan kelembagaan ini tidak hanya sebatas sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai pelaksana dan penentu keberhasilan pembangunan pertanian yang berbasis masyarakat dan berkelanjutan.

Kelompok Tani (Poktan) merupakan kelembagaan petani pada tingkat paling dasar yang dibentuk atas dasar kesamaan kondisi agroekosistem, sosial ekonomi, dan kepentingan bersama dalam usaha tani. Poktan berfungsi sebagai wahana pembelajaran, kerja sama usaha, dan penguatan posisi tawar petani dalam mengakses berbagai layanan pertanian. Sebagai mitra Dinas Pertanian, Poktan menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan berbagai kegiatan seperti penyaluran bantuan sarana produksi, penyuluhan pertanian, pelatihan teknis, hingga pengumpulan data produksi dan kebutuhan petani. Kinerja Poktan yang aktif dan tertib administrasi menjadi syarat penting dalam keberhasilan program-program pertanian di tingkat tapak.

Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) merupakan kelembagaan di tingkat yang lebih tinggi yang menghimpun beberapa Poktan dalam satu wilayah desa atau kecamatan. Gapoktan memiliki peran penting dalam menyinergikan kegiatan antar Poktan dan meningkatkan skala usaha tani melalui pengelolaan program berbasis kawasan atau klaster komoditas. Dinas Pertanian kerap menjadikan Gapoktan sebagai mitra pelaksana dalam kegiatan prioritas seperti penyaluran pupuk bersubsidi, pengembangan korporasi petani, pengelolaan alat dan mesin pertanian (alsintan), serta

pendampingan terhadap pembiayaan usaha tani dari lembaga perbankan. Gapoktan juga memainkan peran penting dalam mengkoordinasikan sistem penyuluhan partisipatif, serta memfasilitasi kerja sama antara petani dengan pelaku usaha atau lembaga pemerintah lainnya.

Kelompok Wanita Tani (KWT) merupakan organisasi petani yang terdiri dari perempuan-perempuan di wilayah perdesaan yang memiliki peran strategis dalam aspek ketahanan pangan keluarga, ekonomi rumah tangga, serta pemberdayaan perempuan di sektor pertanian. KWT sering dilibatkan Dinas Pertanian dalam kegiatan diversifikasi pangan, pemanfaatan lahan pekarangan, pengolahan hasil pertanian, serta program Pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman). Keterlibatan KWT memperkuat dimensi sosial ekonomi pembangunan pertanian, terutama dalam mendorong peran aktif perempuan dalam pertanian keluarga dan wirausaha mikro di perdesaan.

Lembaga Ekonomi Petani (LEP) merupakan bentuk kelembagaan lanjutan dari Gapoktan atau Koperasi Tani yang mengelola kegiatan usaha secara kolektif dan berorientasi bisnis. Dinas Pertanian mendorong terbentuknya LEP sebagai bagian dari strategi korporatisasi petani untuk memperkuat posisi petani dalam rantai nilai agribisnis. LEP berperan dalam pengelolaan unit usaha seperti penggilingan padi, gudang hasil, pemasaran bersama, penyediaan input pertanian, dan layanan jasa alsintan. Dengan kapasitas manajerial dan keuangan yang lebih mapan, LEP menjadi mitra potensial dalam menjalin kemitraan dengan offtaker, lembaga keuangan, dan pelaku industri pengolahan. Dalam berbagai program nasional seperti Food Estate, Smart Farming, dan Sistem Integrasi Pertanian, keberadaan LEP menjadi elemen kunci untuk mendorong petani naik kelas dan mandiri secara ekonomi.

Selain bentuk kelembagaan di atas, terdapat pula organisasi berbasis keanggotaan seperti Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI), Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA), Himpunan Peternak Domba dan Kambing Indonesia (HPDKI), serta asosiasi komoditas (misalnya Asosiasi Hortikultura, Asosiasi Petani Kopi, dan lain-lain). Organisasi-organisasi ini memiliki peran dalam menjembatani komunikasi antara petani dengan pemerintah, memperjuangkan aspirasi petani di tingkat regional maupun nasional, serta

menjadi mitra strategis dalam penyusunan kebijakan publik. Dinas Pertanian dapat melibatkan organisasi ini dalam forum konsultasi publik, pembahasan regulasi, serta sosialisasi kebijakan pertanian. Selain itu, organisasi ini sering kali menjadi pelopor dalam inovasi kelembagaan dan konsolidasi usaha tani.

## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Pertanian

### 2.2.1 Penelaahan RPJMN 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menjadi langkah strategis dalam memastikan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan nasional dengan prioritas daerah. RPJMN 2025–2029 menetapkan visi pembangunan nasional "Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045". Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan dalam Delapan Asta Cita.

Penelaahan RPJMN ini memberikan landasan penting dalam merumuskan program dan kegiatan yang responsif terhadap isu nasional, sekaligus menjawab kebutuhan spesifik wilayah. Penelaahan RPJMN bukan sekadar bentuk administratif, melainkan merupakan langkah nyata dalam memastikan pembangunan pertanian yang terintegrasi, terarah, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan petani serta ketahanan pangan daerah. Dukungan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung terhadap misi Asta Cita RPJMN tahun 2025-2029 yaitu:

Tabel 2.19. Penelaahan RPJMN Asta Cita terhadap Urusan Pertanian

| Asta Cita | Bidang Urusan | Outcome Prioritas | Program |
|---|---|---|---|
| Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru. | Urusan Bidang Pertanian | Meningkatnya Produksi Pertanian | 1)Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian<br>2)Program Penyediaan Pengembangan Prasarana Pertanian |

Sumber Data : RPJMD Kab Bandung, 2025-2029

Dinas Pertanian Kabupaten Bandung berperan strategis dalam mendukung Misi Asta Cita kedua, khususnya pada aspek swasembada dan ketahanan pangan. Kabupaten Bandung sebagai salah satu lumbung pangan di Jawa Barat memiliki kontribusi signifikan terhadap pasokan beras, hortikultura, dan komoditas strategis lainnya. Dukungan konkret diantaranya melalui pelaksanaan program-program tersebut, diantaranya dengan membangun kegiatan berupa: pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian melalui bantuan jalan usaha tani, jaringan irigasi, dan prasarana lainnya. Selain itu, bantuan terhadap peningkatan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan berupa pemberian benih/bibit dan pemberian bantuan alat mesin pertanian. Penguatan kelembagaan petani juga melalui pembinaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani merupakan aktor utama dalam ekosistem produksi pangan. Pembinaan dan penguatan kelembagaan ini oleh Dinas Pertanian Kabupaten Bandung memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian swasembada pangan nasional.

### 2.2.2 Penelaahan RPJMD Kabupaten Bandung 2025-2029

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perumusan visi dan misi RPJMD tidak hanya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga harus mengacu pada RPJPD guna memastikan kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. visi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dan RPJP Nasional Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

Tabel 2.20. Visi RPJPD, RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat

| RPJP Nasional (Tahun 2025-2045) | RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045) | RPJPD Kabupaten (Tahun 2025-2045) |
|---|---|---|
| Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan | Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia | Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan |

Sumber Data: RPJPN & RPJPD

Untuk merealisasikan visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, telah dirumuskan delapan misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas;
2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal;
3. Transformasi tata kelola;
4. Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah;
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter;
6. Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata;
7. Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif;
8. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung juga mempertimbangkan Arah Kebijakan RPJP, dengan keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 2.21. RPJP Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kab Bandung

| RPJP Nasional (Tahun 2025-2045) | RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045) | RPJPD Kabupaten Bandung (Tahun 2025-2045) |
|---|---|---|
| Tahap I (2025-2029) Penguatan Transformasi | Tahap I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola | Tahap I (2025-2029) Penguatan fondasi melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola |

Sumber Data: RPJPN & RPJPD

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pembangunan Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

"Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas"

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak

Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem

Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif

yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi

Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur berarti setiap pembangunan dilakukan secara terpadu, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, dan kebutuhan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara lingkungan hidup yang terjaga dan infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa ketertiban umum selalu terjaga. Program-program

keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalisir potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung.

Sejalan dengan Misi tersebut, pelaksanaan pelayanan (Tupoksi) Dinas Pertanian menunjang Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

Dinas Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian Misi ke-2 Kabupaten Bandung, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Sektor pertanian merupakan pilar utama penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari usaha tani. Melalui pengembangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, Dinas Pertanian mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas lokal yang tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat struktur ekonomi kerakyatan.

Di sisi lain, pertanian juga memainkan peran krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Ketersediaan pangan lokal yang cukup, aman, dan bergizi menjadi dasar bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Pertanian mengembangkan berbagai program untuk memperkuat kapasitas produksi, meminimalkan risiko gangguan pasokan melalui sistem pertanian yang adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan sektor pertanian bukan hanya menjadi tolok ukur kemajuan subsektor tertentu, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

2.2.3 Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bandung merupakan dokumen perencanaan spasial yang menetapkan arah dan pola pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk jangka menengah dan panjang, serta menjadi acuan utama dalam penyusunan kebijakan sektoral, termasuk sektor pertanian. Melalui pendekatan terpadu, penataan ruang Kabupaten Bandung diarahkan untuk menciptakan kawasan yang kompetitif, layak huni, dan berwawasan lingkungan, sekaligus menjawab isu-isu strategis di tingkat regional.

Penataan Ruang adalah suatu sistem perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan Penataan Ruang. Tujuan Penataan Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2024-2044 adalah mewujudkan Daerah sebagai bagian KSN Perkotaan Cekungan Bandung dengan lingkungan hidup berkualitas tinggi melalui pengoptimalan potensi sumber daya sektor industri, pertanian, dan pariwisata yang berwawasan lingkungan dan berdaya saing serta memenuhi seluruh kriteria permukiman layak huni. Kebijakan Penataan Ruang wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada terdiri dari kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Daerah, kebijakan pengembangan Pola Ruang wilayah Daerah, kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Daerah, kebijakan pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Kebijakan pengembangan Struktur Ruang wilayah Daerah terdiri atas:
a. kebijakan pengembangan pusat kegiatan pelayanan pada pusat permukiman secara terpadu, berhierarki, dan saling berhubungan untuk mendukung kedudukan dan peran Daerah sebagai pusat kegiatan yang menjadi penyeimbang perkembangan kawasan perkotaan inti di kawasan Metropolitan.
b. kebijakan pemantapan dan pengembangan kualitas prasarana transportasi perkotaan dan regional yang terpadu dan berkelanjutan dengan transportasi lokal sesuai fungsi pusat kegiatan; dan

c. kebijakan pemantapan dan pengembangan sistem sarana prasarana wilayah yang terpadu

Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:

a. kebijakan pengembangan kawasan lindung: kebijakan perlindungan terhadap kawasan lindung melalui pengendalian, pelestarian, pemeliharaan dan pemulihan

b. kebijakan pengembangan kawasan budi daya: kebijakan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tanpa mengesampingkan pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat sektor industri, pertanian, dan pariwisata.

Strategi untuk melaksanakan kebijakan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budi daya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tanpa mengesampingkan pelestarian kawasan lindung untuk memperkuat sektor industri, pertanian, dan pariwisata

a. mengendalikan secara khusus pengembangan di kawasan budi daya, khususnya KBU, KBS, dan Kawasan Resapan Air;

b. mengembangkan kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan dengan cara intensifikasi berdasarkan kesesuaian lahannya;

c. mengembangkan Kawasan Permukiman yang terpadu di pusat-pusat kegiatan dengan mempertimbangkan kriteria layak huni baik di perkotaan maupun perdesaan;

d. mengoptimalkan Pemanfaatan Ruang secara kompak dan vertikal pada pusat permukiman di kawasan perkotaan dengan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung;

e. mengembangkan kegiatan industri yang ramah lingkungan dan membatasi kegiatan industri tertentu; dan

f. menyediakan pemenuhan kebutuhan Ruang Terbuka Hijau pada Kawasan Perkotaan paling sedikit seluas 30% (tiga puluh persen) dari luas Kawasan Perkotaan, meliputi paling sedikit 20% (dua puluh persen) Ruang Terbuka Hijau publik dan paling sedikit 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau privat.

Kawasan Pertanian merupakan salah satu Kawasan Budi Daya. Kawasan Pertanian terdiri dari Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan.

a. Kawasan Tanaman Pangan, memiliki luas kurang lebih 22.582 (dua puluh dua ribu lima ratus delapan puluh dua) hektare berada di: Kecamatan Arjasari, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Bojongsoang, Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Ciwidey, Kecamatan Ibun, Kecamatan Katapang, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Majalaya, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Margahayu, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Rancaekek, Kecamatan Solokanjeruk, dan Kecamatan Soreang.
b. Kawasan Hortikultura, memiliki luas kurang lebih 13.482 (tiga belas ribu empat ratus delapan puluh dua) hektar berada di Kecamatan Arjasari, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cileunyi, Kecamatan Cimaung, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Ibun, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Margaasih, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Paseh, Kecamatan Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Soreang.
c. Kawasan Perkebunan, memiliki luas kurang lebih 39.445 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh lima) hektar berada di Kecamatan Arjasari, Kecamatan Baleendah, Kecamatan Banjaran, Kecamatan Cangkuang, Kecamatan Cicalengka, Kecamatan Cikancung, Kecamatan Cilengkrang, Kecamatan Cileunyi,Kecamatan Cimaung, Kecamatan Cimenyan, Kecamatan Ciparay, Kecamatan Ciwidey,Kecamatan Ibun, Kecamatan Kertasari, Kecamatan Kutawaringin, Kecamatan Nagreg, Kecamatan Pacet, Kecamatan Pameungpeuk, Kecamatan Pangalengan, Kecamatan Paseh, Kecamatan

Pasirjambu, Kecamatan Rancabali, Kecamatan Soreang, dan Kawasan perkebunan lainnya berupa Taman Keanekaragaman Hayati Desa Nagrog di Kecamatan Cicalengka

d. Kawasan Peternakan, memiliki luas kurang lebih 166 (seratus enam puluh enam) hektar berada di Kecamatan Arjasari, Cikancung, Ciparay, Ibun, Pangalengan, dan Kecamatan Lainnya yang diarahkan.
e. Kawasan Tanaman Pangan, ditetapkan sebagai KP2B seluar 17.709 (tujuh belas ribu tujuh ratus sembilan) hektare.

Perwujudan Kawasan Pertanian terdiri atas

a. Pembangunan dan pengembangan prasarana pertanian;
b. Perwujudan Kawasan Tanaman Pangan meliputi:

- pengembangan Kawasan Tanaman Pangan;
- pengembangan perusahaan pengumpul dan distribusi bagi pertanian tanaman pangan;
- peningkatan akses distribusi produksi pertanian tanaman pangan;
- pengendalian organisme pengganggu tumbuhan tanaman pangan;
- penyusunan peta potensi lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B;
- pengelolaan lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian pangan berkelanjutan/KP2B dan lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan/ LCP2B;
- belanja modal tanah (pembebasan lahan LP2B);
- penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan lainnya;
- penyediaan pangan berbasis sumber daya lokal.

c. Perwujudan Kawasan Hortikultura meliputi:

- mempertahankan kawasan potensi hortikultura;
- pengendalian organisme pengganggu tumbuhan hortikultura;
- optimalisasi produksi buah-buahan melalui pengembangan kawasan sentra;
- optimalisasi produksi sayuran melalui pengembangan kawasan sentra

d. perwujudan Kawasan Perkebunan meliputi:

- pengembangan Kawasan Perkebunan;
- pengendalian organisme pengganggu tumbuhan perkebunan;

- pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Kawasan Perkebunan;
- pengembangan sentra perkebunan besar negara komoditas kina;
- pengembangan fasilitas sentra produksi dan pemasaran pada pusat kegiatan ekonomi;
- pemeliharaan fasilitas sentra produksi dan pemasaran;
- pengelolaan daya tarik wisata kabupaten; dan
- pengelolaan destinasi pariwisata berkelanjutan kabupaten

e. perwujudan Kawasan Peternakan meliputi:

- pengembangan ternak sapi;
- pengembangan kawasan ternak kambing;
- pengembangan ternak domba;
- pengembangan kawasan ternak unggas;
- penyediaan dan pemeliharaan rumah potong hewan (RPH, TPU, RPU); dan
- pengendalian dan pengawasan pemanfaatan Kawasan Peternakan dan kegiatan peternakan.

2.2.4 Analisis terhadap Dokumen Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Sesuai dengan Pelayanan Dinas Pertanian

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) menjadi instrumen penting dalam memastikan kebijakan pembangunan yang berkelanjutan, sejalan dengan tujuan global *Sustainable Development Goals (SDGs).* Di tengah tantangan global seperti perubahan iklim, degradasi lingkungan, dan ketimpangan sosial, KLHS berperan dalam menilai dampak kebijakan sejak tahap perencanaan agar tidak merusak ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Dengan pendekatan ini, KLHS tidak hanya relevan secara nasional, tetapi juga berkontribusi pada pencapaian target SDGs. Sejak tahun 2016, Tujuan Pembangunan Berkelanjutan *(Sustainable Development Goals/*SDGs*)* 2015-2030 secara resmi menggantikan *Millenium Development Goals (*MDGs*)* yang telah berakhir. SDGs merupakan kelanjutan dari MDGs, tetapi dengan cakupan yang lebih luas. Jika MDGs hanya memiliki 8 tujuan, SDGs menetapkan 17 tujuan dengan 169 target yang dirancang untuk lebih responsif terhadap kebutuhan global. SDGs berfokus pada tiga aspek utama

pembangunan berkelanjutan, yaitu pertumbuhan ekonomi, inklusi sosial, dan perlindungan lingkungan. SDGs disusun sebagai kelanjutan dari keberhasilan MDGs dan mencakup lebih banyak aspek kehidupan. Pelaksanaannya didasarkan pada lima pilar utama, yaitu manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Untuk mencapai target pada tahun 2030, ditetapkan 17 tujuan global sebagai pedoman utama.

Pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung secara substansial berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di tingkat lokal. Dinas Pertanian mendukung target pencapaian TPB ke-2 (Tanpa Kelaparan). Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDG) ke-2, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan yang sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian serta perlindungan terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan.

Tabel 2.22. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Dinas Pertanian

| No | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) | Relevansi dengan Sektor Pertanian | Intervensi program/kegiatan yang dapat dilaksanakan |
|---|---|---|---|
| 1 | TPB 2 – Tanpa Kelaparan | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) 2: Tanpa Kelaparan (Zero Hunger) bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan gizi yang baik, serta mendorong pertanian berkelanjutan. Tujuan ini menekankan pentingnya sistem pangan yang tangguh dan produktif, peningkatan pendapatan petani kecil, serta perlindungan terhadap sumber daya pertanian yang mendukung keberlanjutan produksi pangan. Dalam konteks pembangunan daerah, khususnya di sektor pertanian, TPB 2 menjadi dasar | Program pengembangan kawasan pangan, distribusi pangan lokal, peningkatan produktivitas, perlindungan lahan sawah dilindungi |

| No | Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) | Relevansi dengan Sektor Pertanian | Intervensi program/kegiatan yang dapat dilaksanakan |
|---|---|---|---|
| | | perumusan kebijakan dan program strategis guna menjamin akses pangan yang cukup, aman, dan bergizi bagi seluruh masyarakat. | |

Sumber Data :Dinas Pertanian, 2025

### 2.2.5 Permasalahan Pelayanan Dinas Pertanian

Permasalahan merupakan suatu kondisi atau situasi yang dianggap tidak memuaskan atau mengganggu, yang memerlukan solusi atau tindakan untuk diselesaikan. Permasalahan dapat merujuk pada ketidaksempurnaan atau ketidakpuasan terhadap kondisi yang ada, baik berupa kebutuhan yang belum terpenuhi, tantangan yang dihadapi, atau masalah yang perlu diselesaikan. Permasalahan dapat muncul karena adanya kesenjangan antara harapan atau tujuan yang ingin dicapai dengan realitas yang ada.

Perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis merupakan tahapan yang penting karena berpengaruh langsung terhadap visi, misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan pada tahapan selanjutnya. Perumusan persoalan dan permasalahan tidak hanya didasarkan pada dokumen perencanaan dan literatur terkait, namun juga sangat mementingkan kontribusi pemerintah daerah Kabupaten Bandung dalam berdiskusi langsung. Hal ini tidak hanya menambah referensi terhadap permasalahan yang ada, namun juga memberikan konfirmasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau pelaksana terhadap relevansi dan potensi permasalahan yang akan terjadi di masa depan. Penyusunan perumusan permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung didasari pada daftar indikator dari berbagai sumber peraturan maupun literatur, pengembangan data kondisi lapangan dan hasil evaluasi kinerja.

Permasalahan pembangunan bukan hanya pada tingkat kinerja pembangunan saat ini yang berada di bawah target dan dinilai belum memadai. Melainkan tingkat kinerja pembangunan yang sudah baik, akan tetapi perlu ditingkatkan agar dapat melayani masyarakat secara optimal di masa yang akan datang dan tercermin dalam kondisi yang diperlukan. Dalam

rangka mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka diperlukan perumusan yang tepat terkait analisis permasalahan pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung. Berdasarkan kondisi kabupaten bandung beberapa tahun terakhir, maka permasalahan pembangunan utama di Kabupaten Bandung salah satunya adalah Tantangan dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Pangan. Rendahnya produktivitas dan daya saing tenaga kerja menjadi tantangan utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu, sektor pertanian dan jasa kesehatan masih perlu dioptimalkan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ketahanan pangan juga menjadi perhatian penting, mengingat produksi pangan lokal harus ditingkatkan untuk memastikan ketersediaan pangan yang cukup dan berkelanjutan. Sejalan dengan Misi 2 Bupati Bandung, pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan akan didorong melalui penguatan sektor unggulan seperti industri pengolahan dan pariwisata. Tingkat partisipasi angkatan kerja juga perlu ditingkatkan, terutama bagi tenaga kerja berpendidikan rendah dan penyandang disabilitas. Selain itu, ketimpangan kesejahteraan ekonomi keluarga perlu dikurangi dengan kebijakan yang mendukung ekonomi kreatif serta meningkatkan kolaborasi dan integrasi ekonomi. Dengan pendekatan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemandirian daerah, diharapkan Kabupaten Bandung dapat menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih kuat dan tangguh di masa depan.

Selain itu, berdasarkan hasil analisis permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan pertanian sesuai dengan kondisi objektif daerah seperti yang telah disajikan pada uraian bab gambaran umum. Permasalahan dalam dokumen Rancangan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2030 ini menggunakan hasil evaluasi capaian Renstra 2021–2025 sebagai sumber informasi, analisis indikator prioritas daerah, dinamika peraturan nasional dan provinsi, serta tantangan pembangunan pertanian yang bersifat aktual, potensial, dan strategis. Isu-isu ini dirumuskan dengan pendekatan tematik, holistik, integratif, dan spasial (THIS), serta mengacu pada arahan RPJMD Kabupaten Bandung dan rencana pembangunan nasional-provinsi.

Berdasarkan kondisi potensi pertanian beberapa tahun terakhir, maka permasalahan utama pembangunan lingkup Dinas Pertanian Kabupaten Bandung adalah sebagai berikut:

- Menurunnya produktivitas pertanian
- Luas lahan baku sawah dan lahan pertanian berkurang
- Kurang optimalnya kelembagaan, pelayanan dan perlindungan petani
- Keterbatasan infrastruktur yang menunjang budidaya pertanian
- Nilai Tambah Produk Pertanian Masih Rendah

2.2.5.1 Tantangan peningkatan produktivitas pertanian dan penyediaan pangan lokal

Kabupaten Bandung sebagai lumbung pangan strategis di wilayah selatan Jawa Barat menghadapi tantangan serius dalam menjaga keberlanjutan produksi dan ketahanan pangan lokal. Sebagaimana Ranwal RPJMD, ketersediaan daya dukung penyediaan pangan merupakan permasalahan pokok yang dihadapi oleh Kabupaten Bandung. Meskipun secara historis wilayah ini menjadi lumbung pangan dan sentra produksi ternak, berbagai kendala struktural dan teknis menghambat peningkatan produktivitas. Akses terhadap sarana produksi seperti benih unggul, pupuk bersubsidi, dan alat mesin pertanian masih terbatas. Selain itu, tingkat adopsi teknologi pertanian presisi oleh petani masih rendah. Sektor peternakan juga belum berkembang optimal, baik dari sisi populasi ternak unggulan, pemanfaatan lahan, maupun pengendalian penyakit hewan menular strategis. Permasalahan ini menunjukkan bahwa sistem produksi belum mampu menjawab tantangan regenerasi petani, efisiensi usaha tani, serta perubahan iklim dan pasar.

Tabel 2.23. Tantangan Peningkatan produktivitas Pertanian dan Penyediaan Pangan Lokal

| Urutan Prioritas | Tantangan Peningkatan produktivitas Pertanian dan Penyediaan Pangan Lokal |
|---|---|
| 1 | Menurunnya hasil panen padi, hortikultura, dan belum optimalnya produksi ternak potong dan perah |
| 4 | Kesenjangan produktivitas antar kecamatan dan subsektor |
| 2 | Ketergantungan petani pada metode konvensional, serta rendahnya kolaborasi antara peternakan dan tanaman (mixed farming) |

| | |
|---|---|
| 3 | Meningkatnya risiko penyakit strategis hewan akibat pergerakan ternak dan lemahnya biosekuriti |
| 5 | Terbatasnya fasilitas pembibitan, ketersediaan hijauan pakan ternak dan infrastruktur perkandang |

Sumber: Dinas Pertanian, 2025

### 2.2.5.2 Tantangan Perubahan pemanfaatan lahan Pertanian Terus Meningkat.

Lahan pertanian, terutama sawah irigasi, terus berkurang akibat konversi menjadi permukiman dan industri. Kecenderungan ini menjadi ancaman keberlanjutan ketahanan pangan dan bertentangan dengan kebijakan LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) beserta kebijakan turunannya Perlindungan terhadap Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Sebagaimana Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan jaminan ketersediaan lahan pertanian yang dapat menunjang pemenuhan kebutuhan pangan secara berkelanjutan. Di sisi lain, petani tidak memiliki cukup insentif ekonomi maupun kebijakan yang mendorong mereka untuk mempertahankan fungsi lahan sebagai sumber pangan jangka panjang. Ketidaksinkronan antara tata ruang, kebijakan pertanian, dan sektor pembangunan lainnya mempercepat laju konversi lahan pertanian.

Tabel 2.24. Tantangan Perubahan pemanfaatan lahan Pertanian Terus Meningkat

| Urutan Prioritas | Tantangan Perubahan pemanfaatan lahan Pertanian Terus Meningkat |
|---|---|
| 1 | Terus menyusutnya luas baku sawah |
| 2 | Kurangnya pengawasan pada konversi lahan secara ilegal |
| 4 | Rendahnya insentif untuk mempertahankan lahan produktif |
| 3 | Kurangnya kesadaran petani terhadap fungsi strategis lahan |
| 5 | Tekanan ekonomi dari nilai tukar lahan yang tinggi |

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

### 2.2.5.3 Tantangan Kurang optimalnya kelembagaan, pelayanan dan perlindungan petani

Salah satu permasalahan yang terus menjadi sorotan dalam pembangunan pertanian Kabupaten Bandung adalah kurang optimalnya kelembagaan petani dan layanan publik pertanian. Kelembagaan petani yang lemah berdampak pada rendahnya kemampuan petani dalam mengakses

informasi, pembiayaan, pasar, dan pengambilan keputusan usaha tani secara kolektif. Sebagian besar petani di Kabupaten Bandung masih menghadapi risiko kerja tanpa perlindungan sosial yang memadai. Petani umumnya bekerja secara informal, tidak terdaftar dalam sistem jaminan ketenagakerjaan, dan rentan terhadap risiko kecelakaan kerja, bencana alam, serta ketidakpastian pendapatan. Di sisi lain, layanan pertanian seperti penyuluhan, perlindungan tanaman, kesehatan hewan, dan distribusi input belum menjangkau seluruh wilayah secara efektif. Selain itu, pelayanan pertanian yang seharusnya menjangkau kebutuhan petani secara teknis masih belum optimal. Beberapa UPTD yang menjadi ujung tombak pelayanan teknis seperti UPTD Perbibitan, Puskeswan, Alsintan, RPH, dan Pasar Hewan menghadapi kendala dalam hal SDM, fasilitas, dan integrasi program dengan kelompok tani di lapangan.

Tabel 2.25. Tantangan Kurang optimalnya kelembagaan petani dan pelayanan pertanian

| Urutan Prioritas | Tantangan Kurang optimalnya kelembagaan petani dan pelayanan pertanian |
|---|---|
| 3 | Terbatasnya pendampingan dan penyuluhan yang berkualitas kepada kelompok tani |
| 1 | Terbatasnya petani yang mengikuti jaringan perlindungan tenaga kerja |
| 2 | UPTD pelayanan teknis pertanian belum optimal dalam menjalankan peran pelaksanaan di lapangan |
| 4 | Kesenjangan pelayanan antar kecamatan karena keterbatasan personil, anggaran, dan logistik |
| 5 | Kurangnya inovasi layanan publik berbasis digital di sektor pertanian dan peternakan |
| 6 | Kesulitan akses pasar dan pembiayaan mandiri |
| 7 | Ketimpangan kapasitas antar kelompok tani |

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

2.2.5.4 Tantangan Keterbatasan infrastruktur yang menunjang budidaya pertanian

Ketersediaan dan kualitas infrastruktur pertanian di Kabupaten Bandung masih belum mampu mendukung secara optimal intensifikasi dan keberlanjutan usaha tani. Jaringan irigasi teknis tidak menjangkau seluruh lahan pertanian, terutama di wilayah tadah hujan dan dataran tinggi.

Fasilitas pengairan alternatif seperti embung, sumur dangkal, dan pompa irigasi belum tersedia secara merata. Sebagian besar kawasan pertanian mengandalkan curah hujan (sawah tadah hujan), dengan irigasi teknis yang belum menyeluruh. Kekeringan musiman mengganggu pola tanam dan menurunkan produktivitas. (BPS, 2023, ST2023 Jawa Barat). Selain itu, infrastruktur pendukung lain seperti jalan usaha tani, gudang penyimpanan, dan fasilitas pengolahan pascapanen masih sangat terbatas. Ketiadaan infrastruktur yang memadai tidak hanya menurunkan efisiensi budidaya, tetapi juga berdampak langsung pada produktivitas, biaya produksi, dan daya saing produk hasil pertanian.

Tabel 2-26. Tantangan Keterbatasan infrastruktur yang menunjang budidaya pertanian

| Urutan Prioritas | Tantangan Keterbatasan infrastruktur yang menunjang budidaya pertanian |
|---|---|
| 4 | Kegagalan panen di lahan tadah hujan |
| 3 | Pola tanam tidak dapat direncanakan tepat waktu |
| 1 | Lebih dari 8000 Ha lahan produktif tadah hujan masih tergantung pada musim hujan |
| 2 | Biaya distribusi hasil panen dan saprodi cukup tinggi akibat kondisi jalan usaha tani |
| 5 | Biaya logistik pertanian tinggi karena infrastruktur tidak efisien |
| 6 | Daya saing produk pertanian rendah akibat kualitas dan kontinuitas yang tidak stabil |

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

### 2.2.5.5 Tantangan Nilai Tambah Produk Pertanian Masih Rendah

Hasil produksi pertanian Kabupaten Bandung masih didominasi oleh penjualan dalam bentuk bahan mentah, dengan tingkat pengolahan yang rendah di tingkat petani atau kelompok tani. Hal ini menyebabkan nilai tambah yang diperoleh petani sangat terbatas. Rendahnya kapasitas pengolahan, keterbatasan sarana pascapanen, belum tersedianya rantai pendingin, serta minimnya keterhubungan dengan pasar modern dan industri pengolahan menyebabkan lemahnya posisi tawar petani di pasar.

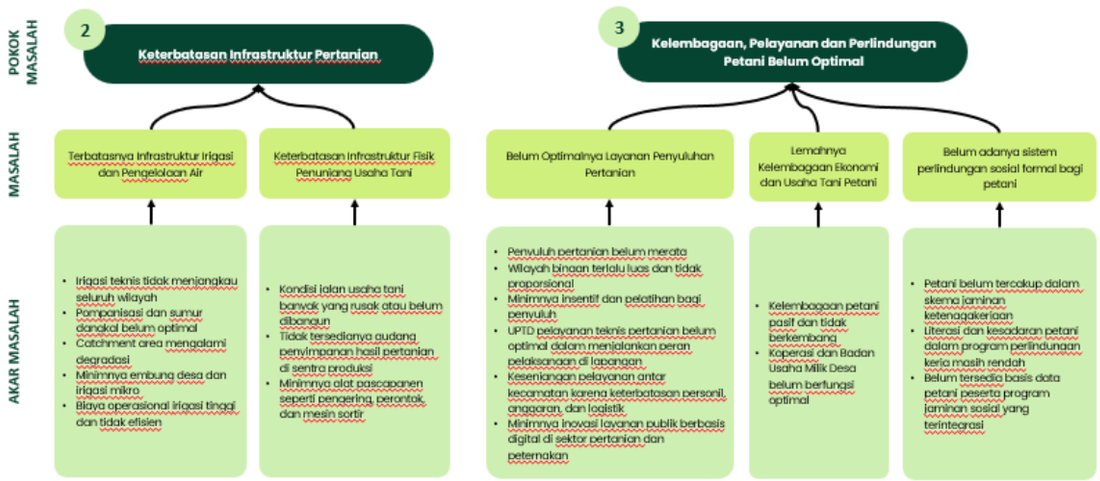
Selain itu, sebagian besar petani belum memiliki kemampuan teknis dan kelembagaan untuk mengembangkan produk olahan yang berdaya saing dan memenuhi standar mutu. Situasi ini juga diperburuk oleh regulasi yang kompleks dalam perizinan produk olahan skala kecil.

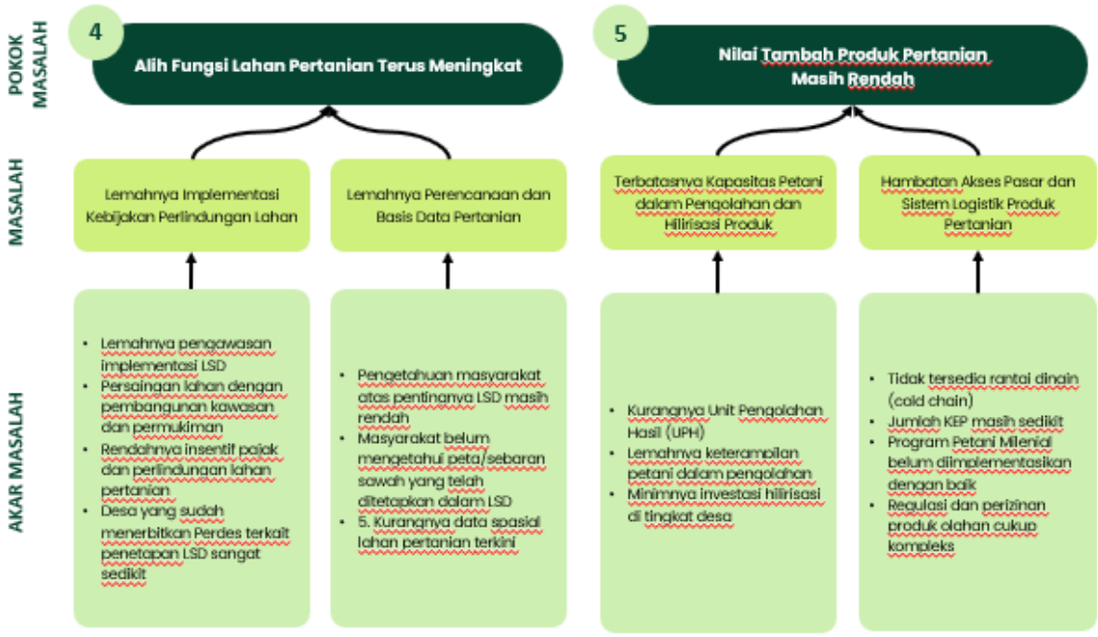
Tabel 2-27. Tantangan Nilai Tambah Produk Pertanian Masih Rendah

| Urutan Prioritas | Tantangan Nilai Tambah Produk Pertanian Masih Rendah |
|---|---|
| 1 | Produk pertanian dijual dalam bentuk mentah |
| 2 | Fluktuasi harga pasar tanpa kontrol |
| 3 | Lemahnya posisi tawar petani di mata distributor |

Sumber : Dinas Pertanian, 2025






### 2.2.6 Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah sesuai dengan urgensi, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa mendatang. Sehingga, isu strategis merupakan suatu peluang atau tantangan yang akan dihadapi di masa yang akan datang. Perumusan isu-isu strategis dilakukan melalui identifikasi berbagai isu internasional, nasional, dan regional. Berdasarkan identifikasi dari berbagai isu tersebut dapat ditentukan isu strategis yang akan ditangani dalam lima tahun ke depan.

#### 2.2.6.1 Isu Global

Di era modern ini, dunia menghadapi berbagai tantangan besar yang mempengaruhi kehidupan manusia secara global. Isu Perubahan iklim menjadi ancaman nyata dengan dampak yang semakin terasa, mulai dari bencana alam yang lebih ekstrem hingga ketidakstabilan ekosistem. Sementara itu, transformasi teknologi berkembang pesat, membawa peluang sekaligus tantangan bagi keberlanjutan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dalam konteks pembangunan, Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil mempertimbangkan aspek lingkungan secara holistik. Perubahan iklim telah menjadi isu prioritas global yang mendesak, dan dampaknya semakin nyata dirasakan di seluruh dunia. Laporan dari Organisasi Meteorologi Dunia (WMO) menunjukkan bahwa tahun 2023 adalah tahun terpanas yang pernah tercatat, dengan anomali suhu global 1,45 derajat celsius di atas rata-rata periode pra-industri. Peningkatan suhu ini memicu serangkaian bencana alam, seperti gelombang panas, banjir, dan kekeringan, yang mengancam kehidupan manusia dan ekosistem.

Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan garis pantai yang panjang, sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Kenaikan permukaan air laut, perubahan pola cuaca, dan peningkatan frekuensi bencana alam menjadi tantangan serius. Pemerintah Indonesia telah menetapkan target penurunan emisi gas rumah kaca (*Nationally Determined Contribution*/NDC) pada 2030 dan terus berupaya untuk merealisasikan target tersebut.

Di tingkat Kabupaten Bandung juga menghadapi tantangan serupa. Perubahan iklim dapat memengaruhi sektor pertanian, sumber daya air, dan infrastruktur di wilayah ini. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Bandung perlu mengambil langkah-langkah adaptasi dan mitigasi yang konkret. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, pengembangan infrastruktur tahan iklim, dan penerapan praktik pertanian berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, Kabupaten Bandung dapat berkontribusi pada upaya global dalam mengatasi perubahan iklim dan menjaga kelestarian lingkungan.

Isu Transformasi teknologi telah menjadi kekuatan pendorong utama dalam mengubah lanskap global. Kecerdasan buatan (AI), komputasi awan, dan *Internet of Things* (IoT) adalah beberapa teknologi yang merevolusi industri, komunikasi, dan kehidupan sehari-hari. Menurut laporan dari perusahaan riset pasar seperti Gartner dan IDC, investasi dalam teknologi digital terus meningkat secara signifikan. Hal ini menunjukkan pengakuan global terhadap potensi teknologi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan mengatasi tantangan sosial. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai inisiatif untuk mendorong digitalisasi

di berbagai sektor, termasuk pendidikan, kesehatan, dan ekonomi, termasuk sektor pertanian. Digitalisasi mempercepat efisiensi layanan, meningkatkan daya saing industri, dan mendorong pemerataan akses teknologi.

Di tingkat Kabupaten Bandung juga berupaya untuk memanfaatkan transformasi teknologi dalam pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Bandung dapat mendorong adopsi teknologi di sektor pertanian, pariwisata, dan UMKM. Misalnya, penggunaan aplikasi digital untuk pemasaran produk lokal dan pengelolaan rantai pasok dapat membantu meningkatkan daya saing UMKM. Selain itu, pengembangan smart city dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan kualitas hidup masyarakat. Dengan memanfaatkan transformasi teknologi, Kabupaten Bandung dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Pada lingkup pembangunan pertanian, transformasi teknologi pertanian merupakan langkah strategis dalam meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keberlanjutan usaha tani, khususnya di wilayah seperti Kabupaten Bandung yang memiliki keanekaragaman geografis dan potensi komoditas yang tinggi. Dengan bentang alam yang terdiri atas dataran tinggi, perbukitan, dan dataran rendah, serta dominasi petani kecil yang tersebar di berbagai kecamatan, penerapan teknologi harus mempertimbangkan kondisi lokal. Salah satu bentuk transformasi yang relevan adalah pemanfaatan teknologi spasial seperti Sistem Informasi Geografis (SIG) dan drone mapping untuk memetakan lahan pertanian potensial, kawasan rawan konversi, dan perencanaan zona produksi. Teknologi ini sangat efektif diterapkan di wilayah agrowisata seperti Pangalengan dan Ciwidey yang menjadi sentra hortikultura dan perkebunan.

Selain itu, digitalisasi manajemen usaha tani melalui aplikasi e-Farming dan pemanfaatan *Internet of Things* (IoT) untuk pengendalian irigasi dan hama penyakit mulai diadopsi oleh kelompok tani milenial di wilayah hortikultura. Mekanisasi pertanian juga menjadi solusi atas berkurangnya tenaga kerja, dengan penggunaan alat tanam dan panen modern serta mesin pengolahan pascapanen, terutama untuk komoditas padi dan jagung di kawasan Majalaya, Rancaekek, dan Nagreg. Pada sisi produksi, pemanfaatan benih unggul adaptif, penggunaan biofertilizer, serta teknologi Inseminasi

Buatan (IB) untuk ternak menjadi bagian penting dari modernisasi produksi yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Lebih lanjut, transformasi teknologi juga mencakup pembenahan rantai pasok dan pemasaran melalui platform digital dan sistem logistik berbasis cold chain. Inovasi ini sangat penting untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sayuran dan buah-buahan yang mudah rusak, sekaligus membuka akses pasar nasional maupun ekspor. Contoh keberhasilan transformasi ini dapat dilihat pada model pertanian terintegrasi seperti Pesantren Al-Ittifaq yang menggabungkan budidaya, *digital marketing*, dan kemitraan distribusi. Di samping itu, pengembangan energi terbarukan seperti panel surya untuk irigasi dan biogas dari limbah ternak juga menjadi bagian dari upaya mendorong pertanian hijau di daerah sentra peternakan.

Dengan demikian, transformasi teknologi di sektor pertanian Kabupaten Bandung bukan hanya menjadi kebutuhan, tetapi juga peluang besar untuk mewujudkan pertanian yang cerdas, tangguh, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara petani, pemerintah, lembaga riset, dan sektor swasta menjadi kunci keberhasilan dalam mengakselerasi adopsi teknologi yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan tantangan pertanian modern.

Isu Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah upaya global untuk memastikan pembangunan yang berkelanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. TPB mencakup berbagai dimensi seperti peningkatan kesejahteraan ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, dan keadilan sosial. Dalam rangka mencapai tujuan ini, terdapat 17 tujuan utama yang harus dipenuhi, antara lain penghapusan kemiskinan, peningkatan kualitas pendidikan, serta perlindungan terhadap ekosistem darat dan laut. Kabupaten Bandung sebagai bagian dari komitmen nasional terus berupaya mencapai target TPB dengan berbagai strategi dan kebijakan.

Dalam merumuskan isu strategis TPB, Kabupaten Bandung memperhatikan berbagai faktor seperti daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, kebijakan pembangunan daerah, serta hasil evaluasi capaian TPB. Beberapa isu utama yang diidentifikasi antara lain perubahan pemanfaatan lahan yang berdampak pada ekosistem, rendahnya kualitas

sumber daya manusia akibat kurangnya akses pendidikan berkualitas, serta perlunya peningkatan keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan. Isu-isu ini akan menjadi dasar dalam penyusunan strategi pembangunan berkelanjutan yang lebih terarah dan efektif. Muatan KLHS RPJMD tahun 2025-2029 terfokus pada 9 isu PB strategi.

Dinas Pertanian mendukung target pencapaian TPB ke-2 (Tanpa Kelaparan). Dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau *Sustainable Development Goals* (SDG) ke-2, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung berkomitmen untuk menjalankan program dan kegiatan yang sejalan dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian serta perlindungan terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan.

Salah satu indikator kunci yang menjadi perhatian adalah nilai tambah sektor pertanian per tenaga kerja (rupiah per tenaga kerja), yang mencerminkan efisiensi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan petani. Nilai Tambah Pertanian (NTP) Indikator ini menunjukkan berapa besar kontribusi ekonomi yang dihasilkan oleh setiap tenaga kerja di sektor pertanian, dan merupakan cerminan dari efisiensi, skala produksi, akses terhadap teknologi, serta nilai komersial dari produk pertanian yang dihasilkan. Semakin tinggi nilai tambah per tenaga kerja, semakin tinggi pula produktivitas dan potensi kesejahteraan petani. Dalam kerangka TPB 2 (Tanpa Kelaparan), peningkatan nilai tambah pertanian sangat penting untuk mendorong pertanian yang inklusif dan berkelanjutan, mengurangi kemiskinan petani, serta meningkatkan ketahanan dan kemandirian pangan. Oleh karena itu, Dinas Pertanian secara aktif berperan dalam memfasilitasi adopsi inovasi teknologi, penyediaan sarana produksi yang efisien, serta pengembangan hilirisasi produk untuk memperbesar nilai tambah yang dihasilkan petani.

Selain itu, Dinas Pertanian juga mendukung pencapaian TPB melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sebagai bentuk perlindungan terhadap lahan pertanian dari ancaman alih fungsi. LSD (Lahan Sawah yang Dilindungi) adalah bagian dari kebijakan nasional dalam rangka perlindungan lahan pertanian, khususnya lahan sawah, agar tidak mengalami alih fungsi yang masif ke penggunaan non-pertanian. Kebijakan

ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B), yang kemudian ditindaklanjuti melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 dan peraturan-peraturan teknis lainnya. Di daerah, penetapan LSD merupakan bagian penting dari perencanaan tata ruang dan kebijakan ketahanan pangan jangka panjang.

Tabel 2.28. RAD TPB Dinas Pertanian Tahun 2024

| TPB | Indikator Metadata | Cara Perhitungan/Rumus Indikator | Satuan | Hasil Evaluasi Tahun 2024 (Baseline) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian | Status | Detail Capaian |
| | | | | | | | |
| TPB 2 - Tanpa Kelaparan | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | NTP PTK = JNTP : JTKP x 100%<br>NTP PTK : Nilai Tambah Pertanian Per Tenaga Kerja<br>JNTP : Jumlah Nilai Tambah Pertanian<br>JTKP : Jumlah tenaga kerja di sektor pertanian<br><br>JNTP = Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan x Harga Jual dari Petani - Biaya Produksi<br><br>Sub Sektor Peternakan belum termasuk kedalam hitungan karena belum didapat data biaya produksi dari produk peternakan (Daging, susu, telur)<br><br>JTKP = Berasal dari Data Simluhtan (Sistem Penyuluhan Pertanian) Per Mei Tahun 2025 | Rupiah | pm | pm | Data Tidak Tersedia | *Jumlah Nilai Tambah 2024 : 8.944.550.317.126,57<br>*Jumlah tenaga kerja informan bidang pertanian tahun 2024 : 81.425 jiwa |

| TPB | Indikator Metadata | Cara Perhitungan/Rumus Indikator | Satuan | Hasil Evaluasi Tahun 2024 (Baseline) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Target | Capaian | Status | Detail Capaian |
| TPB 2 - Tanpa Kelaparan | Penetapan kawasan pertanian pangan berkelanjutan. | Luas lahan terdaftar LSD/Luas Lahan Sawah Kabupaten Bandung | Persen | 41,03 | 58,74 | Tercapai | *Data Tahun 2024 :<br>1. Luas Total (LSD) : 16.915,90 Ha<br>2. Jumlah Kecamatan: 29<br>3. Jumlah Desa: 207<br>4. Jumlah Poktan: 1.219<br>5. Jumlah Blok: 1.432<br>6. Luas lahan baku : 28,799.75 Ha |

Sumber Data : RAD TPB Kab Bandung 2022-2024

2.2.6.2 Isu Nasional dan Provinsi Jawa Barat

Dalam RPJMN 2025-2029 Isu-isu strategis yang dihadapi Pulau Jawa dalam RPJMN 2025–2029 tidak terlepas dari kondisi yang terjadi di wilayah-wilayah tertentu, termasuk Kabupaten Bandung. Sebagai bagian dari wilayah Bandung Raya, Kabupaten Bandung menghadapi tantangan serupa dengan skala yang lebih spesifik sesuai karakteristik wilayahnya. Beberapa permasalahan utama yang dihadapi Pulau Jawa, seperti inefisiensi perkotaan, rendahnya adopsi teknologi industri, kesenjangan infrastruktur, serta ketimpangan akses pendidikan dan kesehatan, juga ditemukan di Kabupaten Bandung, meskipun dengan akar masalah yang lebih kontekstual. Dalam konteks Kabupaten Bandung, tantangan pembangunan utama terkait dengan:

a) Belum optimalnya hilirisasi dan diversifikasi industri berbasis sumber daya alam
b) Pengembangan pusat pertumbuhan yang belum efisien
c) Rendahnya produktivitas masyarakat akibat keterbatasan konektivitas, akses pendidikan, dan layanan kesehatan.

Dalam konteks perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, sejumlah isu strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat turut diadopsi dan direlevansikan ke dalam RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029. Sektor pertanian memiliki kontribusi yang penting dan langsung terhadap implementasi berbagai isu tersebut, baik dari sisi pengelolaan sumber daya, pembangunan ekonomi, pemerataan wilayah, hingga keberlanjutan lingkungan.

Pertama, dalam isu *Green dan Blue Economy* serta Pembangunan Inklusif, sektor pertanian Kabupaten Bandung mendorong pengembangan sistem pertanian ramah lingkungan seperti pertanian organik, konservasi tanah dan air, serta pemanfaatan limbah ternak dan hasil pertanian melalui prinsip *circular economy.* Pembangunan inklusif juga diwujudkan melalui pemberdayaan kelompok rentan, seperti petani perempuan dan pemuda tani, untuk ikut terlibat aktif dalam usaha tani berbasis kawasan.

Kedua, untuk isu Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia, Dinas Pertanian memegang peran dalam peningkatan kapasitas petani, penyuluh, dan kelembagaan tani melalui pelatihan vokasional, pendampingan agribisnis, serta inkubasi wirausaha tani muda. Fungsi UPTD dan penyuluh diperkuat sebagai simpul pembelajaran dan pembina

kelembagaan pertanian, guna menciptakan SDM pertanian yang adaptif terhadap teknologi dan dinamika pasar.

Ketiga, dalam isu Kesenjangan Pembangunan dan Infrastruktur Pelayanan Dasar, sektor pertanian menyumbang solusi melalui penyediaan infrastruktur produktif, seperti pembangunan dan rehabilitasi jalan usaha tani, irigasi pertanian, gudang hasil panen, serta layanan teknis dari UPTD pertanian secara merata. Pendekatan pembangunan berbasis wilayah dilakukan untuk mengurangi ketimpangan produktivitas dan akses layanan pertanian antar kecamatan.

Keempat, pada isu Keberlanjutan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan, sektor pertanian berperan dalam pengendalian dampak negatif pertanian konvensional dengan mendorong adopsi teknologi pertanian ramah lingkungan, pengurangan penggunaan bahan kimia sintetis, serta pengelolaan limbah peternakan secara terpadu. Selain itu, program konservasi lahan dan perlindungan sumber daya air di kawasan pertanian mendukung keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup.

Kelima, dalam isu Keberlanjutan Penataan Ruang, Dinas Pertanian berperan strategis dalam perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) beserta turunannya yaitu penetapan Lahan Sawah Dilindungi (LSD), penyusunan zonasi kawasan pertanian strategis, serta pemutakhiran data spasial lahan pertanian. Upaya ini bertujuan untuk memastikan kesinambungan fungsi lahan pertanian dalam dokumen tata ruang dan memperkuat basis perencanaan pertanian berbasis wilayah.

#### 2.2.6.3 Isu Strategis Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Isu strategis Kabupaten Bandung yang telah disusun dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 terdiri dari 7 (tujuh) isu strategis yang diusung, dimana pada pembangunan Sektor Pertanian sangat erat hubungannya dengan isu strategis nomor 3 dan 4, sebagaimana uraian tabek berikut.

Tabel 2-29. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

| Urutan Prioritas | Isu Strategis |
|---|---|
| 1 | Pengelolaan Tata Ruang dan Lingkungan Berkelanjutan serta Ketahanan terhadap Bencana |
| 2 | Pemerataan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan serta Peningkatan Daya Saing Sumber Daya Manusia |
| 3 | Penguatan Ekonomi inklusif dan pengurangan kemiskinan |
| 4 | Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah |

| Urutan Prioritas | Isu Strategis |
|---|---|
| 5 | Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah |
| 6 | Transformasi Tata Kelola Pemerintahan |
| 7 | Penguatan Ketahanan Sosial serta Peningkatan Keamanan dan ketertiban masyarakat |

Sumber: RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

Penguatan ekonomi inklusif serta pengurangan kemiskinan akan mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata, memastikan setiap lapisan masyarakat mendapatkan manfaat dari pembangunan. Peningkatan ketahanan pangan dan infrastruktur dasar akan memperkuat sektor pertanian serta mendorong konektivitas antarwilayah, sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

### 2.2.6.4 Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan Dinas Pertanian

Pemanfaatan potensi daerah dalam perencanaan pembangunan memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, berkelanjutan, dan berdaya saing. Potensi daerah mencakup seluruh sumber daya yang dimiliki suatu wilayah, baik sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis, ekonomi, sosial, budaya, maupun kelembagaan, yang apabila diidentifikasi dan dimanfaatkan secara optimal akan menjadi kekuatan utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam konteks perencanaan pembangunan, penggalian dan analisis potensi daerah memberikan dasar yang kuat untuk menyusun program dan kegiatan yang sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan masyarakat, serta arah kebijakan nasional dan daerah. Dengan memanfaatkan potensi unggulan daerah secara maksimal, pemerintah daerah dapat mendorong terciptanya nilai tambah, meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kemandirian fiskal. Selain itu, pendekatan berbasis potensi juga memungkinkan perencanaan pembangunan menjadi lebih adaptif terhadap tantangan dan peluang global, sekaligus memperkuat sinergi antarsektor dan antarwilayah. Oleh karena itu, pemetaan potensi daerah yang akurat, partisipatif, dan terintegrasi menjadi prasyarat penting dalam perencanaan pembangunan yang inklusif dan berorientasi hasil.

Kabupaten Bandung memiliki potensi pertanian yang sangat besar dan beragam, yang menjadikannya sebagai salah satu sentra produksi pertanian strategis di Provinsi Jawa Barat. Berikut beberapa potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Pertanian:

a. Sumber daya pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan cukup besar, mendukung ketahaan pangan lokal dan ekonomi perdesaan

Kabupaten Bandung memiliki potensi sumber daya pertanian yang sangat besar dan beragam, mencakup seluruh subsektor utama pertanian, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Keunggulan agroekologi wilayah ini—dengan kombinasi dataran tinggi dan rendah, iklim basah, serta ketersediaan lahan yang relatif luas—mendukung pengembangan sistem pertanian yang produktif dan berkelanjutan. Kondisi ini menjadikan Kabupaten Bandung sebagai salah satu lumbung pangan strategis di wilayah selatan Jawa Barat sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi perdesaan. Potensi sumber daya ini secara nyata mendukung ketahanan pangan lokal, baik dari aspek ketersediaan, aksesibilitas, maupun keberagaman pangan masyarakat. Di sisi lain, sektor pertanian juga menjadi penggerak utama ekonomi perdesaan, dengan kontribusi signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan pendapatan rumah tangga tani. Oleh karena itu, optimalisasi potensi ini menjadi fondasi penting dalam pembangunan pertanian yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

b. Lahan pertanian belum seluruhnya terjangkau oleh infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi teknis, embung, dan jalan usaha tani. Terdapat 28,3% luas lahan sawah produktif tergantung musim hujan.

Kabupaten Bandung memiliki potensi lahan pertanian yang luas dan produktif, pemanfaatan optimal terhadap potensi tersebut masih menghadapi tantangan dalam hal keterjangkauan infrastruktur pendukung. Kondisi ini juga menunjukkan adanya potensi pengembangan kawasan pertanian melalui intervensi infrastruktur pendukung, baik melalui pembangunan jaringan irigasi tersier, pembangunan embung pertanian, jalan usaha tani, maupun pemanfaatan pompanisasi dan irigasi hemat air. Intervensi ini penting untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan indeks pertanaman (IP), dan menurunkan ketergantungan terhadap musim. Pengembangan infrastruktur pertanian menjadi prioritas strategis yang perlu dikolaborasikan dengan lintas sektor seperti Dinas PUPR, pemerintah desa, serta pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Desa.

c. Komoditi pertanian strategis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sangat luas tersebar di 28 kecamatan. Demikian pula Ternak unggulan daerah seperti Sapi perah, sapi potong, domba dan unggas, dengan

pelayanan pengendalian PHMS oleh UPTD Puskeswan berikut 10 Puskeswan/Puskeswan Pembantu.

Kombinasi antara luasnya sebaran komoditas unggulan dan dukungan kelembagaan teknis yang kuat ini menjadikan Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan potensi pertanian dan peternakan yang sangat strategis. Potensi ini menjadi modal utama dalam pembangunan ekonomi daerah berbasis agribisnis, sekaligus sebagai instrumen untuk mencapai ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat tani dan peternak secara berkelanjutan.

d. Kabupaten Bandung memiliki total 4.224 kelompok tani aktif dengan jumlah anggota mencapai 132.942 orang yang tersebar di 31 kecamatan. Memiliki 6 UPTD dalam pelayanan masyarakat petani.

Kelompok tani tersebut merupakan wadah organisasi petani yang menjalankan fungsi sosial, ekonomi, dan teknis, serta menjadi mitra utama pemerintah dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan pertanian. Keberadaan kelompok tani ini menunjukkan tingkat partisipasi dan kemandirian petani yang tinggi dalam mengelola usahataninya secara kolektif.

e. Komoditas pertanian sangat beragam dan jumlah produksinya besar yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah.

Kabupaten Bandung memiliki keragaman komoditas pertanian yang meliputi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hingga peternakan, dengan skala produksi yang relatif besar. Potensi ini membuka peluang pengembangan produk olahan bernilai tambah, misalnya beras organik, tepung jagung, aneka jus dan sayuran beku, kopi dan teh premium, serta olahan susu dan daging. Hilirisasi pertanian melalui pengolahan hasil tidak hanya meningkatkan nilai tambah ekonomi, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pemberdayaan kelompok tani, UMKM, dan pelaku usaha milenial. Dengan dukungan fasilitasi pengolahan, kemitraan usaha, serta promosi dan sertifikasi produk, Kabupaten Bandung berpotensi menjadi pusat pengembangan produk olahan pertanian yang mampu menopang ketahanan pangan sekaligus menembus pasar regional maupun global.

f. Kabupaten Bandung memiliki kawasan pertanian produktif di berbagai wilayah. Luas lahan pertanian mencapai 143.928 Ha, yang terdiri atas 28.750 Ha lahan sawah dan 115.178 Ha lahan pertanian bukan sawah

Potensi luas dan penyebaran kawasan pertanian produktif ini memberikan kontribusi besar terhadap ketahanan pangan daerah,

peningkatan pendapatan petani, dan pengembangan ekonomi lokal berbasis agribisnis. Oleh karena itu, pemanfaatan lahan secara optimal, dengan dukungan infrastruktur, kelembagaan, dan teknologi pertanian, menjadi kunci dalam mewujudkan pembangunan pertanian yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

2.2.6.5 Perumusan Isu Strategis Dinas Pertanian

Penyusunan isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang komprehensif dan sistematis, sebagaimana diarahkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD. Proses ini dimulai dengan melakukan inventarisasi dan analisis terhadap potensi unggulan sektor pertanian Kabupaten Bandung, yang mencakup subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan. Setiap subsektor menunjukkan karakteristik wilayah dan komoditas strategis yang mampu mendukung ketahanan pangan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan.

Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi permasalahan aktual yang dihadapi sektor pertanian, baik yang bersifat teknis maupun struktural. Permasalahan tersebut antara lain meliputi produktivitas yang belum optimal, perubahan pemanfaatan lahan pertanian, keterbatasan infrastruktur dan layanan penyuluhan, hingga belum berkembangnya hilirisasi produk. Masalah-masalah ini dihimpun dari data sektoral, dokumen evaluasi pembangunan lima tahunan, serta hasil konsultasi dan diskusi dengan pemangku kepentingan pertanian di tingkat lapangan maupun kelembagaan.

Sebagai bagian dari sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan, penyusunan isu strategis juga mempertimbangkan berbagai dokumen perencanaan tingkat yang lebih tinggi, termasuk isu global seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), isu nasional sebagaimana termuat dalam RPJMN 2025–2029 dan arah kebijakan Kementerian Pertanian, serta isu strategis Provinsi Jawa Barat dalam dokumen RPJMD Provinsi dan rencana sektoral Dinas terkait. Telaahan ini dimaksudkan agar strategi pembangunan pertanian daerah mampu menjawab tantangan-tantangan lintas batas wilayah dan sektor secara terpadu.

Lebih lanjut, isu strategis Dinas Pertanian juga diselaraskan dengan isu-isu yang telah dirumuskan dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung 2025–2029. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa sektor pertanian

berkontribusi nyata terhadap pencapaian misi daerah, khususnya dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan ketahanan pangan lokal. Isu-isu tersebut mencakup penguatan *green economy,* perlindungan lahan pertanian, peningkatan nilai tambah hasil pertanian, dan pelayanan publik berbasis teknologi dan kelembagaan yang adaptif.

Penyusunan isu strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung tidak hanya berpijak pada kondisi lokal, tetapi juga merespon dinamika eksternal dan kebijakan lintas sektor. Hasil identifikasi tersebut menjadi dasar dalam menyusun strategi, arah kebijakan, dan sasaran kinerja Dinas Pertanian selama lima tahun ke depan, guna mewujudkan pertanian yang berdaulat, berkelanjutan, dan berdaya saing tinggi.

Gambar 2.16 Isu Strategis




Sumber : RPJMD 2025-2029

Tabel 2.30. Perumusan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Provinsi | Kabupaten | |
| Sumber daya pertanian subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan cukup besar, mendukung ketahaan pangan lokal dan ekonomi perdesaan | Produktivitas Lahan dan Komoditas Strategis Belum Optimal | Tingginya perubahan pemanfaatan lahan menyebabkan semakin menurunnya proporsi tutupan lahan | Perubahan iklim | Ketahanan Ekonomi dan Pangan | Green dan Blue Economy serta Pembangunan Inklusif | Penguatan Ekonomi inklusif dan Pengurangan Kemiskinan | Strategi 1: Peningkatan produktivitas lahan dan komoditas strategis |
| Lahan pertanian belum seluruhnya terjangkau oleh infrastruktur pendukung seperti jaringan irigasi teknis, embung, dan jalan usaha tani. Terdapat 28,3% luas lahan sawah produktif tergantung musim hujan. | Keterbatasan infrastruktur yang menunjang budidaya pertanian | belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar-OPD | Transformasi teknologi | Ketahanan Ekonomi dan Pangan serta Modernisasi dan transformasi pertanian | Isu kesenjangan infrastruktur antarwilayah | Peningkatan Ketahanan Pangan Daerah | Strategi 2: Peningkatan infrastruktur pertanian |

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Provinsi | Kabupaten | |
| Komoditi pertanian strategis tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan sangat luas tersebar di 28 kecamatan. Demikian pula Ternak unggulan daerah seperti Sapi perah, sapi potong, domba dan unggas, dengan pelayanan pengendalian PHMS oleh UPTD Puskeswan berikut 10 Puskeswan/Puskeswan Pembantu. | Pengendalian OPT dan Penyakit Hewan Strategis Belum Responsif dan Terstruktur | belum optimalnya tata kelola pemerintah akibat kurangnya keselarasan program antar-OPD (Penanganan OPT dan penyakit hewan strategis memerlukan sistem deteksi dini, respons cepat, serta koordinasi lintas OPD) | Perubahan iklim global yang memicu munculnya penyakit hewan menular baru serta peningkatan serangan OPT lintas negara | Ketahanan pangan nasional rentan terganggu akibat serangan OPT dan penyakit hewan strategis. | Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia | Peningkatan Infrastruktur dasar dan Pengembangan Wilayah | Strategi 3: Peningkatan pengendalian OPT dan Penyakit Hewan Strategis |

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Provinsi | Kabupaten | |
| Kabupaten Bandung memiliki total 4.224 kelompok tani aktif dengan jumlah anggota mencapai 132.942 orang yang tersebar di 31 kecamatan. Memiliki 6 UPTD dalam pelayanan masyarakat petani. | Kelembagaan, Pelayanan, dan Perlindungan Petani Belum Optimal | tingginya kerentanan masyarakat miskin dan kualitas konsumsi pangan yang rendah | Perubahan iklim global mendorong pentingnya kelembagaan petani dalam mitigasi risiko bencana dan adaptasi. | Kelembagaan petani belum optimal sebagai ujung tombak pelaksanaan program pertanian nasional. | Peningkatan kualitas dan daya saing SDM pertanian Jawa Barat, terutama melalui penguatan kelembagaan kelompok tani/gapoktan. | Belum optimalnya peran kelembagaan petani (poktan/gapoktan) dalam mendukung produksi hasil pertanian. | Strategi 4: Penguatan kelembagaan dan pelayanan pertanian serta perlindungan petani |
| Komoditas pertanian sangat beragam dan jumlah produksinya besar yang berpotensi untuk dikembangkan menjadi produk olahan bernilai tambah. | Nilai Tambah Produk Pertanian Masih Rendah dan Hilirisasi Belum Berkembang | tingginya kerentanan masyarakat miskin. mentah. | Tren global hilirisasi produk pertanian: permintaan pasar dunia terhadap produk olahan bernilai tambah tinggi | Program hilirisasi pertanian menjadi prioritas nasional dalam RPJMN untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor | Pengembangan agroindustri berbasis komoditas unggulan daerah | Belum berkembangnya industri pengolahan pertanian lokal di sekitar sentra produksi. | Strategi 5: Peningkatan Nilai tambah produk pertanian |

| Potensi Daerah yang Menjadi Kewenangan PD | Permasalahan PD | Isu KLHS | Isu Lingkungan Dinamis | | | | Isu Strategis PD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Global | Nasional | Provinsi | Kabupaten | |
| | | | | produk pertanian. | | | |
| Kabupaten Bandung memiliki kawasan pertanian produktif di berbagai wilayah. Luas lahan pertanian mencapai 143.928 Ha, yang terdiri atas 28.750 Ha lahan sawah dan 115.178 Ha lahan pertanian bukan sawah | Luas lahan baku sawah dan lahan pertanian berkurang | tingginya perubahan pemanfaatan lahan yang menyebabkan menurunnya proporsi tutupan lahan | tekanan global untuk menjaga ketahanan pangan melalui perlindungan lahan pertanian produktif | Perubahan pemanfaatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) masih tinggi | Konversi lahan sawah di Jawa Barat cukup tinggi karena tekanan pembangunan industri dan perumahan | Perubahan pemanfaatan lahan sawah teknis irigasi menjadi permukiman dan kawasan industri di kecamatan-kecamatan berkembang. | Strategi 6: Pengelolaan lahan baku sawah dan lahan pertanian yang baik |

Sumber : RPJMD Kab Bandung, 2025-2029

Tabel 2.31. Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029

| Urutan Prioritas | Isu Strategis |
|---|---|
| 1 | Produktivitas Lahan dan Komoditas Strategis Belum Optimal |
| 2 | Keterbatasan Infrastruktur Pendukung Budidaya Pertanian dan Pascapanen |
| 3 | Pengendalian OPT dan Penyakit Hewan Strategis Belum Responsif dan Terstruktur |
| 4 | Kelembagaan, Pelayanan, dan Perlindungan Petani Belum Optimal |
| 5 | Nilai Tambah Produk Pertanian Masih Rendah dan Hilirisasi Belum Berkembang |
| 6 | Perlindungan Lahan Pertanian dari Alih Fungsi dan Degradasi |

Sumber Data: Distan, 2025-2029

Pembangunan sektor pertanian Kabupaten Bandung lima tahun ke depan diharapkan menjadi pengungkit utama dalam mewujudkan kesejahteraan petani dan tercapainya perekonomian daerah yang inklusif serta berketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan misi pembangunan daerah yang mengarah pada pemerataan ekonomi dan penguatan kapasitas produksi lokal dan akan mampu mencapai visi pembangunan jangka panjangnya pada tahun 2030, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, Sejahtera (BEDAS), Maju, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas.". Seluruh isu strategis yang telah dirumuskan, mulai dari peningkatan produktivitas, perlindungan lahan, penyediaan infrastruktur pertanian, hingga penguatan kelembagaan dan hilirisasi hasil pertanian, diarahkan untuk memperbaiki ekosistem usaha tani secara menyeluruh dan berkelanjutan.

Dengan mengatasi isu strategis pembangunan pertanian, dapat meningkatnya nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan dan daya beli petani pada Tahun 2030. Melalui peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya yang ditunjang oleh infrastruktur memadai, serta penguatan akses terhadap pasar dan perlindungan sosial, pendapatan petani dapat ditingkatkan secara signifikan. Selain itu, sektor pertanian diharapkan mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal dan menjadi wadah regenerasi melalui pemberdayaan petani milenial serta penciptaan ekosistem agribisnis berbasis desa. Seluruh isu strategis tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penentu dalam mewujudkan sasaran Dinas Pertanian dalam peningkatan produktivitas petani. Peningkatan produktivitas petani merupakan salah satu tujuan strategis dalam pembangunan sektor pertanian

yang bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi. Produktivitas tidak hanya mencerminkan efisiensi usaha tani dalam memanfaatkan lahan, tenaga kerja, dan teknologi, tetapi juga menjadi indikator utama keberhasilan program pembangunan pertanian dalam mendorong kesejahteraan petani dan ketahanan pangan daerah. Di Kabupaten Bandung, upaya peningkatan produktivitas petani menjadi fokus utama Dinas Pertanian sebagai bentuk dukungan terhadap arah pembangunan daerah yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan ketahanan pangan lokal.

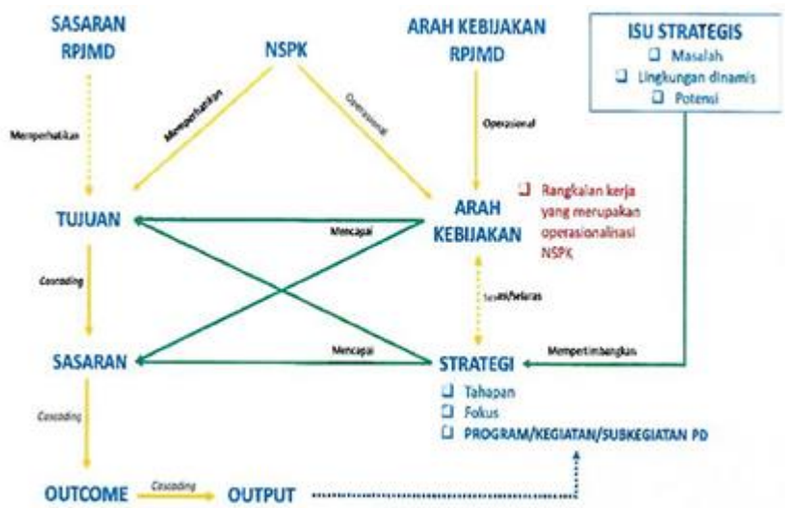
Pendekatan pembangunan pada Sektor Pertanian yang menyeluruh tersebut, diharapkan menjadi penopang utama tercapainya tujuan RPJMD yaitu “Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan.” Pertanian tidak hanya menjadi sumber pangan dan penghidupan, tetapi juga motor penggerak pertumbuhan wilayah, penciptaan lapangan kerja hijau *(green jobs),* serta jaring pengaman ekonomi rakyat yang adaptif terhadap tantangan masa depan.

# BAB III

# TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN

Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) harus disusun secara terstruktur dengan mengikuti alur yang dimulai dari identifikasi isu strategis hingga program dan kegiatan, serta mengacu pada NSPK dan arah kebijakan RPJMD. Isu strategis yang bersumber dari permasalahan, dinamika lingkungan, dan potensi daerah menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan perangkat daerah yang relevan dan kontekstual. Arah kebijakan ini kemudian diturunkan menjadi tujuan, sasaran, strategi, dan output kegiatan.

Gambar 3.1 Alur Renstra PD




Sumber : Paparan Renstra PD

Telaahan Visi RPJPD, RPJPN, dan RPJP Provinsi Jawa Barat

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi Bupati dan Wakil Bupati, yang mencerminkan arah pembangunan atau kondisi ideal yang ingin dicapai selama masa jabatan lima tahun pada periode 2025-2029. Visi ini menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan daerah yang sejalan dengan misi yang diemban. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perumusan visi dan misi RPJMD tidak hanya didasarkan pada visi dan misi kepala daerah, tetapi juga harus mengacu pada RPJPD guna memastikan kesinambungan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. visi RPJMD Kabupaten Bandung harus mengacu kepada visi RPJPD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2045, RPJPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2045, dan RPJP

Nasional Tahun 2025-2045 sebagai berikut.

Tabel 3.1 Visi RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten

| RPJP Nasional (Tahun 2025-2045) | RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045) | RPJPD Kabupaten (Tahun 2025-2045) |
|---|---|---|
| Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju dan berkelanjutan | Dengan Iman dan Takwa, Provinsi Jawa Barat Termaju di Indonesia | Kabupaten Bandung Maju, Agamis, Sejahtera dan Berkelanjutan |

Sumber Data : RPJPN & RPJPD Provinsi & Kabupaten

Untuk merealisasikan visi RPJPD Kabupaten Bandung tahun 2025-2045, telah dirumuskan delapan misi utama sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang unggul, berakhlak, dan berkualitas;
2. Transformasi perekonomian daerah yang inklusif dan berdaya saing berbasis kearifan lokal;
3. Transformasi tata kelola;
4. Mewujudkan kabupaten yang Kondusif dan menjaga stabilitas ekonomi daerah;
5. Meningkatkan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkarakter;
6. Mengembangkan pembangunan kewilayahan yang adil dan merata;
7. Meningkatkan infrastruktur dasar yang inklusif;
8. Meningkatkan pembangunan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan.

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Bandung juga mempertimbangkan Arah Kebijakan RPJP, dengan keterkaitan sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tahap RPJPN, RPJPD Prov, dan RPJPD Kab Bandung

| RPJP Nasional (Tahun 2025-2045) | RPJPD Provinsi Jawa Barat (Tahun 2025-2045) | RPJPD Kabupaten Bandung (Tahun 2025-2045) |
|---|---|---|
| Tahap I (2025-2029) Penguatan Transformasi | Tahap I (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi Sosial, Ekonomi, dan Tata Kelola | Tahap I (2025-2029) Penguatan fondasi melalui transformasi sosial, transformasi ekonomi, dan transformasi tata kelola |

Sumber Data : RPJPN & RPJPD Provinsi & Kabupaten

Berdasarkan penelaahan terhadap dokumen rencana pembangunan terkait serta hasil identifikasi terhadap permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Bandung, maka dibutuhkan perumusan visi pembangunan Kabupaten Bandung sebagai pedoman arah kebijakan lima tahun mendatang. Visi Pemerintah Kabupaten Bandung adalah:

“Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas”

Berikut penjabaran makna yang terkandung dalam visi tersebut adalah sebagai berikut:

Lebih Bedas: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bedas memiliki arti yaitu untuk menginternalisasi nilai-nilai luhur yang diwariskan leluhur dan senantiasa dilestarikan sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat warga Kabupaten Bandung dalam membangun peradaban yang terus lebih baik dari masa ke masa.

Maju: Terwujudnya Kabupaten Bandung Maju memiliki arti yaitu Kabupaten Bandung dalam 5 (lima) tahun kepemimpinan akan mencapai kondisi terbaik perkembangan masyarakat yang ditunjukkan oleh tingginya angka indikator-indikator tertentu yang berlaku, tercapainya standar minimal yang ditetapkan secara nasional, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) hingga melampaui rata-rata provinsi dan nasional.

Berkelanjutan: Terwujudnya Kabupaten Bandung Berkelanjutan memiliki arti yaitu pembangunan yang optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung akan diupayakan dengan mempertimbangkan segala aspek secara bijaksana. Pembangunan yang diselenggarakan tidak akan pernah mengorbankan alam sehingga manfaatnya dapat terus dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Bandung.

Berdasarkan visi pembangunan yang ada, dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka dirumuskan misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 dengan mengacu rumusan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih yang diselaraskan dengan misi RPJPD. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Berikut misi pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029.

Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Unggul, Kompetitif dan Berakhlak serta Penguatan Keseteraan Gender Melalui Pemberdayaan Perempuan dan Mendorong Perlindungan Bagi Anak Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang memiliki keunggulan dalam berbagai bidang, baik secara kompetitif maupun religius. Selain itu, misi ini juga berkomitmen untuk menguatkan kesetaraan gender melalui pemberdayaan perempuan, yang bertujuan agar perempuan memiliki peran yang setara dan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu misi ini mendorong perlindungan bagi anak-anak, memastikan mereka mendapatkan hak dan perlindungan yang mereka butuhkan untuk tumbuh

dan berkembang dengan baik.

Dukungan Dinas Pertanian dalam penguatan kesetaraan gender terutama diwujudkan melalui peningkatan akses dan partisipasi perempuan pada seluruh tahapan pembangunan pertanian. Akses di sini bermakna memberikan peluang yang sama bagi perempuan untuk memperoleh informasi, teknologi, modal, sarana produksi, serta layanan penyuluhan dan pelatihan. Sedangkan partisipasi bermakna memastikan perempuan tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga terlibat aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga evaluasi program pertanian. Upaya peningkatan akses dilakukan dengan membuka ruang yang setara bagi perempuan petani dalam program pelatihan teknis, baik mengenai budidaya, pengendalian hama, maupun pasca panen. Perempuan juga didorong untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam kegiatan penyuluhan yang biasanya lebih banyak dihadiri oleh laki-laki. Dengan keterlibatan ini, pengetahuan dan keterampilan perempuan dalam mengelola usaha tani dapat meningkat sehingga produktivitas keluarga petani secara keseluruhan juga terdorong naik.

Pada aspek partisipasi, perempuan didorong untuk berperan aktif dalam kelembagaan pertanian. Keterlibatan mereka dalam kelompok tani, gabungan kelompok tani, hingga koperasi pertanian, tidak hanya sebatas sebagai anggota pasif, tetapi juga diberi kesempatan untuk mengambil peran kepemimpinan, misalnya sebagai ketua kelompok, bendahara, atau koordinator kegiatan. Dengan demikian, suara perempuan dalam pengambilan keputusan dapat lebih terwakili dan kebijakan yang lahir dari kelembagaan pertanian menjadi lebih inklusif.

Dengan memperkuat akses dan partisipasi, Dinas Pertanian berupaya menciptakan ekosistem pertanian yang lebih adil dan setara. Perempuan bukan lagi hanya sebagai pelengkap, tetapi sebagai aktor utama yang dapat mendorong peningkatan produktivitas, ketahanan pangan, dan kesejahteraan keluarga tani secara berkelanjutan.

Misi 2: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan

Misi ini bertujuan untuk membangun ekonomi yang inklusif, di mana semua lapisan masyarakat memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dan mendapatkan manfaat dari pembangunan ekonomi. Termasuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi usaha kecil dan menengah, meningkatkan akses ke pendidikan dan pelatihan, serta memperkuat dukungan bagi kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Selain itu, misi ini

juga menekankan pentingnya ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Hal ini berarti mendukung pertanian lokal, mengurangi ketergantungan pada impor, dan memastikan bahwa produksi pangan dilakukan dengan cara yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya mendapatkan akses yang lebih baik ke makanan yang sehat dan bergizi, tetapi juga berkontribusi pada ekonomi lokal dan menjaga keseimbangan ekosistem

Misi 3: Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintah dan Pelayanan Publik yang Partisipatif, Transparan dan Akuntabel

Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan tata kelola pemerintahan dengan menekankan pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam setiap tahap proses pengambilan keputusan serta pelaksanaan kebijakan. Dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, diharapkan kebijakan yang diambil akan lebih relevan, tepat sasaran, dan dapat diterima oleh semua pihak. Pemerintah akan menyediakan berbagai forum dan mekanisme partisipatif yang memungkinkan masyarakat untuk berdialog, menyampaikan aspirasi, serta memberikan masukan secara konstruktif. Selain itu, langkah ini juga mencakup penguatan kapasitas aparatur pemerintah agar lebih responsif, profesional, dan berintegritas dalam memberikan pelayanan publik.

Misi 4: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Pembangunan Infrastruktur yang Terintegrasi

Misi ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara pelestarian alam dan kemajuan dalam pembangunan fisik wilayah. Kualitas lingkungan hidup yang baik menjadi dasar penting bagi keberlangsungan hidup masyarakat, karena berkaitan langsung dengan ketersediaan udara bersih, air layak konsumsi, lahan subur, serta ekosistem yang sehat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, konservasi keanekaragaman hayati, serta mitigasi terhadap dampak perubahan iklim. Langkah ini tidak hanya menjamin keberlanjutan lingkungan bagi generasi saat ini dan mendatang, tetapi juga mendukung terciptanya kualitas hidup yang lebih baik bagi masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang terintegrasi diperlukan untuk mendukung konektivitas antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat dan barang, serta meningkatkan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi. Terintegrasi dalam pembangunan infrastruktur berarti setiap pembangunan dilakukan secara terpadu, memperhatikan tata ruang, daya dukung lingkungan, dan

kebutuhan jangka panjang. Hal ini bertujuan agar infrastruktur yang dibangun tidak hanya fungsional dan efisien, tetapi juga selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan kombinasi antara lingkungan hidup yang terjaga dan infrastruktur yang terencana dengan baik, diharapkan pembangunan daerah dapat berlangsung secara seimbang, inklusif, dan berkelanjutan.

Misi 5: Menjaga Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum

Misi ini merupakan langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Dengan meningkatkan koordinasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan masyarakat, kita dapat memastikan bahwa ketertiban umum selalu terjaga. Program-program keamanan berbasis masyarakat seperti patroli lingkungan dan pengawasan warga, melalui upaya ini diharapkan membantu meminimalisir potensi konflik dan kriminalitas di Kabupaten Bandung.

Sejalan dengan Misi tersebut, pelaksanaan pelayanan (Tupoksi) Dinas Pertanian menunjang Misi ke-2 yaitu Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan.

Dinas Pertanian memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pencapaian Misi ke-2 Kabupaten Bandung, yaitu meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendorong ketahanan pangan melalui produksi pangan lokal yang berkelanjutan. Sektor pertanian merupakan pilar utama penggerak ekonomi masyarakat, khususnya di wilayah perdesaan yang sebagian besar penduduknya menggantungkan hidup dari usaha tani. Melalui pengembangan subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan, Dinas Pertanian mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah komoditas lokal yang tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan lapangan kerja baru, mengurangi kemiskinan, serta memperkuat struktur ekonomi kerakyatan.

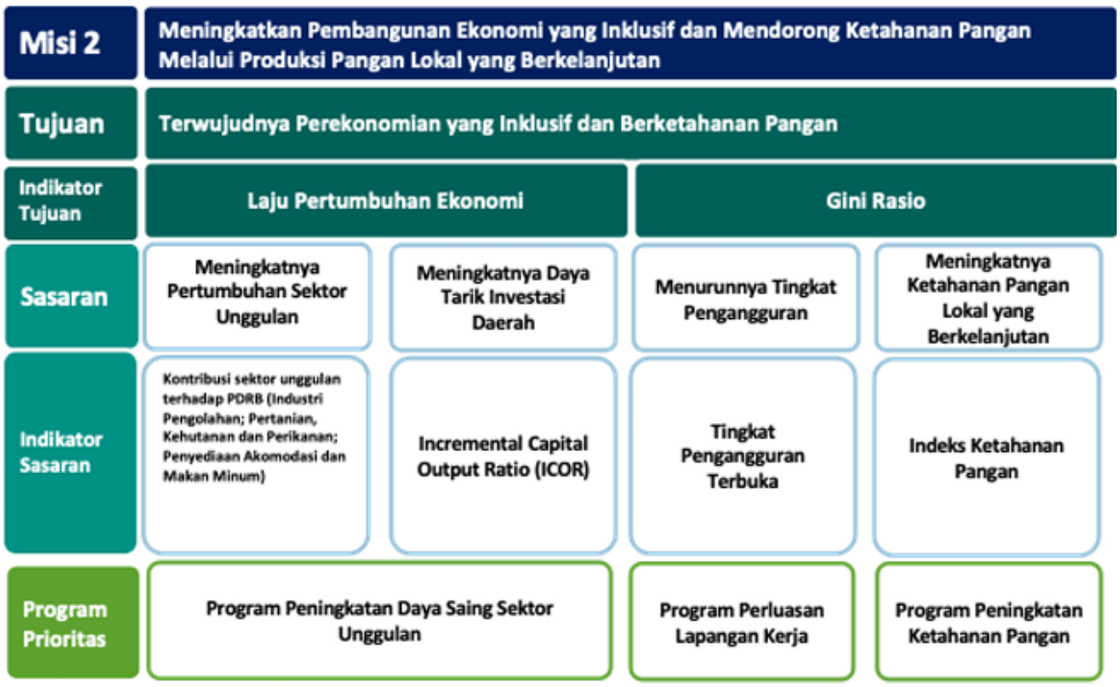
Di sisi lain, pertanian juga memainkan peran krusial dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Ketersediaan pangan lokal yang cukup, aman, dan bergizi menjadi dasar bagi stabilitas sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Dinas Pertanian mengembangkan berbagai program untuk memperkuat kapasitas produksi, meminimalkan risiko gangguan pasokan melalui sistem pertanian yang adaptif dan tangguh terhadap perubahan iklim, serta memperluas akses pasar bagi produk-produk lokal. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan yang

menyeimbangkan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan sektor pertanian bukan hanya menjadi tolok ukur kemajuan subsektor tertentu, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya pembangunan ekonomi yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan di Kabupaten Bandung.

## 3.1 Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian 2025-2029

### 3.1.1 Tujuan Renstra Dinas Pertanian

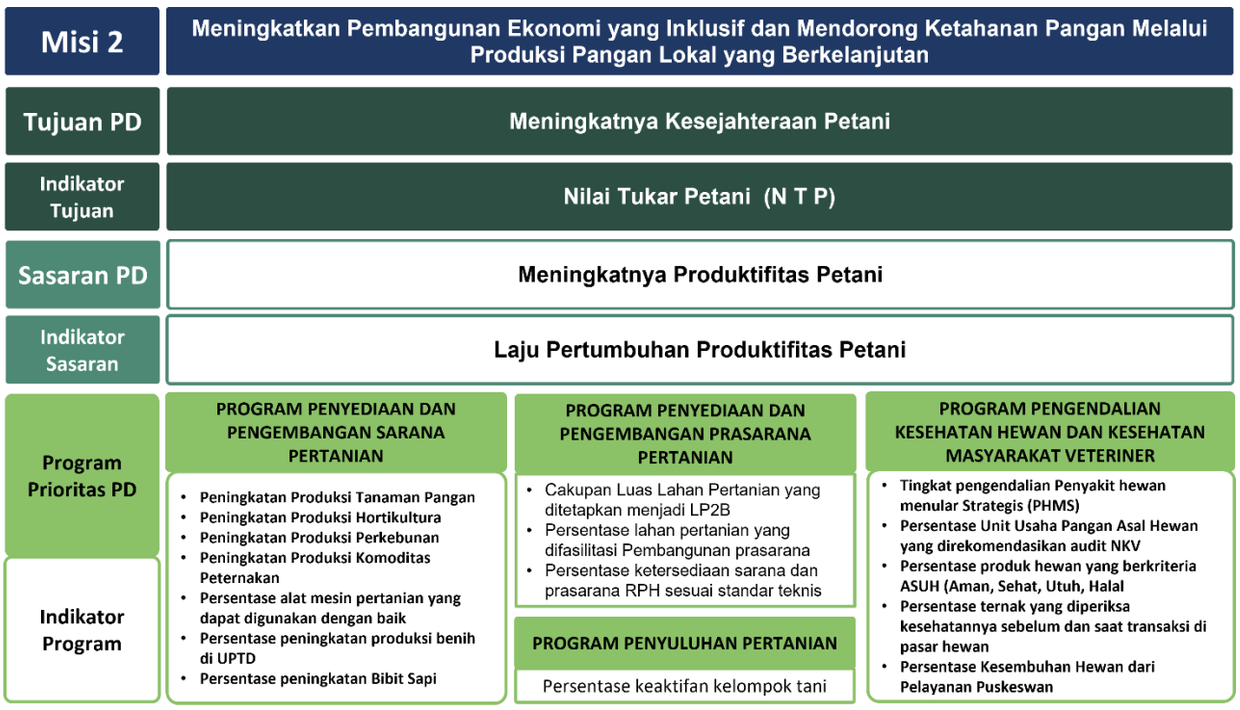
Gambar 3.2 Cascading Misi Pembangunan Kabupaten Bandung




Sumber : RPJMD 2025-2029

Misi RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2025-2029 yang berkaitan dengan Dinas Pertanian adalah Misi ke-2. Cascading tersebut menunjukkan bahwa tujuan dari misi ke-2 tersebut adalah Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan yang sekaligus menjadi NSPK RPJMD yang relevan dengan Dinas Pertanian yaitu Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan.

Gambar 3.3 Cascading Dinas Pertanian




Sumber : Dinas Pertanian, 2025-2029

Dalam rangka mendukung Misi ke-2 Pemerintah Kabupaten Bandung, yaitu “Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan”, Dinas Pertanian membangun struktur pohon kinerja yang menggambarkan keterkaitan logis antara Tujuan, Sasaran, dan Program Prioritas. Pohon kinerja ini menjadi alat untuk memastikan bahwa seluruh intervensi kebijakan dan program dapat menjawab tantangan nyata yang dihadapi petani dan pertanian secara keseluruhan.

Secara umum, petani di Kabupaten Bandung masih menghadapi tantangan dalam peningkatan kesejahteraan. Ketergantungan pada usaha tani skala kecil, keterbatasan akses terhadap sarana produksi, teknologi, pembiayaan, dan pasar menyebabkan produktivitas dan pendapatan petani belum optimal. Berdasarkan data Nilai Tukar Petani (NTP), posisi daya beli petani cenderung fluktuatif dan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi yang ideal untuk menunjang kehidupan yang layak. Selain itu, fenomena perubahan pemanfaatan lahan, perubahan iklim, serta volatilitas harga komoditas semakin menekan margin usaha tani, terutama di tanaman pangan dan hortikultura.

Menanggapi kondisi tersebut**,** Tujuan Perangkat Daerah yang ditetapkan adalah “Meningkatnya Kesejahteraan Petani”. Tujuan ini menjadi representasi dari tekad Pemerintah Kabupaten Bandung untuk menjadikan pertanian sebagai pengungkit utama kesejahteraan ekonomi masyarakat perdesaan.

Untuk mengukur kemajuan terhadap tujuan tersebut digunakan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencerminkan daya beli dan posisi petani dalam kegiatan ekonomi.

### 3.1.2 Sasaran Renstra Dinas Pertanian

Pada Sasaran Perangkat Daerah, dirumuskan sasaran “Meningkatnya Produktivitas Petani” sebagai penanda keberhasilan antara yang lebih operasional. Sasaran ini dimaknai sebagai peningkatan rata-rata pendapatan petani setiap tahunnya. Dengan Laju Pertumbuhan Produktivitas Petani, arah pembangunan pertanian lebih pada nilai ekonomi dan bukan hanya volume produksi.

Selanjutnya, Program Prioritas Perangkat Daerah diarahkan pada penguatan ekosistem usaha tani, melalui penyediaan sarana dan prasarana produksi, peningkatan kapasitas SDM pertanian, fasilitasi akses teknologi dan informasi, serta pembentukan jejaring agribisnis yang mendukung efisiensi dan stabilitas harga. Program-program ini juga diarahkan untuk mengembangkan ketahanan pangan berbasis melalui peningkatan diversifikasi produksi, kemandirian benih, dan penguatan kelembagaan petani.

Melalui arah pembangunan ini, diharapkan dalam kurun waktu 5 tahun ke depan akan terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kualitas hidup petani. Kesejahteraan petani diharapkan tidak hanya diukur dari aspek ekonomi, tetapi juga dari peningkatan kapasitas, keberlanjutan usaha, dan kemandirian dalam menghadapi tantangan global. Nilai Tukar Petani diharapkan meningkat secara stabil di atas angka 100, sebagai indikasi meningkatnya daya beli dan keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran rumah tangga petani. Pendapatan rata-rata petani juga ditargetkan meningkat secara bertahap, dengan basis usaha tani yang lebih modern, berorientasi pasar, namun tetap berbasis dan ramah lingkungan.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| - Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | | Nilai Tukar Petani (NTP) (Indeks) | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dikalikan 100.<br>NTP > 100 → Petani mengalami surplus (harga yang diterima lebih besar dari yang dibayar).<br><br>NTP = 100 → Petani berada pada titik impas.<br><br>NTP < 100 → Petani mengalami 154eficit (harga yang diterima lebih kecil dari yang dibayar). |
| | | Meningkatnya Produktivitas Petani | Laju Pertumbuhan Produktifitas Petani (%) | 1.199 | 2.168 | 2.892 | 3.633 | 4.550 | 5.265 | Persentase perubahan laju produktivitas hasil produksi pertanian pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. |

Sumber : Tabel SIPD Renstra 2025-2029

## 3.2 Strategi Dinas Pertanian dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

Strategi pembangunan sektor pertanian Kabupaten Bandung disusun sebagai respon terhadap isu-isu strategis yang telah dirumuskan, serta sebagai wujud dari komitmen daerah dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah. Strategi ini dirancang secara terarah, terukur, dan kontekstual dengan mempertimbangkan tantangan nyata di lapangan, potensi wilayah, serta keselarasan dengan kebijakan nasional dan provinsi. Tujuannya adalah menciptakan transformasi sektor pertanian yang mampu menjawab persoalan produktivitas, daya saing, keberlanjutan sumber daya, dan kesejahteraan petani secara terpadu.

Dalam penyusunannya, strategi pembangunan mengacu pada pendekatan berbasis hasil (result-based planning), dengan menitikberatkan pada pencapaian sasaran pembangunan melalui kombinasi antara intervensi teknis, pemberdayaan, serta penguatan regulasi dan kelembagaan. Pendekatan ini selaras dengan instrumen perencanaan nasional seperti RPJMN 2025–2029, Prioritas Pembangunan Jawa Barat, serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs). Strategi juga memperhatikan prinsip inklusivitas, keberlanjutan lingkungan, dan peningkatan adaptasi terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar global.

Sebagai landasan implementatif, strategi pembangunan sektor pertanian akan dijabarkan ke dalam sejumlah arah kebijakan, program, dan kegiatan yang terukur dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah serta efisiensi dalam setiap rantai produksi. Keterpaduan lintas subsektor seperti tanaman pangan, hortikultura, peternakan, dan perkebunan ditekankan dalam rangka menciptakan sinergi pembangunan kawasan berbasis komoditas unggulan lokal.

Melalui strategi ini, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung diharapkan dapat mendorong transformasi struktural di sektor pertanian — dari sekadar produksi menuju penguatan kelembagaan usaha tani, hilirisasi produk, dan integrasi pertanian sebagai pilar utama perekonomian daerah. Strategi-strategi yang disusun juga diarahkan untuk memperkuat peran petani sebagai pelaku utama pembangunan desa, sekaligus mewujudkan visi daerah: “Terwujudnya Perekonomian yang Inklusif dan Berketahanan Pangan.”

Tabel 3.4 Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

| VISI: Terwujudnya Kabupaten Bandung Lebih Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera (BEDAS), Maju dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas | | |
|---|---|---|
| Misi 2.: Meningkatkan Pembangunan Ekonomi yang Inklusif dan Mendorong Ketahanan Pangan Melalui Produksi Pangan Lokal yang Berkelanjutan | | |
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| Meningkatnya kesejahteraan petani | Meningkatnya Produktivitas Petani | ST 1: Peningkatan Akses Sarana Produksi Pertanian |
| | | ST 2: Pengembangan Kawasan Pertanian Berbasis Komoditi Unggulan Lokal |
| | | ST 3: Pemanfaatan Teknologi Pertanian yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan |
| | | ST 4: Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Budidaya |
| | | ST 5: Peningkatan Infrastruktur Unit Pelayanan Teknis Dinas Pertanian |
| | | ST 6: Penguatan Infrastruktur Pascapanen dan Sistem Rantai Nilai (Value Chain) |
| | | ST 7: Penguatan Sistem Deteksi Dini, Surveilans, dan Respon Cepat OPT dan Penyakit Hewan |
| | | ST 8: Pengembangan Sistem Pengendalian yang Terpadu, Berkelanjutan, dan Berbasis Komunitas |
| | | ST 9: Penguatan Kelembagaan Petani dan Ekosistem Kemitraan Usaha Tani |
| | | ST 10: Peningkatan Kinerja dan Akses Pelayanan Teknis Pertanian oleh UPTD |
| | | ST 11: Penguatan Sistem Perlindungan Petani terhadap Risiko Usaha Pertanian |
| | | ST 12: Peningkatan Kapasitas dan Teknologi Pengolahan Hasil Pertanian |
| | | ST 13: Penguatan Kelembagaan dan Ekosistem Hilirisasi Pertanian |
| | | ST 14: Penguatan Akses Pasar dan Branding Produk Pertanian Olahan |
| | | ST 15: Penguatan Kebijakan dan Penegakan Perlindungan Lahan Pertanian) |
| | | ST 16: Rehabilitasi dan Konservasi Lahan Pertanian yang Mengalami Degradasi |

| | | |
|---|---|---|
| | | ST 17: Optimalisasi Tata Kelola dan Produktivitas Lahan Pertanian Eksisting |

Sumber : Dinas Pertanian, 2025

Adapun dasar penyusunan tahapan pembangunan dinas pertanian periode 2025-2029 sebagaimana mengacu pada RPJMD 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5 Penahapan Renstra Dinas Pertanian

| Tahap I (2025) | Tahap II (2026) | Tahap III (2027) | Tahap IV (2028) | Tahap V (2029) |
|---|---|---|---|---|
| Pemerataan Kualitas SDM dan Infrastruktur Dalam Menunjang Pelayanan Publik yang Optimal | Peningkatan SDM dan Infrastruktur yang Berkualitas Dalam Kesejahteraan Masyarakat | Peningkatan Daya Saing Daerah yang Berkelanjutan | Pemantapan Pembangunan Daerah Berkelanjutan | Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Bandung Lebih Bedas, Maju dan Berkelanjutan |
| Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui penguatan database dan pemetaan lahan berkelanjutan | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui penguatan database, peningkatan daya dukung lahan dan air, peningkatan benih unggulan | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui penguatan database, peningkatan daya dukung lahan dan air, peningkatan benih unggulan | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui penguatan database, peningkatan daya dukung lahan dan air, peningkatan benih unggulan | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan melalui peningkatan daya dukung lahan dan air, peningkatan benih unggulan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan) | Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan) | Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan) | Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan) | Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan) |
| Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian | Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian | Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian | Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian | Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian |
| Pengembangan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan | Pengembangan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan | Pengembangan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan | Pengembangan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan | Pengembangan hilirisasi produk pertanian berdasarkan klaster unggulan |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas | Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan melalui penguatan kelembagaan ketahanan dan keamanan pangan penguatan simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas | Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan melalui kelembagaan ketahanan dan keamanan pangan penguatan simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas yang kolaboratif dan terpadu | Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan melalui penguatan kelembagaan ketahanan dan keamanan pangan penguatan simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas yang kolaboratif dan terpadu | Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan melalui penguatan kelembagaan ketahanan dan keamanan pangan penguatan simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas yang kolaboratif dan terpadu |

Sumber : RPJMD Kab Bandung, 2025-2029

## 3.3. Penyajian Lokus PD

Tabel 3.6 Penyajian Lokus Dinas Pertanian

| No | Program | Pagu Indikatif | | | | | Lokus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 45.983.501.278 | 46.675.923.000 | 46.675.923.000 | 46.675.923.000 | 46.675.923.000 | Mencakup dukungan administrasi, perencanaan, keuangan, serta pengelolaan 160 endi dan kepegawaian yang menjadi dasar kelancaran seluruh layanan dan kegiatan teknis Dinas Pertanian. Dilaksanakan di seluruh unit kerja Dinas Pertanian, baik di kantor dinas maupun UPT, sebagai fungsi pendukung kelembagaan. |
| 2 | Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian | 24.080.268.211 | 11.699.397.643 | 10.466.585.143 | 10.925.960.143 | 11.354.483.111 | Fokus pada penyediaan benih, pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian, serta sarana pendukung lainnya untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha tani. Dilaksanakan di wilayah sentra pertanian yang membutuhkan dukungan sarana, lokus diarahkan pada kelompok tani, |

| No | Program | Pagu Indikatif | | | | | Lokus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | | | | | | gapoktan, dan KWT penerima bantuan sarana produksi. |
| 3 | Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian | 5.220.000.000 | 2.690.092.880 | 3.912.620.651 | 3.387.072.151 | 7.879.127.961 | Meliputi pembangunan, rehabilitasi, dan pemeliharaan jaringan irigasi, jalan usaha tani, serta infrastruktur pendukung lain guna mendukung ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Lokusnya meliputi jaringan irigasi desa, jalan usaha tani, embung, dan 161 endidi pertanian terpadu. Prioritas diarahkan pada kecamatan. |

| No | Program | Pagu Indikatif | | | | | Lokus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 4 | Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 2.708.000.000 | 2.876.279.666 | 2.886.564.395 | 2.952.737.895 | 3.032.159.117 | Mengatur upaya pencegahan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan menular serta zoonosis, termasuk peningkatan higienitas 162 endidikan 162 hewan, sertifikasi NKV, dan pelayanan veteriner bagi masyarakat. Lokus utama adalah UPTD Puskeswan, pasar hewan, rumah potong hewan (RPH), serta desa-desa dengan konsentrasi peternakan untuk pengendalian penyakit dan pengawasan produk asal hewan. |

| No | Program | Pagu Indikatif | | | | | Lokus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 5 | Program Penyuluhan Pertanian | 31.884.000.000 | 20.400.000.000 | 25.400.000.000 | 25.400.000.000 | 25.400.000.000 | meningkatkan kapasitas petani melalui 163endidikan, pelatihan, pendampingan, serta penguatan kelembagaan petani, agar mereka mampu mengadopsi teknologi, mengelola usaha tani secara berkelanjutan, dan meningkatkan daya saing produk pertanian. Difokuskan di seluruh kecamatan melalui Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) serta desa sentra produksi. Lokus utamanya adalah kelembagaan petani dan penyuluh lapangan |
| | Total | 109.875.769.489 | 84.341.693.189 | 89.341.693.189 | 89.341.693.189 | 94.341.693.189 | |

Sumber : Distan 2026-2030

## 3.4. Arah Kebijakan Dinas Pertanian dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029

Dalam rangka menjawab berbagai isu strategis yang dihadapi sektor pertanian di Kabupaten Bandung serta untuk memastikan pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah daerah tahun 2025–2029, maka disusunlah arah kebijakan sebagai turunan langsung dari strategi pembangunan pertanian.

Arah kebijakan ini dirumuskan secara sistematis untuk memberikan fokus dan kejelasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah, sehingga setiap intervensi dapat bersifat operasional, terukur, dan berorientasi hasil. Penyusunan arah kebijakan mempertimbangkan dinamika permasalahan sektoral, potensi wilayah, kerangka regulasi nasional dan daerah, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, arah kebijakan juga diarahkan untuk memperkuat integrasi antar subsektor tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan peternakan dengan pendekatan kawasan, hilirisasi, perlindungan petani, hingga penguatan kelembagaan. Setiap arah kebijakan disusun sebagai landasan teknis bagi perangkat daerah dalam menyusun program, kegiatan, dan sub kegiatan yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah serta target indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Tabel 3.7 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian

| Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Keterangan |
|---|---|---|---|
| Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan | Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas | Penyediaan informasi pasar, iklim, dan risiko usaha pertanian secara real-time melalui media digital. | |
| | | Pengembangan sistem digitalisasi rantai pasok pertanian untuk meningkatkan efisiensi pemasaran hasil panen. | |
| | Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas; Pemenuhan upaya pengurangan emisi karbon melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mendukung efisiensi energi | Promosi dan adopsi sistem pertanian organik dan ramah lingkungan | |
| | Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan) | Penyediaan pupuk bersubsidi dan non-subsidi secara tepat sasaran dan tepat waktu | |
| | | Penyediaan sarana pendukung budidaya seperti screen house, rumah benih, kandang komunal, dan unit pengolahan hijauan pakan. | |
| | | Peningkatan kualitas jalan usaha tani untuk memperlancar akses produksi dan distribusi hasil panen. | |
| | | Peningkatan koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengendalian | |

| Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | perizinan perubahan pemanfaatan lahan pertanian. | |
| | Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan); Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas | Fasilitasi kemitraan antara petani, pelaku UMKM agribisnis, dan offtaker untuk memperkuat jejaring pasar. | |
| | | Penyusunan rencana pengembangan kawasan agribisnis terpadu (budidaya–pasca panen–pemasaran). | |
| | Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan); Peningkatan ketersediaan dan kualitas air melalui pengembangan infrastruktur air baku, distribusi air minum, dan irigasi yang terkelola secara terintegrasi serta partisipatif; Pemenuhan upaya pengurangan emisi karbon melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mendukung efisiensi energi | Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendukung kawasan seperti jalan usaha tani, irigasi tersier, dan rumah kompos. | |
| | Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan); Peningkatan ketersediaan dan kualitas air melalui pengembangan infrastruktur air baku, distribusi air minum, dan irigasi yang terkelola secara terintegrasi serta partisipatif | Pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi usaha tani | |
| | | Pengembangan sistem reservasi dan pelaporan layanan teknis secara online melalui aplikasi pelayanan pertanian. | |

| Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian | Modernisasi dan pemeliharaan sarana prasarana UPTD untuk mendukung pelayanan teknis yang prima. | |
| | | Fasilitasi kemitraan dengan offtaker, distributor, dan pelaku e-commerce untuk memperluas jangkauan pemasaran. | |
| | | Fasilitasi inkubasi bisnis pertanian dan pelatihan manajemen kewirausahaan untuk kelompok tani milenial dan perempuan tani. | |
| | Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian; Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas | Peningkatan kapasitas kelompok tani dan kelembagaan tani dalam pengelolaan pascapanen dan pemasaran. | |
| | Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian; Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Fasilitasi pembentukan dan penguatan kelompok tani, Gapoktan, kelembagaan petani wanita, pemuda tani, dan koperasi pertanian. | |
| | Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian; Pengembangan IKM dan sentra industri berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk pertanian | Peningkatan keikutsertaan petani dalam BPJS ketenagakerjaan | |
| | | Peningkatan kapasitas manajerial dan teknis kelembagaan petani melalui pelatihan, dan pendampingan | |

| Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Kemitraan usaha antara petani dan pelaku industri hilir untuk meningkatkan daya saing produk pertanian lokal | |
| | Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Fasilitasi akses petani terhadap program asuransi pertanian seperti AUTP, AUTS/K, dan mitigasi risiko bencana. | |
| | Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG); Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas | Pemanfaatan lahan sempit dan pekarangan melalui program pertanian urban dan pertanian keluarga. | |
| | Pengembangan IKM dan sentra industri berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk pertanian | Fasilitasi penyediaan alat dan mesin pengolahan hasil pertanian sesuai kebutuhan komoditas dan skala usaha. | |
| | | Pembangunan dan rehabilitasi Unit Pengolahan Hasil (UPH), mini pabrik olahan, dan rumah produksi skala desa. | |
| | | Penguatan kemampuan teknis kelompok tani dan UMKM pertanian dalam teknologi pengolahan dan pengemasan. | |
| | | Promosi produk pertanian dan hasil olahan komoditas unggulan | |

| Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Penguatan sistem sertifikasi dan pelabelan produk yang mendukung daya saing di pasar lokal, nasional, dan ekspor. | |
| | Pengembangan IKM dan sentra industri berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk pertanian; Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas | Pembangunan dan penyediaan sarana pascapanen seperti rumah pengering, cold storage, packing house, rice milling unit (RMU), dan unit pengolahan hasil (UPH). | |
| | Pengembangan IKM dan sentra industri berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk pertanian; Pemenuhan upaya pengurangan emisi karbon melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mendukung efisiensi energi | Pengembangan inovasi produk pertanian berbasis potensi lokal (produk fermentasi, ekstrak herbal, pangan fungsional, dll). | |
| | Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya | Pembangunan infrastruktur baru bagi UPTD Pertanian | |
| | | Pemeliharaan sarana dan prasarana budidaya oleh kelompok tani atau UPT berbasis peran serta masyarakat tani | |
| | | Rehabilitasi dan Peningkatan prasarana UPTD Pertanian yang eksisting | |
| | | Standardisasi layanan teknis pertanian sesuai SOP berbasis kebutuhan wilayah dan komoditas. | |

| Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Penguatan kelembagaan dan SDM UPTD pertanian | |
| | Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya; Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas | Penguatan kelompok tani dan peternak dalam deteksi dini serta penanganan awal secara swadaya dan cepat. | |
| | Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya; Pengembangan dan penguatan kerjasama antara petani dan pelaku usaha pertanian | Pemberdayaan petani dalam skema korporatisasi berbasis kawasan unggulan. | |
| | | Pengembangan platform digital kelembagaan tani untuk pendataan, pemetaan potensi, dan fasilitasi jejaring kemitraan | |
| | Pengembangan investasi berbasis sektor pertanian, energi terbarukan, pariwisata, perindustrian dan potensi sektor lainnya; Pengembangan IKM dan sentra industri berbasis potensi lokal serta hilirisasi produk pertanian | Penguatan kelembagaan ekonomi petani berbasis usaha hilir (koperasi, UMKM, BUMDesa agroindustri). | |
| | | Pengembangan kawasan hilirisasi terpadu yang terhubung dengan sentra produksi dan pasar lokal | |
| | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan | Bantuan alat mesin pertanian (alsintan) pra dan pasca panen bagi kelompok tani prioritas. | |
| | | Inventarisasi dan pemetaan lahan kritis dan terdegradasi di kawasan pertanian. | |

| Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | Optimalisasi implementasi peraturan perundangan perlindungan lahan sawah produktif. | |
| | | Peningkatan kapasitas dan cakupan kegiatan surveilans OPT dan penyakit hewan di wilayah rentan. | |
| | | Penyiapan unit reaksi cepat (URC) pengendalian hama dan penyakit pada tanaman dan ternak berbasis wilayah. | |
| | | Promosi dan penerapan pengendalian hama terpadu (PHT) dan pengendalian penyakit hewan berbasis zona dan kompartemen. | |
| | | Revitalisasi dan pemenuhan logistik posko pengendalian penyakit ternak dan gudang penyimpanan bahan pengendalian OPT | |
| | | Penguatan peran Gapoktan dan lembaga ekonomi petani dalam distribusi saprodi, pengelolaan pascapanen, dan akses pasar. | |
| | | Penyusunan dan pemutakhiran data petani sebagai dasar penyaluran program perlindungan | |
| | | Peningkatan kompetensi petugas pengendalian OPT dan petugas | |

| Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | | kesehatan hewan melalui pelatihan teknis. | |
| | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; Pemenuhan dan pemerataan perwujudan pilar ketahanan dan keamanan pangan (ketersediaan, keterjangkauan, pemanfaatan dan tata kelola) melalui simpul pangan tingkat regional dan berbasis komunitas | Integrasi pertanian presisi (precision farming) untuk komoditas unggulan menggunakan sensor, drone, atau aplikasi analitik sederhana | |
| | | Pengembangan dan penerapan sistem informasi digital untuk pelaporan dan pemetaan wabah OPT dan penyakit hewan secara real-time. | |
| | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; Pemenuhan pemerataan sarana dan prasarana pengembangan klaster pertanian dan perikanan melalui kartu tani serta peningkatan kualitas infrastruktur pertanian (irigasi dan jalan) | Penetapan dan pemetaan kawasan sentra komoditas strategis berdasarkan potensi wilayah dan daya dukung lahan. | |
| | | Pengembangan sistem insentif (fiskal atau non-fiskal) bagi petani yang mempertahankan lahan pertanian. | |
| | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; Pemenuhan upaya pengurangan emisi karbon melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan, ramah lingkungan, serta mendukung efisiensi energi | Fasilitasi penyediaan sarana pengendalian ramah lingkungan seperti agens hayati, pestisida nabati, dan vaksin. | |
| | | Pemberdayaan petani dalam pengelolaan lahan secara ramah lingkungan dan berkelanjutan. | |

| Operasionalisasi NSPK | Arah Kebijakan RPJMD | Arah Kebijakan Renstra PD | Keterangan |
|---|---|---|---|
| | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; Pengembangan Ekosistem Program Makan Bergizi Gratis (MBG) | Fasilitasi distribusi benih/bibit unggul tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan ternak sesuai agroekosistem lokal. | |
| | Peningkatan produksi dan produktivitas melalui optimalisasi pemanfaatan lahan berkelanjutan; Peningkatan ketersediaan dan kualitas air melalui pengembangan infrastruktur air baku, distribusi air minum, dan irigasi yang terkelola secara terintegrasi serta partisipatif | Penerapan teknologi konservasi lahan seperti terasering, rorak, guludan, dan penanaman tanaman penutup tanah. | |
| | | Penerapan teknologi konservasi tanah dan air untuk menjaga kesuburan lahan dan ketersediaan air. | |

Sumber : RPJMD Kab Bandung & Dinas Pertanian, 2025-2029

# BAB IV

# RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARA URUSAN

## 4.1 Uraian Program, Kegiatan, Subkegiatan, beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif

Perencanaan program dan kegiatan diperlukan elemen pokok pendukung lain berupa: Indikator kerja sebagai parameter penilaian dari keberhasilan program dan kegiatan, kelompok sasaran merupakan objek dari program/kegiatan dan pendanaan indikatif sebagai indikasi awal besaran dana yang diperlukan untuk terlaksananya program dan kegiatan. Secara keseluruhan Terdapat Tujuan Dinas yang ditetapkan, yaitu:

1. Meningkatnya kesejahteraan petani dengan indikator tujuan Nilai Tukar Petani. Upaya pencapaian tujuan ini dapat terwujud apabila tercapainya sasaran pembangunan, yaitu Meningkatnya Produktivitas Petani dengan indikator Laju Pertumbuhan Produktivitas Petani.

   Untuk mencapai kinerja sasaran perlu ditunjang dengan pelaksanaan program pembangunan urusan Pertanian, yaitu:

   1) Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian
   2) Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian
   3) Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
   4) Program Penyuluhan Pertanian

Rincian keselarasan Program, kegiatan dan sub kegiatan serta keterkaitannya dengan Sasaran dan Tujuan Dinas diuraikan dalam Tabel Program/Kegiatan/Subkegiatan Urusan dengan memperhatikan cascading kinerja Dinas Pertanian.

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| - Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | | | | Nilai Tukar Petani (NTP) (Poin) | | Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dikalikan 100. |
| | | Meningkatnya Produktivitas Petani | | | Laju Pertumbuhan Produktifitas Petani (%) | | Persentase perubahan laju produktivitas hasil produksi pertanian pada tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Persentase) | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | (JumlaH Produksi Tanaman Pangan taHun Ke N - JumlaH Produksi Tanaman Pangan TaHun Ke N-1) / JumlaH Produksi Tanaman Pangan TaHun Ke N-1 |
| | | | | | Peningkatan Produksi Hortikultura (Persentase) | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | (JumlaH Produksi Hortikultura taHun Ke N - JumlaH Produksi Hortikultura TaHun Ke N-1) / JumlaH Produksi Hortikultura TaHun Ke N-1 |
| | | | | | Peningkatan Produksi Perkebunan (%) | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | (JumlaH Produksi Perkebunan tahun Ke N - JumlaH Produksi Perkebunan TaHun Ke N-1) / JumlaH Produksi Perkebunan TaHun Ke N-1 |
| | | | | | Peningkatan Produksi Peternakan (%) | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | (Jumlah Produksi Daging + Produksi Susu + Produksi Telur Tahun n - Jumlah Produksi Daging + Produksi Susu + Produksi Telur Tahun n-1)/Jumlah Produksi Daging + Produksi Susu + Produksi Telur Tahun n-1 |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Peningkatan produktivitas tanaman pangan serta presentase kelompok tani yang ditingkatkan sarana pengolahan dan pascapanen | 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Persentase kelompok tani yang ditingkatkan sarana pengolahan dan pascapanen tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* hortikultura dan perkebunan | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) | 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan) |
| | | | | Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) |
| | | | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan) | 3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan (Laporan) |
| | | | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan) | 3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan (Laporan) |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan) | 3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura (Laporan) |
| | | | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan) | 3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan (Laporan) |
| | | | | Terawasinya penggunaan sarana pascapanen hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan) | 3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura (Laporan) |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)*<br>Meningkatnya produktivitas hortikultura dan perkebunan | *(06)*<br>Persentase Peningkatan produktivitas hortikultura dan perkebunan | *(07)*<br>3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | *(08)*<br>(JumlaH produktivitas Perkebunan taHun Ke N - JumlaH produktivitas Perkebunan TaHun Ke N-1) / JumlaH produktivitas Perkebunan TaHun Ke N-1 |
| | | | | Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) |
| | | | | Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) | 3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen) |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terkendalinya dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kelompok ternak yang ditingkatkan kapasitas budidaya | 3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kelompok ternak yang ditingkatkan kapasitasnya / Jumlah Kelompok Ternak Di Kabupaten Bandung |
| | | | | Terawasinya Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan) | 3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan (Laporan) |
| | | | | Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan) | 3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan) |
| | | | | Terkendalinya Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan) | 3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan) |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Tersedianya Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Persentase pertumbuhan populasi ternak | 3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | (Jumlah populasi pada akhir tahun n - Jumlah populasi pada akhir Tahun n-1) / Jumlah populasi pada akhir tahun n |
| | | | | Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) | 3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain (Ton) |
| | | | | Tersedianya Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor) | 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain (Ekor) |
| | | | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan jadi LP2B (%) | 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Luas Lahan yang ditetapkan menjadi LP2B / Luas Lahan Pertanian |
| | | | | | Persentase Lahan Pertanian yang difasilitasi pembangunan prasarana pertanian () | 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Luas Lahan yang difasilitasi Pembangunan Prasarana Pertanian / Luas Lahan Baku sawah |
| | | | | Meningkatnya pengelolaan dan perlindungan wilayah LP2B secara terpadu dan partisipatif | Persentase wilayah LP2B yang telah difasilitasi dengan kegiatan perencanaan, sosialisasi, dan | 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian | Jumlah Desa dalam Wilayah LP2B yang difasilitasi kegiatan perencanaan, sosiaslisasi dan koordinasi lintas sektor / jumlah total desa dalam wilayah LP2B |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* koordinasi lintas sektor | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) | 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya (Laporan) |
| | | | | Tersusunnya Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen) | 3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian (Dokumen) |
| | | | | Meningkatnya ketersediaan dan fungsi prasarana pendukung budidaya pertanian yang sesuai kebutuhan kawasan Meningkatnya luas lahan pertanian yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian | Persentase prasarana pendukung budidaya pertanian yang berfungsi optimal setelah dibangun, direhabilitasi, atau dipelihara | 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah unit prasarana yang telah digunakan dan menunjang kegiatan tani / Jumlah total unit sarpras yang telah diintervensi fisik dalam periode pelaporan Sarpras Dihitung Berfungsi Optimal apabila:<br>1. Sudah digunakan oleh kelompok tani.<br>2. Tidak rusak atau mangkrak.<br>3. Dimanfaatkan sesuai peruntukan (jalan → distribusi hasil, irigasi → saluran air aktif).<br>4. Diakui/dikonfirmasi oleh petugas lapangan atau poktan.<br>3 dari 4 checklist ☑ → bisa dianggap “berfungsi optimal |
| | | | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi | 3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* dan Dipelihara (Unit) | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpelihara Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) | 3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit) |
| | | | | Terbangun, Terehabilitasi dan Terpelihara Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) | 3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi (Unit) |
| | | | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) (%) | 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Rata-rata desa terbebas kasus penyakit hewan menular strategis. Jumlah Penyakit Hewan Menular Strategis yang dihitung berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 708 Tahun 2024 |
| | | | | | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) (Persentase) | 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang direkomendasikan audit NKV / Jumlah Unit Usaha Pangan asal hewan |
| | | | | Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam | Persentase cakupan wilayah pengawasan aktif penyakit hewan strategis | 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah wilayah ( Peternakan rakyat/ UPTD / Swasta ) yang dilaksanakan surveilance / Total wilayah yang terdata x 100% |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)*<br>daerah Kabupaten/Kota | *(06)* | *(07)*<br>Dalam daerah Kabupaten/Kota | *(08)* |
| | | | | Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Terjaminnya Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) | 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan) | 3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali (Laporan) |
| | | | | Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) | 3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah) |
| | | | | Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit | 3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* |
| | | | | Daerah Kabupaten/kota | hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota (Laporan) | dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Tingkat Kepatuhan unit usaha produk hewan atas rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan | Tingkat Kepatuhan unit usaha produk hewan atas rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan | 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah menerapkan rekomendasi dan pembinaan / jumlah unit usaha produk hewan yang dibina |
| | | | | Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) | 3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan) |
| | | | | Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen) | 3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen) |
| | | | | Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha) | 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha) |
| | | | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | | Persentase Keaktifan Kelompok Petani (%) | 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Jumlah Kelompok Tani Aktif / Jumlah Kelompok Tani yang terdaftar |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* Terlaksananya penyuluhan pertanian | *(06)* Persentase peningkatan kapasitas Kelompok Tani | *(07)* 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | *(08)* Jumlah kelompok tani yang ditingkatkan kapasitasnya / Jumlah kelompok Tani |
| | | | | Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) |
| | | | | Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) |
| | | | | Tersedianya dan Termanfaatkannya Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | 3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) |
| 3.27.0.00.0.00.22.0001 - UPTD ALAT MESIN PERTANIAN | | | | | | | |
| - Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Meningkatnya Produktivitas Petani | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | | Persentase Alat Mesin Pertanian yang dapat digunakan dengan baik (%) | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | (Jumlah alat mesin pertanian dengan status dapat digunakan (baik dan rusak ringan) / jumlah alat mesin pertanian di kab. Bandung - UPTD Alsintan |
| | | | | Terawasinya Penggunaan Sarana Pertanian | Tingkat Efektivitas Perbaikan Alat Mesin Pertanian | 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Jumlah Unit Alat Mesin Pertanian yang dapat berfungsi lagi / jumlah unit alat mesin pertanian yang diperbaiki - UPTD Alsintan |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | *(06)* Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) | *(07)* 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | *(08)* Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan) |
| 3.27.0.00.0.00.22.0002 - UPTD RUMAH POTONG HEWAN DAN UNGGAS | | | | | | | |
| - Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Meningkatnya Produktivitas Petani | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | | Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana RPH sesuai Standar Teknis (%) | 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | Jumlah sarana prasarana yang sesuai standar / Jumlah Total sarana prasarana yang dipersyaratkan - UPTD RPH |
| | | | | Meningkatnya ketersediaan dan fungsi prasarana pendukung budidaya pertanian yang sesuai kebutuhan kawasan Meningkatnya luas lahan pertanian yang terfasilitasi penyediaan prasarana pertanian | Persentase sarana dan prasarana di RPH yang berada dalam kondisi baik | 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian | Jumlah sarpras berfungsi baik / Jumlah total sarpras tersedia - UPTD RPH |
| | | | | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) | 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit) |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)*<br>Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | *(05)* | *(06)*<br>Persentase produk hewan yang berkriteria ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal) (%) | *(07)*<br>3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | *(08)*<br>Jumlah produk hewan dari UPTD RPH yang memenuhi Kriteria ASUH / Jumlah Produk Hewan dari UPTD RPH - UPTD RPH |
| | | | | Tingkat Kepatuhan unit usaha produk hewan atas rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan | Jumlah pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem pada pemotongan hewan | 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem hewan yang di potong di RPH / tahun - UPTD RPH |
| | | | | Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha) | 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi (Unit Usaha) |
| 3.27.0.00.0.00.22.0003 - UPTD PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN | | | | | | | |
| - Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Meningkatnya Produktivitas Petani | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | | Persentase Peningkatan Produksi Benih di UPTD (%) | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | (Jumlah produksi bibit atau benih di UPTD tahun n - Jumlah produksi bibit atau benih di UPTD tahun dasar)/Jumlah produksi bibit atau benih di UPTD tahun dasar - UPTD Pengembangan Teknologi Pertanian |
| | | | | Meningkatnya produktivitas hortikultura dan perkebunan | Persentase Kebutuhan sarana perbenihan tanaman yang terpenuhi | 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Sarana perbenihan yang tersedia dan berfungsi / Jumlah Sarana Perbenihan yang dibutuhkan - UPTD Pengembangan Teknologi Pertanian |
| | | | | Terjaminnya Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan | 3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* pemurnian (Varietas Unggul Baru (VUB)) | *(07)* Kelestarian SDG Tanaman | *(08)* |
| 3.27.0.00.0.00.22.0004 - UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN | | | | | | | |
| - Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Meningkatnya Produktivitas Petani | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | | Persentase Kesembuhan Hewan dari Pelayanan Puskeswan (%) | 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | Jumlah hewan yang dinyatakan sembuh setelah dilayani puskeswan / Jumlah Hewan yang ditangani pelayanan Puskeswan - UPTD Puskeswan |
| | | | | Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase desa terlayani pelayanan kesehatan hewan | 3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah desa target pelayanan/jumlah total desa di kab. Bandung - UPTD Puskeswan |
| | | | | Terkelolanya Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | 3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | | Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan) | 3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium | Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan) |
| | | | | Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) | 3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan) |
| 3.27.0.00.0.00.22.0005 - UPTD PASAR HEWAN | | | | | | | |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)*<br>- Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan | *(02)*<br>Meningkatnya Kesejahteraan Petani | *(03)*<br>Meningkatnya Produktivitas Petani | *(04)*<br>Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | *(05)* | *(06)*<br>Persentase ternak yang diperiksa kesehatannya sebelum dan saat transaksi di pasar hewan (%) | *(07)*<br>3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | *(08)*<br>Jumlah ternak yang diperiksa kesehatannya saat transaksi di Pasar Hewan / Jumlah ternak yang terlayani di UPTD Pasar Hewan - UPTD Pasar Hewan |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ternak yang terlayani di UPTD Pasar Hewan | 3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ternak yang masuk ke Pasar Hewan. Hewan yang masuk yaitu yang terjual maupun yang tidak terjual - UPTD Pasar Hewan |
| | | | | Terlaksananya Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan) | 3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan) |
| 3.27.0.00.0.00.22.0006 - UPTD PEMBIBITAN TERNAK RUMINANSIA | | | | | | | |
| - Meningkatnya Ketahanan Pangan yang Berkelanjutan | Meningkatnya Kesejahteraan Petani | Meningkatnya Produktivitas Petani | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | | Persentase Peningkatan Produksi Bibit Sapi (%) | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | (Jumlah Bibit Sapi yang dihasilkan UPTD Bitnak Tahun ke N - Jumlah Bibit Sapi yang dihasilkan UPTD Bitnak Tahun ke N-1) / Jumlah Bibit Sapi yang dihasilkan UPTD Bitnak Tahun ke N-1 - UPTD Pembibitan Ternak |
| | | | | Terkendalinya dan Terawasinya Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan | Persentase kebuntingan sapi induk di UPTD | 3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan | Jumlah sapi induk bunting / Jumlah sapi induk aktif - UPTD Pembibitan Ternak |

| NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN | TUJUAN | SASARAN | OUTCOME | OUTPUT | INDIKATOR | PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | *(06)* | *(07)* Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | *(08)* |
| | | | | Terjaminnya Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan) | 3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan) |

Sumber : Tabel SIPD Renstra 2025-2029

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| 3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN | | | | 109.875.769.489 | | 84.341.693.189 | | 89.341.693.189,00 | | 89.341.693.189 | | 94.341.693.189 | |
| 3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | | | | 45.983.501.278 | | 46.675.923.000 | | 46.675.923.000,00 | | 46.675.923.000 | | 46.675.923.000 | S.2.1 |
| Meningkatnya Tata Kelola Internal Perangkat Daerah | Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah | 78.06 | 79.06 | 45.983.501.278 | 79.56 | 46.675.923.000 | 80.06 | 46.675.923.000,00 | 80.56 | 46.675.923.000 | 81.06 | 46.675.923.000 | |
| | Indeks Manajemen Risiko | 50.71 | 52.71 | | 53.71 | | 54.71 | | 55.71 | | 56.71 | | |
| 3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai AKIP | | 85 | 778.665.000 | 86 | 843.005.000 | 87 | 843.005.000 | 88 | 843.005.000 | 89 | 843.005.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| 3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 4 | 4 | 128.045.000 | 4 | 121.545.000 | 4 | 121.545.000 | 4 | 121.545.000 | 4 | 121.545.000 | |
| 3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD | 1 | 1 | 8.240.000 | 1 | 8.240.000 | 1 | 8.240.000 | 1 | 8.240.000 | 1 | 8.240.000 | |
| 3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD | 1 | 1 | 18.240.000 | 1 | 18.240.000 | 1 | 18.240.000 | 1 | 18.240.000 | 1 | 18.240.000 | |
| 3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD | Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD | 1 | 1 | 6.000.000 | 1 | 8.240.000 | 1 | 8.240.000 | 1 | 8.240.000 | 1 | 8.240.000 | |
| 3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD | Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD | 1 | 1 | 18.240.000 | 1 | 18.240.000 | 1 | 18.240.000 | 1 | 18.240.000 | 1 | 18.240.000 | |
| 3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 6 | 6 | 83.500.000 | 6 | 77.700.000 | 6 | 77.700.000 | 6 | 77.700.000 | 6 | 77.700.000 | |
| 3.27.01.2.01.0008 - Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah | 1 | 1 | 26.300.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 26.300.000 | 1 | 26.300.000 | |
| 3.27.01.2.01.0009 - Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah | 10 | 10 | 490.100.000 | 10 | 564.500.000 | 10 | 564.500.000 | 10 | 564.500.000 | 10 | 564.500.000 | |
| 3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang tepat waktu | | 100% | 38.529.968.000 | 100% | 38.529.968.000 | 100% | 38.529.968.000 | 100% | 38.529.968.000 | 100% | 38.529.968.000 | |
| 3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 190 | 190 | 38.505.668.000 | 190 | 38.505.668.000 | 190 | 38.505.668.000 | 190 | 38.505.668.000 | 190 | 38.505.668.000 | |
| 3.27.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD | 1 | 1 | 4.300.000 | 1 | 4.300.000 | 1 | 4.300.000 | 1 | 4.300.000 | 1 | 4.300.000 | |
| 3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | 1 | 5.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| 3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 17 | 17 | 15.000.000 | 17 | 15.000.000 | 17 | 15.000.000 | 17 | 15.000.000 | 17 | 15.000.000 | |
| 3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah | Persentase Pemenuhan Dokumen Administrasi BMD sesuai kebutuhan | | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | 100% | 25.000.000 | |
| 3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD | 1 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | |
| 3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian yang tepat waktu | | 100% | 102.700.000 | 100% | 336.474.415 | 100% | 335.023.135 | 100% | 333.499.291 | 100% | 331.899.255 | |
| 3.27.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai | 1 | 1 | 15.500.000 | 1 | 15.500.000 | 1 | 15.500.000 | 1 | 15.500.000 | 1 | 15.500.000 | |
| 3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 30 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | 30 | 50.000.000 | |
| 3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan | 50 | 50 | 37.200.000 | 50 | 270.974.415 | 50 | 269.523.135 | 50 | 267.999.291 | 50 | 266.399.255 | |
| 3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase dokumen pemenuhan pelayanan administrasi umum kantor | | 100% | 659.884.478 | 100% | 849.280.000 | 100% | 849.280.000 | 100% | 849.280.000 | 100% | 849.280.000 | |
| 3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi<br><br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 6 | 1 | 20.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | |
| 3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 16 | 2 | 229.411.978 | 2 | 314.780.000 | 2 | 314.780.000 | 2 | 314.780.000 | 2 | 314.780.000 | |
| 3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 3 | 1 | 68.725.000 | 1 | 75.250.000 | 1 | 75.250.000 | 1 | 75.250.000 | 1 | 75.250.000 | |
| 3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 1 | 1 | 33.485.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | 1 | 55.000.000 | |
| 3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 29 | 2 | 101.350.000 | 2 | 101.350.000 | 2 | 101.350.000 | 2 | 101.350.000 | 2 | 101.350.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| 3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | 1 | 1 | 3.150.000 | 1 | 3.150.000 | 1 | 3.150.000 | 1 | 3.150.000 | 1 | 3.150.000 | |
| 3.27.01.2.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu | 1 | 1 | 19.255.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | 1 | 25.000.000 | |
| 3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 70 | 70 | 184.507.500 | 70 | 249.750.000 | 70 | 249.750.000 | 70 | 249.750.000 | 70 | 249.750.000 | |
| 3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase dokumen pelayanan pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 142.730.386 | 100% | 175.820.000 | 100% | 175.820.000 | 100% | 175.820.000 | 100% | 175.820.000 | |
| 3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel | Jumlah Paket Mebel yang Disediakan | 2 | 2 | 83.810.386 | 2 | 113.000.000 | 2 | 113.000.000 | 2 | 113.000.000 | 2 | 113.000.000 | |
| 3.27.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 2 | 2 | 58.920.000 | 2 | 62.820.000 | 2 | 62.820.000 | 2 | 62.820.000 | 2 | 62.820.000 | |
| 3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Laporan penyediaan jasa penunjang urusan Pemerintahan Daerah | | 100% | 5.102.980.000 | 100% | 5.244.450.000 | 100% | 5.244.450.000 | 100% | 5.244.450.000 | 100% | 5.244.450.000 | |
| 3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 1 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | 12 | 1.500.000 | |
| 3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 | 12 | 645.400.000 | 12 | 645.400.000 | 12 | 645.400.000 | 12 | 645.400.000 | 12 | 645.400.000 | |
| 3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 | 1 | 4.456.080.000 | 1 | 4.597.550.000 | 1 | 4.597.550.000 | 1 | 4.597.550.000 | 1 | 4.597.550.000 | |
| 3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase BMD dalam Kondisi Baik | | 90,65% | 613.930.000 | 90,65% | 642.900.000 | 90,65% | 642.900.000 | 90,65% | 642.900.000 | 90,65% | 642.900.000 | |
| 3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 30 | 30 | 224.050.000 | 30 | 240.000.000 | 30 | 240.000.000 | 30 | 240.000.000 | 30 | 240.000.000 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| 3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 2 | 2 | 28.400.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | 2 | 40.000.000 | |
| 3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 | 1 | 311.680.000 | 1 | 312.900.000 | 1 | 312.900.000 | 1 | 312.900.000 | 1 | 312.900.000 | |
| 3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 9 | 9 | 49.800.000 | 9 | 50.000.000 | 9 | 50.000.000 | 9 | 50.000.000 | 9 | 50.000.000 | |
| 3.27.01.2.11 - Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Persentase Dokumen pelaksanaan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang tepat waktu | | 100% | 27.643.414 | 100% | 29.025.585 | 100% | 30.476.865 | 100% | 32.000.709 | 100% | 33.600.745 | |
| 3.27.01.2.11.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah | 24 | 24 | 27.643.414 | 24 | 29.025.585 | 24 | 30.476.865 | 24 | 32.000.709 | 24 | 33.600.745 | |
| 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | | | | 24.080.268.211 | | 11.699.397.643 | | 10.466.585.143 | | 10.925.960.143 | | 11.354.483.111 | S.2.1; TPB 2 |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | Peningkatan Produksi Tanaman Pangan | - | 0.59 | 21.516.768.211 | 0.10 | 8.909.397.643 | 0.18 | 7.501.585.143 | 0.27 | 7.785.960.143 | 0.07 | 8.408.115.611 | |
| | Peningkatan Produksi Peternakan | - | 0.12 | | 0.12 | | 0.13 | | 0.13 | | 0.13 | | |
| | Peningkatan Produksi Perkebunan | - | 1.99 | | 2.12 | | 2.05 | | 2.12 | | 2.16 | | |
| | Peningkatan Produksi Hortikultura | - | 0.55 | | 0.44 | | 0.44 | | 0.55 | | 0.44 | | |
| 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Peningkatan produktivitas tanaman pangan serta presentase kelompok tani yang ditingkatkan sarana pengolahan dan pascapanen hortikultura dan perkebunan | | 0,11% | 10.034.148.200 | 0,03% | 4.862.441.997 | 0,02% | 3.689.707.622 | 0,27% | 3.942.238.872 | 0,01% | 4.460.083.036 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan | Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | 1 | 1 | 7.348.405.500 | 1 | 2.049.152.934 | 1 | 1.482.121.684 | 1 | 1.692.059.184 | 1 | 1.931.819.606 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil tanaman pangan | | 1 | 455.340.000 | 1 | 460.641.174 | 1 | 442.594.299 | 1 | 364.500.549 | 1 | 429.051.432 | |
| 3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen Perkebunan | 12 | 1 | 1.016.303.000 | 1 | 1.185.476.466 | 1 | 851.960.841 | 1 | 1.006.929.591 | 1 | 1.026.809.802 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pengolahan hasil hortikultura | | 1 | 60.978.400 | 1 | 190.501.174 | 1 | 172.454.299 | 1 | 94.360.549 | 1 | 158.911.432 | |
| 3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen tanaman pangan | 12 | 1 | 674.194.000 | 1 | 377.841.175 | 1 | 359.794.300 | 1 | 281.700.550 | 1 | 346.251.432 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | Jumlah pengawasan penggunaan sarana pascapanen hortikultura | 12 | 1 | 478.927.300 | 1 | 598.829.074 | 1 | 380.782.199 | 1 | 502.688.449 | 1 | 567.239.332 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Peningkatan produktivitas hortikultura dan perkebunan | | 0,50%<br>0,08% | 7.962.558.011 | 0,39%<br>0,17% | 2.246.955.646 | 0,39%<br>0,08% | 2.161.877.521 | 0,50%<br>0,10% | 1.793.721.271 | 0,39%<br>0,11% | 2.098.032.575 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | 1 | 1 | 2.065.218.972 | 1 | 775.106.174 | 1 | 757.059.299 | 1 | 678.965.549 | 1 | 743.516.432 | |
| 3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | 12 | 1 | 5.897.339.039 | 1 | 1.471.849.472 | 1 | 1.404.818.222 | 1 | 1.114.755.722 | 1 | 1.354.516.143 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kelompok ternak yang ditingkatkan kapasitas budidaya | | 1,523% | 1.233.157.000 | 1,605% | 759.143.821 | 1,659% | 512.264.170 | 1,713% | 877.414.540 | 1,768% | 619.196.995 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | Jumlah Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | 12 | 12 | 375.404.000 | 12 | 177.433.538 | 12 | 164.116.460 | 12 | 140.225.190 | 12 | 120.317.420 | TPB 2 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| 3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat | 12 | 12 | 198.750.000 | 12 | 133.491.621 | 12 | 130.623.888 | 12 | 119.811.125 | 12 | 128.947.230 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia | 12 | 12 | 659.003.000 | 12 | 448.218.662 | 12 | 217.523.822 | 12 | 617.378.225 | 12 | 369.932.345 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | Persentase pertumbuhan populasi ternak | | 0,14% | 2.286.905.000 | 0,14% | 1.040.856.179 | 0,14% | 1.137.735.830 | 0,14% | 1.172.585.460 | 0,14% | 1.230.803.005 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | - | 60 | 270.285.000 | 70 | 169.441.724 | 80 | 181.724.425 | 90 | 183.909.247 | 100 | 189.898.151 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah kabupaten/kota lain | - | 286 | 2.016.620.000 | 25 | 871.414.455 | 25 | 956.011.405 | 25 | 988.676.213 | 25 | 1.040.904.854 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | Tingkat Efektivitas Perbaikan Alat Mesin Pertanian | | 100% | 615.000.000 | 100% | 715.000.000 | 100% | 730.000.000 | 100% | 735.000.000 | 100% | 750.000.000 | |
| 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | 1 | 12 | 615.000.000 | 12 | 715.000.000 | 12 | 730.000.000 | 12 | 735.000.000 | 12 | 750.000.000 | |
| 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | Persentase Kebutuhan sarana perbenihan tanaman yang terpenuhi | | 60% | 525.000.000 | 67% | 525.000.000 | 73% | 525.000.000 | 80% | 525.000.000 | 87% | 525.000.000 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | Jumlah SDG tanaman yang dilakukan pelestarian dan pemurnian | 1 | 2 | 525.000.000 | 2 | 525.000.000 | 2 | 525.000.000 | 3 | 525.000.000 | 3 | 525.000.000 | TPB 2 |
| 3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase kebuntingan sapi induk di UPTD | | 58,18% | 1.423.500.000 | 63,64% | 1.550.000.000 | 63,79% | 1.710.000.000 | 54,79% | 1.880.000.000 | 64,29% | 1.671.367.500 | TPB 2 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| 3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | Jumlah benih/bibit ternak yang beredar | 12 | 12 | 1.423.500.000 | 12 | 1.550.000.000 | 12 | 1.710.000.000 | 12 | 1.880.000.000 | 12 | 1.671.367.500 | TPB 2 |
| 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN | | | | 5.220.000.000 | | 2.690.092.880 | | 3.912.620.651 | | 3.387.072.151 | | 7.879.127.961 | S.2.1; TPB 2 |
| Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | Persentase Lahan Pertanian yang difasilitasi pembangunan prasarana pertanian | - | 0.33 | 4.895.000.000 | 0.50 | 2.245.000.000 | 0.81 | 3.445.000.000,00 | 0.97 | 3.045.000.000 | 1.14 | 7.545.000.000 | |
| | Cakupan Luas Lahan Pertanian yang Ditetapkan jadi LP2B | 0 | 58.74 | | 58.74 | | 58.74 | | 58.74 | | 58.74 | | |
| 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian | Persentase wilayah LP2B yang telah difasilitasi dengan kegiatan perencanaan, sosialisasi, dan koordinasi lintas sektor | | 33,82% | 515.000.000 | 50,72% | 515.000.000 | 67,63% | 515.000.000 | 84,54% | 515.000.000 | 100% | 515.000.000 | TPB 2 |
| 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | 1 | 12 | 315.000.000 | 12 | 315.000.000 | 12 | 315.000.000 | 12 | 315.000.000 | 12 | 315.000.000 | TPB 2 |
| 3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | Jumlah Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | 2 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | 1 | 200.000.000 | TPB 2 |
| 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase prasarana pendukung budidaya pertanian yang berfungsi optimal setelah dibangun, direhabilitasi, atau dipelihara | | 100% | 4.380.000.000 | 100% | 1.730.000.000 | 100% | 2.930.000.000 | 100% | 2.530.000.000 | 100% | 7.030.000.000 | TPB 2 |
| 3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | Jalan Usaha Tani yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 | 3 | 610.000.000 | 3 | 610.000.000 | 3 | 610.000.000 | 3 | 610.000.000 | 3 | 610.000.000 | TPB 2 |
| 3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara | 1 | 1 | 3.250.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 600.000.000 | 1 | 1.400.000.000 | 1 | 5.900.000.000 | TPB 2 |
| 3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | Jumlah jaringan irigasi usaha tani yang direhabilitasi | 1 | 3 | 520.000.000 | 3 | 520.000.000 | 7 | 1.720.000.000 | 3 | 520.000.000 | 3 | 520.000.000 | TPB 2 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian | Persentase sarana dan prasarana di RPH yang berada dalam kondisi baik | | 60,71% | 325.000.000 | 74,14% | 445.092.880 | 81,03% | 467.620.651 | 85,00% | 342.072.151 | 90,32% | 334.127.961 | TPB 2 |
| 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi | 3 | 3 | 325.000.000 | 3 | 445.092.880 | 3 | 467.620.651 | 3 | 342.072.151 | 3 | 334.127.961 | TPB 2 |
| 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER | | | | 2.708.000.000 | | 2.876.279.666 | | 2.886.564.395 | | 2.952.737.895 | | 3.032.159.117 | S.2.1 |
| 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Persentase cakupan wilayah pengawasan aktif penyakit hewan strategis | | 38,89% | 803.500.000 | 44,44% | 996.964.360 | 50,00% | 986.857.246 | 55,56% | 943.121.003 | 61,11% | 979.272.591 | |
| Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner | Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang Memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol Veteriner) | - | 2.26 | 1.440.000.000 | 2.31 | 1.695.372.546 | 2.36 | 1.678.185.046 | 2.42 | 1.603.810.046 | 2.48 | 1.665.287.078 | |
| | Tingkat Pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) | - | 76.82 | | 77.53 | | 78.24 | | 78.94 | | 79.65 | | |
| 3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali | 1 | 1 | 464.500.000 | 1 | 559.792.824 | 1 | 554.117.707 | 1 | 529.559.923 | 1 | 549.858.943 | |
| 3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan | 1 | 14 | 150.000.000 | 16 | 213.254.408 | 18 | 211.092.458 | 20 | 201.737.112 | 22 | 209.470.072 | |
| 3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota | 12 | 1 | 189.000.000 | 1 | 223.917.128 | 1 | 221.647.081 | 1 | 211.823.968 | 1 | 219.943.576 | |
| 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Tingkat Kepatuhan unit usaha produk hewan atas rekomendasi hasil pengawasan dan pembinaan | | 80,00% | 636.500.000 | 80,56% | 698.408.186 | 82,50% | 691.327.800 | 84,44% | 660.689.043 | 86,00% | 686.014.487 | |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| 3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | 12 | 1 | 362.009.600 | 1 | 394.520.655 | 1 | 390.521.048 | 1 | 373.213.658 | 1 | 387.519.634 | |
| 3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | 1 | 1 | 229.490.000 | 1 | 250.573.929 | 1 | 248.033.638 | 1 | 237.041.107 | 1 | 246.127.335 | |
| 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | 1 | 10 | 45.000.400 | 10 | 53.313.602 | 10 | 52.773.114 | 10 | 50.434.278 | 10 | 52.367.518 | |
| 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | Jumlah pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem pada pemotongan hewan | | 5745 ekor | 525.000.000 | 5795 ekor | 429.907.120 | 5845 ekor | 432.379.349 | 5895 ekor | 557.927.849 | 5945 ekor | 565.872.039 | |
| 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi | 1 | 3 | 525.000.000 | 3 | 429.907.120 | 3 | 432.379.349 | 3 | 557.927.849 | 3 | 565.872.039 | |
| 3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase desa terlayani pelayanan kesehatan hewan | | 85,71% | 542.000.000 | 89,29% | 550.000.000 | 92,86% | 575.000.000 | 96,43% | 590.000.000 | 100,00% | 600.000.000 | |
| 3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner | 12 | 12 | 542.000.000 | 12 | 550.000.000 | 12 | 575.000.000 | 12 | 590.000.000 | 12 | 600.000.000 | |
| 3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah ternak yang terlayani di UPTD Pasar Hewan | | 17200 ekor | 201.000.000 | 17200 ekor | 201.000.000 | 17200 ekor | 201.000.000 | 17200 ekor | 201.000.000 | 17200 ekor | 201.000.000 | |
| 3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM | 12 | 12 | 201.000.000 | 12 | 201.000.000 | 12 | 201.000.000 | 12 | 201.000.000 | 12 | 201.000.000 | |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | - | | - | | - | | - | | - | S.2.1 |

| BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT | INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN | | | | | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 2026 | | 2027 | | 2028 | | 2029 | | 2030 | | |
| | | | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | TARGET | PAGU | |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* | *11* | *12* | *13* | *15* |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | - | | - | | - | | - | | - | S.2.1 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | | | | 31.884.000.000 | | 20.400.000.000 | | 25.400.000.000 | | 25.400.000.000 | | 25.400.000.000 | S.2.1 |
| Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | Persentase Keaktifan Kelompok Petani | - | 97.06 | 31.884.000.000 | 97.06 | 20.400.000.000 | 97.06 | 25.400.000.000 | 97.06 | 25.400.000.000 | 97.06 | 25.400.000.000 | |
| 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | Persentase peningkatan kapasitas Kelompok Tani | | 21,24% | 31.884.000.000 | 21,17% | 20.400.000.000 | 21,17% | 25.400.000.000 | 21,17% | 25.400.000.000 | 21,17% | 25.400.000.000 | |
| 3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya (Unit) | 31 | - | - | 31 | 100.000.000 | 31 | 100.000.000 | 31 | 100.000.000 | 31 | 100.000.000 | |
| 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya | 50 | 903 | 31.884.000.000 | 900 | 20.150.000.000 | 900 | 25.150.000.000 | 900 | 25.150.000.000 | 900 | 25.150.000.000 | |
| 3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian (Unit) | 30 | - | - | 10 | 150.000.000 | 10 | 150.000.000 | 10 | 150.000.000 | 10 | 150.000.000 | |
| Total | | | | 109.875.769.489 | | 84.341.693.189 | | 89.341.693.189 | | 89.341.693.189 | | 94.341.693.189 | |

Sumber : Tabel SIPD Renstra 2025-2029

Ket :

S.2.1 = Program yang Mendukung Sasaran KDH: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan

TPB 2 = Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan: Tanpa Kelaparan

## 4.2 Uraian Subkegiatan dalam Rangka Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam upaya mewujudkan tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berpihak kepada petani, penetapan program prioritas menjadi langkah strategis yang sangat penting. Program prioritas merupakan fokus kebijakan pembangunan yang diarahkan pada pencapaian sasaran utama daerah, sesuai dengan tujuan RPJMD Kabupaten Bandung dan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025–2029. Penetapan program prioritas penting untuk memastikan bahwa sumber daya pembangunan yang terbatas dapat diarahkan secara efektif dan efisien, guna menjawab isu-isu strategis serta menyelesaikan permasalahan sektor pertanian secara tepat sasaran. Program prioritas juga menjadi landasan dalam pengambilan keputusan alokasi anggaran, pelaksanaan kegiatan, serta pengukuran kinerja pembangunan daerah.

Sebagai turunan dari program Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang pertanian, ditetapkan program dan subkegiatan prioritas yang mendukung pencapaian outcome pembangunan daerah sebagaimana disajikan pada Tabel 4.3 berikut:

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| 1. | 3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN | Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian | 3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian | |
| | | | 3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| | | | dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.27.02.2.06 - Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain | |
| | | | 3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi | PN 2 |
| | | | 3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian | R 25 |
| | | | 3.27.02.2.01.0005 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan | |
| | | | 3.27.02.2.01.0006 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Perkebunan | R 26 |
| | | | 3.27.02.2.01.0007 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura | |
| | | | 3.27.02.2.01.0014 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Tanaman Pangan | R 25 |
| | | | 3.27.02.2.01.0016 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pascapanen Hortikultura | R 26 |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| | | | 3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman | |
| | | | 3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman | R 26 |
| | | | 3.27.02.2.02.0004 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Tanaman | |
| | | | 3.27.02.2.05.0006 - Pengawasan Produksi Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan/Pakan | R 19 |
| | | | 3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak | |
| | | | 3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak | |
| | | | 3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak | R 19 |
| | | | 3.27.02.2.06.0002 - Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | |
| | | | 3.27.02.2.06.0003 - Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain | R 19 |
| 2. | 3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN | Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian | 3.27.03.2.01 - Pengembangan Prasarana Pertanian | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| | PRASARANA PERTANIAN | | | |
| | | | 3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian | |
| | | | 3.27.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya | PN 2; R 25&33 |
| | | | 3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan | |
| | | | 3.27.03.2.01.0017 - Penyusunan Action Plan Pengembangan Prasarana, Sarana, Kawasan Pertanian | R 25 |
| | | | 3.27.03.2.02.0003 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani | R 19 & 25 |
| | | | 3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya | |
| | | | 3.27.03.2.02.0010 - Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani | |
| 3. | 3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN | Meningkatnya pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan | 3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| | MASYARAKAT VETERINER | masyarakat veteriner | Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.27.04.2.03 Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | | | 3.27.04.2.01.0003 - Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular | |
| | | | 3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan | |
| | | | 3.27.04.2.01.0008 - Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota | |
| | | | 3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) | |

| NO | PROGRAM PRIORITAS | OUTCOME | KEGIATAN / SUBKEGIATAN | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* |
| | | | 3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner | |
| | | | 3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan | |
| | | | 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | |
| | | | 3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner | |
| | | | 3.27.04.2.04.0005 - Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan | |
| 4. | 3.27.07 - PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN | Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluh pertanian | 3.27.07.2.01 - Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian | |
| | | | 3.27.07.2.01.0001 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa | |
| | | | 3.27.07.2.01.0002 - Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa | R 20,22, 23, 26 |
| | | | 3.27.07.2.01.0003 - Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian | |

Sumber : Tabel SIPD Renstra 2025-2029

Ket:

PN 2 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Astacita: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah. ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.

R 19 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Meningkatkan perekonomian daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan

R 20 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Mencetak wirausaha baru dan aktivasi inkubasi bisnis ekonomi kreatif (ekraf)

R 22 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Pemberian Asuransi dan/atau Subsidi/hibah Kepada Petani dan buruh tani beserta BPJS Ketenagakerjaan lengkap dengan Jaminan Kecelakaan (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Hari Tua (JHT)

R 23 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Peningkatan Fasilitasi pinjaman modal bergulir tanpa bunga dan jaminan dan mendorong melalui kerjasama KUR (Kredit Usaha Rakyat) kepada seluruh pelaku usaha termasuk petani

R 25 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Meningkatakan ketahanan pangan berbasis potensi lokal dan optimalisasi lahan sawah yang dilindungi (LSD) dengan dikuatkan melalui Perdes (Peraturan Desa) menjadi sawah abadi

R 26 = Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Rencana Aksi Bupati: Pemberian subsidi/hibah terhadap petani yang menanam produk unggulan Kabupaten Bandung

## 4.3 Target Keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 melalui IKU Dinas Pertanian

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja suatu instansi pemerintah dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra). IKU berfungsi sebagai instrumen utama untuk mengukur efektivitas program dan kegiatan yang dilaksanakan selama periode lima tahunan. Keberadaan IKU sangat penting karena menjadi penghubung antara visi-misi Kepala Daerah, arah kebijakan pembangunan daerah, serta pelaksanaan teknis operasional di tingkat dinas. IKU Dinas Pertanian adalah Nilai Tukar Petani (NTP), Nilai Tukar Petani (NTP) adalah perbandingan antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), yang mencerminkan tingkat kesejahteraan dan daya beli petani. Secara sederhana, NTP menunjukkan kemampuan tukar hasil produksi pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun dibutuhkan untuk produksi. NTP ≥ 100 berarti petani mengalami surplus (untung), sedangkan NTP < 100 berarti petani mengalami defisit (rugi).

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | Nilai Tukar Petani (NTP) | Poin | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | Nilai Tukar Petani (NTP) |

| NO | INDIKATOR | SATUAN | BASELINE TAHUN 2024 | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(05)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* |
| | | | | | | | | | | adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dikalikan 100. NTP > 100 → Petani mengalami surplus (harga yang diterima lebih besar dari yang dibayar).<br><br>NTP = 100 → Petani berada pada titik impas.<br><br>NTP < 100 → Petani mengalami 208eficit (harga yang diterima lebih kecil dari yang dibayar). |

Sumber : Tabel SIPD Renstra 2025-2029

## 4.4 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Dinas Pertanian Tahun 2025 - 2029

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| 1 | Nilai Tukar Petani (NTP) | Poin | Poin | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | Nilai Tukar Petani (NTP) adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani (It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dikalikan 100. |

| NO | INDIKATOR | STATUS | SATUAN | TARGET TAHUN | | | | | | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| *(01)* | *(02)* | *(03)* | *(04)* | *(06)* | *(07)* | *(08)* | *(09)* | *(10)* | *(11)* | *(12)* |
| | | | | | | | | | | NTP > 100 → Petani mengalami surplus (harga yang diterima lebih besar dari yang dibayar).<br><br>NTP = 100 → Petani berada pada titik impas.<br><br>NTP < 100 → Petani mengalami defisit (harga yang diterima lebih kecil dari yang dibayar). |

Sumber : Tabel SIPD Renstra 2025-2029

## 4.5 Uraian Indikator dan Target Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Seperti yang telah dijelaskan pada BAB II sebelumnya, bahwa Dinas Pertanian mendukung target pencapaian TPB ke-2 (Tanpa Kelaparan). Fokus utama diarahkan pada peningkatan produktivitas dan kesejahteraan pelaku utama sektor pertanian dengan indikator Nilai Tambah Petani serta perlindungan terhadap keberlanjutan lahan pertanian pangan dengan indikator Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Berikut merupakan rencana target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan untuk tahun 2025-2029:

Tabel 4.6 Indikator TPB/SDGs

| No | Tujuan/Goals | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| 1 | Tujuan 2 (Tanpa Kelaparan) | Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja). | Rupiah | 67.353.601 | 68.049.609 | 68.546.349 | 69.058.300 | 69.699.796 | 70.901.800 | |

| No | Tujuan/Goals | Indikator | Satuan | Target Tahun | | | | | | Ket |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
| | | Penetapan 210awasan pertanian pangan berkelanjutan. | Persen | 43,09 | 45,24 | 47,49 | 49,84 | 52,28 | 52,28 | |

Sumber : RAD TPB/SDGs Kab Bandung Tahun 2025-2029

## 4.6 Dukungan terhadap Tematik Pembangunan Tahun 2025-2029

Pengusungan Konsep Tematik dimaksudkan sebagai bentuk percepatan pembangunan menuju Visi Kabupaten Bandung 2025 –2029 yang Lebih Bedas, Maju, dan Berkelanjutan. Sesuai dengan kondisi dan potensi yang dimiliki Kabupaten Bandung, berbagai tematik pembangunan dikonsepkan dengan menggunakan model “Gunungan (Kayon)”. Gunungan memiliki makna filosofis dan religious serta merepresentasikan alam semesta beserta isinya, termasuk manusia yang hidup di dalamnya. Gunungan melambangkan penyatuan antara dunia dan akhirat, serta menyiratkan tujuan hidup manusia untuk mencapai kesempurnaan. “Gunungan” juga melambangkan keseimbangan antara dunia dan akhirat, serta pentingnya menjaga keseimbangan dalam menjalani hidup.

Tematik pembangunan yang dikonsepkan dengan pendekatan konsep ”Gunungan” terdiri dari beberapa aksi tematik sebagai berikut:

a. Peningkatan Ketahanan Pangan
b. Kawasan Ekonomi Terpadu
c. Kawasan Pengembangan Ibukota Kabupaten Bandung
d. SDM Lebih Bedas
e. Pengelolaan Lingkungan Hidup Berkualitas

Dinas Pertanian mendukung tematik Peningkatan Ketahanan Pangan, mengingat pangan merupakan aspek mendasar yang berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, stabilitas sosial, serta kemandirian ekonomi daerah. Kabupaten Bandung dengan sumber daya alam yang melimpah dan keragaman komoditas pangan memegang peran strategis dalam memperkuat ketahanan pangan baik di tingkat regional maupun nasional. Namun demikian, masih terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan serius dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah. Ketahanan pangan di Kabupaten Bandung masih menghadapi sejumlah persoalan mendasar. Belum optimalnya pemanfaatan potensi pangan daerah menjadi salah satu hambatan utama. Hal ini ditunjukkan dengan masih terbatasnya sarana dan prasarana produksi, lemahnya integrasi simpul pangan lokal, serta kurangnya ketersediaan data pangan yang komprehensif. Kondisi tersebut menyebabkan akses masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi, dan aman masih belum merata, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan.

Untuk menjawab permasalahan tersebut, tujuan yang hendak dicapai adalah memperkuat potensi ketahanan pangan di Kabupaten Bandung melalui pembangunan simpul pangan yang terintegrasi. Pembangunan ini

tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan semata, tetapi juga pada penguatan kapasitas komunitas, perbaikan infrastruktur produksi dan distribusi, serta penyediaan data pangan yang akurat dan dapat diandalkan untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti.

Keberhasilan pencapaian tujuan tersebut akan sangat bergantung pada beberapa faktor kunci. Pertama, terbentuknya simpul pangan lokal berbasis komunitas yang mampu menggerakkan potensi masyarakat untuk menjamin ketersediaan dan distribusi pangan secara berkelanjutan. Kedua, meningkatnya ketersediaan pangan melalui pembangunan prasarana produksi, penyediaan sarana pertanian, serta perbaikan jaringan distribusi. Ketiga, adanya penguatan data dan informasi pangan yang terintegrasi, akurat, dan mudah diakses sebagai dasar perencanaan dan evaluasi program.

Untuk mewujudkan kondisi tersebut, dirumuskan sejumlah program strategis. Pembangunan simpul pangan lokal berbasis komunitas menjadi program utama, yang didukung oleh penyediaan sarana dan prasarana ketahanan pangan, termasuk infrastruktur produksi, penyimpanan, dan distribusi. Selain itu, program penyuluhan pertanian diarahkan pada peningkatan kapasitas petani dalam mengelola produksi pangan. Pengembangan data dan informasi pangan juga menjadi prioritas agar pemerintah daerah memiliki sistem pangan yang lebih responsif dan adaptif.

Selain itu, Dinas Pertanian juga mendukung tematik pembangunan melalui pengembangan Kawasan Ekonomi Terpadu. Pengembangan kawasan ekonomi terpadu di sektor pertanian masih menghadapi sejumlah permasalahan, diantaranya rantai nilai pertanian belum terintegrasi secara optimal dimana produksi petani masih sering terputus dari industri pengolahan maupun pasar sehingga harga fluktuatif dan nilai tambah rendah.

Dari permasalahan tersebut, Dinas Pertanian membentuk klaster ekonomi pertanian yang bertujuan untuk menciptakan ekosistem pertanian yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam satu kawasan. Melalui pendekatan program pembentukan klaster, Dinas Pertanian berupaya meningkatkan produktivitas dan pendapatan petani, memperkuat kelembagaan tani agar lebih mandiri dan berdaya tawar, serta mendorong hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Keberhasilan pembentukan klaster ekonomi pertanian dalam mendukung kawasan ekonomi terpadu dapat diukur melalui beberapa indikator, diantaranya peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian pada komoditas unggulan yang

menjadi basis klaster, meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani, terbentuknya kelembagaan ekonomi petani yang kuat, meningkatnya kontribusi subsektor pertanian terhadap PDRB daerah.

Dalam dokumen Masterplan Perekonomian Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang diterbitkan Bapperida Kabupaten Bandung pada tahun 2021, identifikasi potensi sektor ekonomi unggulan di Kabupaten Bandung menunjukkan bahwa terdapat klaster pertanian di bagian Selatan, klaster industri dan perdagangan di bagian Tengah, serta hotspots pariwisata di bagian Selatan. Klaster pertanian berada di wilayah pengembangan ekonomi II, III, IV, VII yang merupakan potensi utama pertanian di wilayah pedesaan. Klaster pertanian disusun sesuai dengan potensi wilayah, sehingga simpul pangan memperoleh pasokan yang konsisten, berkualitas, dan berdaya saing. Sinergi antara simpul pangan dan klaster komoditas unggulan ini diharapkan mampu meningkatkan ketersediaan pangan, memberi nilai tambah pada produk pertanian, memperkuat posisi petani, serta menjamin keterjangkauan pangan bagi masyarakat Kabupaten Bandung. Berikut merupakan klaster komoditas unggulan di Kabupaten Bandung:

a) Klaster Padi

Klaster padi ditetapkan di Kecamatan Ciparay, Rancaekek, Pacet, Paseh, Bojongsoang, dan Cimaung. Produksi padi di wilayah ini berperan besar dalam menjaga ketahanan pangan Kabupaten Bandung serta menyuplai beras ke wilayah perkotaan Bandung Raya. Tantangan utama adalah ketersediaan air pada musim kemarau serta tekanan perubahan pemanfaatan lahan, sehingga strategi penguatan klaster diarahkan pada efisiensi pemanfaatan air, penggunaan varietas unggul, dan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B).

b) Klaster Bawang Merah

Klaster bawang berada di Kecamatan Cimenyan, Cimaung, Pacet, Pangalengan, dan Arjasari. Wilayah ini memiliki agroklimat dataran tinggi hingga menengah yang sesuai untuk budidaya bawang merah. Kecamatan Cimenyan dikenal sebagai penghasil bawang merah dataran tinggi yang banyak memasok pasar lokal dan regional. Sementara itu, Cimaung, Pacet, Pangalengan, dan Arjasari berkembang dengan sistem tumpang sari bawang dengan hortikultura lain. Permasalahan yang sering muncul adalah fluktuasi harga saat panen raya, serangan hama penyakit, serta keterbatasan fasilitas pascapanen. Oleh karena itu, pengembangan klaster ini diarahkan pada peningkatan teknologi budidaya, penguatan rantai pasok, dan pembangunan infrastruktur penyimpanan *(cold storage).*

c) Klaster Cabai Merah

Klaster cabai merah tersebar di Kecamatan Pangalengan, Cimenyan, Paseh, Cimaung, Pacet, Nagreg, Kertasari, Rancabali, dan Arjasari. Wilayah ini memiliki agroklimat dataran tinggi hingga menengah yang sangat sesuai untuk pengembangan cabai merah. Pangalengan, Kertasari, Rancabali, dan Ciwidey (penyebutan alternatif sebelumnya) dikenal menghasilkan cabai kualitas premium untuk pasar regional dan nasional, sementara Cimaung, Pacet, Nagreg, dan Arjasari menopang pasokan bagi pasar lokal dan industri.

Potensi ekonomi cabai sangat besar, karena menjadi salah satu komoditas hortikultura strategis nasional. Namun, klaster ini menghadapi tantangan berupa fluktuasi harga yang ekstrem, risiko serangan hama penyakit (antraknosa, thrips), dan keterbatasan fasilitas pascapanen. Strategi pengembangan diarahkan pada penerapan teknologi budidaya modern (mulsa plastik, irigasi tetes), pembangunan sistem resi gudang, pengembangan kemitraan dengan industri pengolahan, serta penguatan kelembagaan petani untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.

d) Klaster Kopi Arabika

Klaster kopi mencakup wilayah yang cukup luas, meliputi Kecamatan Pangalengan, Kertasari, Ibun, Cilengkrang, Rancabali, Pasirjambu, Ciwidey, Cimaung, Arjasari, Pacet, dan Paseh. Kawasan ini merupakan salah satu sentra kopi arabika terbesar di Jawa Barat yang telah menghasilkan kopi spesialti dengan indikasi geografis "*Java Preanger Coffee*". Keunggulan kopi dari klaster ini terletak pada cita rasa dan kualitas yang diakui hingga pasar ekspor. Tantangan pengembangan klaster adalah konsistensi mutu, akses pasar premium, dan keberlanjutan lingkungan. Strategi pengembangan diarahkan pada peningkatan kapasitas petani melalui pelatihan pascapanen, penguatan kelembagaan koperasi kopi, serta promosi ekspor melalui branding dan sertifikasi internasional.

e) Klaster Sapi Perah

Klaster sapi perah berada di Kecamatan Pangalengan, Cilengkrang, Kertasari, Pasirjambu, Arjasari, Rancabali. Wilayah ini memiliki kondisi iklim sejuk yang mendukung pengembangan sapi perah dengan populasi terbesar berada di Pangalengan. Produksi susu segar dari kawasan ini telah menjadi pemasok utama industri pengolahan susu nasional. Tantangan utama adalah efisiensi pakan, kesehatan ternak, serta fluktuasi harga susu. Oleh karena itu, strategi pengembangan klaster difokuskan pada perbaikan manajemen pakan, pengendalian penyakit hewan strategis, peningkatan kualitas susu

melalui standar higienitas, serta penguatan kemitraan dengan industri pengolahan susu.

f) Klaster Domba

Klaster domba ditetapkan di Kecamatan Ibun, Arjasari, Rancaekek, Kertasari, Cimaung, dan Cimenyan. Wilayah ini dikenal sebagai sentra pengembangan domba Garut yang merupakan komoditas unggulan khas Jawa Barat. Populasi domba tidak hanya dipelihara untuk kebutuhan konsumsi, tetapi juga untuk budaya adu domba yang memiliki nilai ekonomi tersendiri. Tantangan pengembangan klaster adalah peningkatan produktivitas, pengendalian penyakit, serta penguatan kelembagaan peternak. Pengembangan diarahkan pada peningkatan kualitas bibit, pengolahan produk turunan (daging dan kulit), serta pengembangan pasar domestik dan ekspor.

g) Jagung

Klaster jagung berada di Kecamatan Nagreg, Pangalengan, Cikancung, dan Paseh. Wilayah ini memiliki lahan kering dan tegalan yang sesuai untuk budidaya jagung dengan tingkat produktivitas cukup tinggi. Jagung di kawasan ini berfungsi ganda, yakni sebagai pangan alternatif dan sebagai bahan baku pakan ternak, sehingga berkontribusi terhadap subsektor tanaman pangan maupun peternakan. Tantangan utama klaster jagung adalah ketergantungan pada pola tanam musiman, fluktuasi harga, dan akses terhadap pasar pakan ternak. Strategi pengembangan diarahkan pada penggunaan varietas unggul tahan kering, peningkatan intensitas tanam, serta membangun kemitraan dengan industri pakan untuk menjamin pasar yang stabil.

# BAB V

# PENUTUP

## 5.1 Kesimpulan

Adanya tuntutan mutu, persaingan dengan wilayah produsen pertanian lainnya serta semakin tingginya tingkat impor komoditas dan produk pertanian mengharuskan Kabupaten Bandung untuk terus memacu produktifitas dan kinerja sektor pertaniannya melalui perwujudan agribisnis, agrowisata dan agroindustri.

Pencapaian tujuan pembangunan sektor pertanian di Kabupaten bandung tentunya memerlukan berbagai dukungan intensif dalam hal penciptaan iklim pengembangan pertanian yang kondusif melalui peningkatan efisiensi birokrasi, peningkatan akses pada kredit serta peninjauan untuk peraturan perpajakan dan tarif pajak untuk sektor pertanian. Selanjutnya untuk menggerakan sektor pertanian tersebut diperlukan Kerjasama antara berbagai pihak sebagai pemangku kepentingan di sektor tersebut, seperti masyarakat petani pemerintah dan perbankan. Berbagai bentuk Kerjasama, hubungan dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan tersebut sangat diperlukan agar sektor pertanian di Kabupaten Bandung mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan wilayah.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian Kabupaten Bandung 2025-2029 disusun sebagai salah satu rumusan Program kegiatan dan indikatornya agar lebih selaras dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang dapat menjawab tantangan yang dihadapi oleh sektor pertanian. Diharapkan dengan tersusunnya Renstra dapat menjadi sebuah dokumen perencanaan yang baik dalam mengawal proses pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung secara berkelanjutan.

## 5.2 Kaidah Pelaksanaan

Kaidah pelaksanaan Renstra ini mengacu pada prinsip good governance, akuntabilitas, transparansi, serta berorientasi pada hasil. Pelaksanaan Renstra dilaksanakan secara terpadu dengan memperhatikan:

- Kesesuaian regulasi, yakni mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan terkait perencanaan pembangunan daerah, sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP), serta kebijakan nasional bidang pertanian.

- Sinkronisasi perencanaan, yakni keterpaduan antara Renstra Dinas Pertanian dengan RPJMD Kabupaten Bandung, Renstra perangkat daerah lainnya, serta rencana pembangunan provinsi dan nasional.
- Efisiensi dan efektivitas, yaitu pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan pemanfaatan sumber daya (man, money, material, machine, method) secara optimal agar memberikan hasil yang nyata bagi masyarakat.
- Partisipatif dan inklusif, yaitu melibatkan pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk kelompok tani, pelaku usaha pertanian, lembaga masyarakat, dan akademisi, sehingga pelaksanaan Renstra benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan.

## 5.3 Pelaksanaan Pengendalian dan Evaluasi terhadap Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan

Untuk menjamin keterlaksanaan Renstra secara konsisten dan berkesinambungan, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan melalui beberapa mekanisme sebagai berikut:

- Pengendalian dilaksanakan dengan melakukan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan, mencakup pencapaian target kinerja, penyerapan anggaran, serta kesesuaian pelaksanaan dengan rencana kerja tahunan (Renja) yang telah ditetapkan.
- Evaluasi kinerja dilakukan setiap akhir tahun dan akhir periode Renstra untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian sasaran, mengidentifikasi kendala yang dihadapi, serta merumuskan langkah perbaikan ke depan.
- Pelaporan kinerja disusun melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang menjadi instrumen akuntabilitas sekaligus bahan evaluasi bagi Bupati Bandung dan lembaga pengawas.

- Umpan balik perencanaan, hasil pengendalian dan evaluasi menjadi masukan penting dalam penyusunan rencana kerja tahun berikutnya, serta sebagai bahan perbaikan terhadap kebijakan, program, dan kegiatan agar lebih efektif dan tepat sasaran.

Soreang, September 2025
KEPALA DINAS PERTANIAN
KABUPATEN BANDUNG

TTD

INA DEWI KANIA

Disahkan oleh:
BUPATI BANDUNG

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Sumberdaya Manusia ASN Dinas Pertanian Tahun 2025..... 26
Tabel 2.2. Golongan Sumberdaya Manusia ASN Dinas Pertanian Tahun 2025 .....27
Tabel 2.3. Pendidikan Sumberdaya Manusia ASN Dinas Pertanian Tahun 2025 .....27
Tabel 2.4. Aset yang Dikelola Dinas Pertanian ..... 28
Tabel 2.5. Potensi Luas Lahan Pertanian di Kabupaten Bandung ..... 29
Tabel 2.6. Potensi Luas Sawah Produktif di Kabupaten Bandung (Ha).....32
Tabel 2.7. Potensi produksi Tanaman Pangan pada periode Tahun 2020-2024 ..... 34
Tabel 2.8. Perkembangan Produksi Komoditi Hortikultura (Sayuran).....41
Tabel 2.9. Perkembangan produksi perkebunan..... 44
Tabel 2.10. Populasi Ternak di Kabupaten Bandung Tahun 2024 .....47
Tabel 2.11. Potensi Kelompok Tani di Kabupaten Bandung.....53
Tabel 2.12 Sebaran penyuluh pertanian per kecamatan Tahun 2024 .....55
Tabel 2.13 Perbandingan Rincian Kelas Kelompok Tani terhadap provinsi dan Nasional pada tahun 2024 .....57
Tabel 2.14. Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD ..... 60
Tabel 2-15. Evaluasi Realisasi TPD/SDGs Kabupaten Bandung Tahun 2022-2024 ..... 68
Tabel 2.16. Kinerja dan Realisasi Kinerja Dinas Pertanian Tahun 2021-2024 ..... 71
Tabel 2.17. Anggaran dan Capaian Anggaran Dinas Pertanian Tahun 2021-2024 ..... 88
Tabel 2.18. Rekapitulasi Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian ..... 94
Tabel 2.19. Penelaahan RPJMN Asta Cita terhadap Urusan Pertanian.....104
Tabel 2.20. Visi RPJPD, RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Jawa Barat .....106
Tabel 2.21. RPJP Nasional, Provinsi Jawa Barat, Kab Bandung .....106
Tabel 2.22. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Pelayanan Dinas Pertanian ..... 116
Tabel 2.23. Tantangan Peningkatan produktivitas Pertanian dan ..... 119
Tabel 2.24. Tantangan Perubahan pemanfaatan lahan Pertanian Terus Meningkat .....120
Tabel 2.25. Tantangan Kurang optimalnya kelembagaan petani dan pelayanan pertanian..... 121
Tabel 2-26. Tantangan Keterbatasan infrastruktur yang menunjang budidaya pertanian.....122
Tabel 2-27. Tantangan Nilai Tambah Produk Pertanian Masih Rendah .....123
Tabel 2.28. RAD TPB Dinas Pertanian Tahun 2024 .....130
Tabel 2-29. Isu Strategis RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 .133

Tabel 2.30. Perumusan Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung ..... 139

Tabel 2.31. Isu Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun 2025-2029 ..... 143

Tabel 3.1 Visi RPJPN, RPJPD Provinsi, RPJPD Kabupaten ..... 146

Tabel 3.2 Tahap RPJPN, RPJPD Prov, dan RPJPD Kab Bandung ..... 146

Tabel 3.3. Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pertanian ..... 154

Tabel 3.4. Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Renstra Dinas Pertanian Tahun 2025-2029 ..... 156

Tabel 3.5. Penahapan Renstra Dinas Pertanian ..... 157

Tabel 3.6 Penyajian Lokus Dinas Pertanian ..... 160

Tabel 3.7 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Pertanian ..... 165

Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan Renstra Dinas Pertanian ..... 175

Tabel 4.2 Rencana Program / Kegiatan / Subkegiatan dan Pendanaan ..... 190

Tabel 4.3. Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah ..... 201

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian ..... 207

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian ..... 208

Tabel 4.6. Indikator TPB/SDGs ..... 209

# DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Pertanian menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung ..... 19

Gambar 2.2 Struktur Organisasi UPTD Dinas Pertanian menurut Peraturan Bupati Bandung Nomor 76 Tahun 2025 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Bandung ..... 20

Gambar 2.3 Struktur Organisasi UPTD Dinas Pertanian ..... 26

Gambar 2.4 Grafik Perkembangan Luas Lahan Sawah (Ha) ..... 31

Gambar 2.5 Grafik Perkembangan Produksi Komoditi Tanaman Pangan .... 34

Gambar 2.6 Peta Kawasan Potensi Padi ..... 35

Gambar 2.7 Peta Kawasan Palawija ..... 35

Gambar 2.8 Kawasan Potensi Sayuran ..... 40

Gambar 2.9 Kawasan Potensi Buahbuahan ..... 43

Gambar 2.10 Kawasan Potensi Kopi & Tembakau ..... 46

Gambar 2.11 Kegiatan Petani Komoditas Tembakau ..... 46

Gambar 2.12 Kawasan Potensi Ternak Sapi ..... 49

Gambar 2.13 Kawasan Potensi Ternak Unggas ..... 50

Gambar 2.14 Cascading IKU Renstra Misi 1 ..... 58

Gambar 2.15 Cascading IKU Renstra Misi 4 ..... 59

Gambar 2.16 Isu Strategis ..... 138

Gambar 3.1 Alur Renstra PD ..... 145

Gambar 3.2 Cascading Misi Pembangunan Kabupaten Bandung ..... 151

Gambar 3.3 Cascading Dinas Pertanian ..... 152